

Bisnis.com

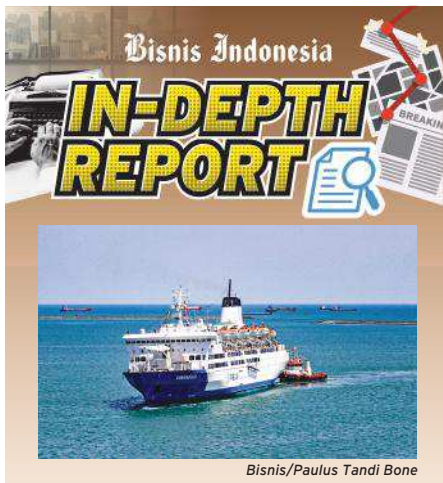
Navigator andal untuk mengambil keputusan kapan pun dan di mana pun

www.bisnis.com bisnis.com



Scan di sini

LENSA EKONOMI



Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pemangku kepentingan terkait perlu mengakselerasi transformasi industri pelayaran nasional menyusul tragedi kecelakaan kapal yang terus berulang, meski secara data angkanya telah membaik. Seluruh pihak diharapkan dapat duduk bersama guna menghasilkan tawaran opsi agar dapat menyelesaikan sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi sektor ini untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

Simak ulasannya di halaman 11-14

Apindo Minta Ada Evaluasi Upah Minimum Tahun Depan

Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta penetapan upah minimum 2026 tidak disamaratakan untuk seluruh jenis usaha menyusul perbedaan kemampuan perusahaan.

Hal. 4

Desa Dapat Jatah Imbal Hasil 20%

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berkewajiban memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih menyusul besarnya peran desa.

Hal. 5

Setrum Kendaraan Listrik Makin Kuat



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Penjualan mobil listrik berbasis baterai melanjutkan tren pertumbuhan sangat tinggi didorong oleh banyaknya insentif kepada kendaraan elektrifikasi di Tanah Air.

Hal. 7

Unjuk Gigi Emiten Teknologi

Emiten teknologi seperti PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. dan PT Bukalapak.com Tbk. kompak mencatatkan pertumbuhan kinerja pada paruh pertama dengan ditopang oleh sejumlah lini bisnis.

Hal. 9

Strategi Dapen Kelola Volatilitas

Strategi konservatif menjadi pilihan industri dana pensiun (dapen) dalam menghadapi volatilitas di pasar modal. Hingga Juni 2025, penempatan investasi di saham cenderung menurun, sedangkan penempatan di instrumen risiko rendah tetap bertambah.

Hal. 15

Untung & Rugi Universal Banking

Wacana OJK untuk mengkaji kemungkinan penerapan *universal banking* di Indonesia guna mendukung kemajuan pasar modal berpotensi mengerek pundi-pundi keuntungan bank, meski risikonya tak bisa dinafikan.

Hal. 16

MENAMBAT ASA DI SAHAM BUMN

Perbandingan Kinerja Indeks Saham Unggulan

Kode Indeks	Posisi Indeks	Kinerja 2024	Kinerja 13 Ags 2025	Kinerja Ytd 2025
IHSG	7.892,91	-2,65%	1,30%	11,48%
LQ45	829,85	-14,83%	0,80%	0,39%
IDX30	429,13	-14,48%	0,78%	1,33%
IDX80	124,22	-9,37%	0,75%	3,14%
IDX ESG Leader	152,25	-5,58%	0,73%	3,55%
IDX Quality 30	138,33	-12,19%	1,27%	-2,42%
IDX Value 30	127,91	1,01%	0,73%	1,51%
IDX Growth 30	140,64	-11,28%	0,98%	-0,37%
IDX High Dividend 20	492,32	-10,94%	0,96%	-3,84%
IDX BUMN20	375,48	-15,12%	1,01%	6,25%

Dionisio Damara & Rama Paramahansa
redaksi@bisnis.com

Saham-saham BUMN penguhni IDX BUMN20 kembali mencuri panggung dengan peningkatan harga yang signifikan pekan ini, bahkan ketika emiten *bluechip* lain masih tertinggal. Kondisi ini berkebalikan dengan 2024 kala indeks ini justru menjadi yang terlemah.

Penguatan ini membangkitkan asa terhadap *outlook* bisnis BUMN di tengah PR menumpuk di lingkungan korporasi milik negara ini. Hanya saja, masih tingginya ketidakpastian ekonomi global dan domestik menjadikan pasar perlu tetap waspada terhadap tren penguatan ini.

Kemarin, Rabu (13/8), IDX BUMN20 kembali menguat, lebih tinggi dibanding indeks saham unggulan lain, tetapi tidak sampai kembali *outperform* terhadap IHSG seperti hari sebelumnya. Menariknya, saham bank-bank BUMN yang sempat terbang sehari sebelumnya justru lesu.

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan penguatan indeks saham pelat merah ditopang oleh meredanya tensi dagang Amerika Serikat (AS) dan China, potensi relaksasi kebijakan moneter, dan kenaikan harga komoditas, khususnya emas.

Prospek IDX BUMN20 pada semester II/2025 pun dinilai stabil hingga positif, didukung oleh faktor tambahan seperti stabilitas rupiah, daya beli yang terjaga, dan tren positif harga komoditas energi.

Selain itu, tertinggalnya saham perbankan di indeks ini justru memberikan ruang penguatan potensial yang lebih besar jika ekonomi menuju stabilitas.



"Kami memandang IDX BUMN20 pada semester II/2025 memiliki *outlook* stabil hingga positif dikarenakan penguatan indeks ini belum didorong oleh emiten perbankan yang memiliki bobot terbesar," ucap Audi, Rabu (13/8).

Seiring dengan itu, menu-rutnya sejumlah saham BUMN pun layak dibeli, seperti BMRI dengan target harga Rp6.300, BBRI Rp4.630, TLKM Rp3.240, dan BRIS Rp3.460.

Sementara itu, Investment Analyst Capital Asset Management Martin Aditya mengatakan pemulihan indeks ini ditopang oleh ekspektasi perbaikan fundamental di kalangan emiten BUMN besar, terutama perbankan.

"Saat ini, ekspektasi pemangkasan suku bunga jadi faktor perbaikan fundamental saham perbankan," katanya.

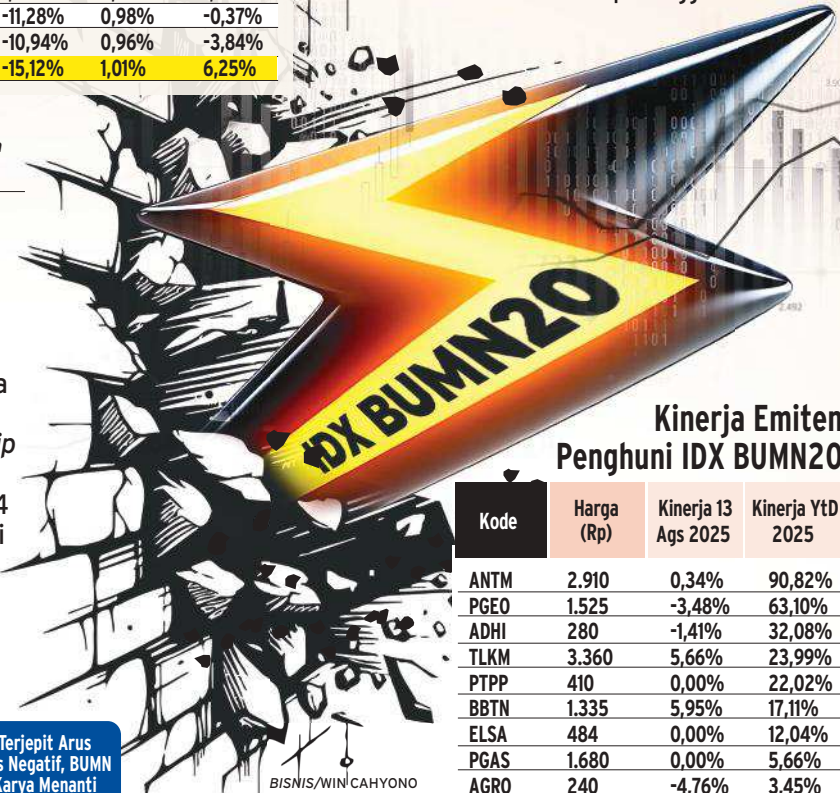
Di sisi lain, terjadi *rebound* teknikal di kalangan emiten kecil sektor semen dan konstruksi, terutama karena sentimen rencana merger BUMN Karya.

Meskipun demikian, Martin menilai realisasi belanja pemerintah dan aksi yang diambil Danantara secara umum

Penguatan IDX BUMN20 kian signifikan beberapa hari terakhir, mengantarkan indeks ini menjadi indeks unggulan dengan kinerja terbaik setelah IHSG.

Kinerja positif IDX BUMN20 tahun ini berkebalikan dibanding 2024, saat indeks tersebut justru menjadi yang terlemah di antara indeks unggulan lain.

Penguatan IDX BUMN20 tidak merata, dengan saham-saham perbankan cenderung masih di posisi terbawah secara *year-to-date* (Ytd).



Kinerja Emiten Penghuni IDX BUMN20

Kode	Harga (Rp)	Kinerja 13 Ags 2025	Kinerja Ytd 2025
ANTM	2.910	0,34%	90,82%
PGE0	1.525	-3,48%	63,10%
ADHI	280	-1,41%	32,08%
TLKM	3.360	5,66%	23,99%
PTPP	410	0,00%	22,02%
BBTN	1.335	5,95%	17,11%
ELSA	484	0,00%	12,04%
PGAS	1.680	0,00%	5,66%
AGRO	240	-4,76%	3,45%
BRIS	2.770	-0,36%	1,47%
MTEL	650	0,00%	0,78%
BBNI	4.370	0,23%	0,46%
BBRI	4.080	0,74%	0,00%
TINS	1.040	3,48%	-2,80%
BJTM	515	-0,96%	-4,63%
PTBA	2.450	0,41%	-10,91%
BJBR	790	0,00%	-13,19%
BMRI	4.870	-0,81%	-14,56%
JSMR	3.600	-1,37%	-16,86%
SMGR	2.630	0,00%	-20,06%

Ket: Data Per Rabu, 13 Agustus 2025
Sumber: Bursa Efek Indonesia

belum memberikan penguatan yang signifikan terhadap kinerja emiten di sektor tersebut.

Terpisah, Senior Market Charist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menyatakan laju IDX BUMN20 ditopang oleh sentimen makro ekonomi yang kondusif, dengan ekonomi AS dan Indonesia sama-sama luput dari risiko resesi teknikal.

"Kondisi tersebut memberikan perlindungan risiko bagi pelaku pasar dan emiten," katanya.

Di samping itu, kebijakan moneter global juga berpotensi mendorong pertumbuhan IDX BUMN20 lebih lanjut. The Fed diperkirakan memangkas suku bunga dua kali pada semester II/2025, diikuti BI dengan potensi penurunan 25-50 bps.

"Program pemerintah seperti lima paket stimulus kemudian ditambah dengan kebijakan

moneter BI yakni penurunan giro wajib minimum [GWM] juga berpotensi mendorong likuiditas perbankan," pungkas Nafan.

Nafan pun merekomendasikan beli ANTM dengan target harga Rp3.320, BBRI Rp4.730, BMRI Rp7.175, dan BBNI Rp5.000.

TANTANGAN FUNDAMENTAL

Sebaliknya, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai penguatan indeks lebih dipicu oleh *technical rebound* pada saham bank pelat merah yang sudah terdiskon, dengan arah suku bunga BI menjadi faktor kunci.

"Namun, belum ada katalis fundamental besar," katanya, Rabu (13/8).

Sementara itu, sentimen kehadiran Danantara menurutnya baru akan bertuah jika realisasi investasi dan arah proyeknya menjadi lebih jelas. Hal itu akan meningkatkan persepsi pasar terhadap prospek BUMN penerima manfaat.

Di antara saham BUMN, Harry merekomendasikan TLKM karena didorong oleh kenaikan harga paket perdana dan penawaran paket yang lebih sederhana. Selain itu, ANTM juga menarik karena diperkirakan masih diuntungkan oleh harga emas tinggi pada paruh kedua 2025.

Senada, Investment Analyst Infovesta Kapital Advorisi Fajar Dwi Alfian menilai penguatan IDX BUMN20 sebatas dipengaruhi sentimen jangka pendek.

"Untuk fundamental masih perlu menunggu waktu, terutama kinerja dari sektor riil dan fundamental ekonomi domestik," katanya, Rabu (13/8).

Dia menambahkan arah pergerakan IDX BUMN 20 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik, tingkat keyakinan konsumen, serta kebijakan suku bunga global dan domestik. ■

Tugas Berat Dongkrak Rasio Pajak

Surya D.A. Simanjuntak
surya.simanjuntak@bisnis.com

Aktivitas ekonomi yang tidak tertangkap oleh sistem perpajakan Indonesia terangkum dengan sederhana dalam rasio pajak semester I/2025.

Dengan penerimaan perpajakan (pajak serta bea dan cukai) Rp978,3 triliun dan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Rp11.612,9 triliun pada semester I/2025, maka rasio perpajakan (*tax ratio*) pada periode itu 8,4% dari PDB.

Rasio ini lebih rendah dari angka semester I/2024. Penerimaan perpajakan dan PDB atas dasar harga berlaku saat

itu masing-masing Rp1.028,04 triliun dan Rp10.825 triliun. Dengan demikian, rasio perpajakan semester I/2024 tercatat 9,5% dari PDB.

Ekonomi semester I/2025 (kumulatif) tumbuh 4,99% dibandingkan pertumbuhan 5,08% pada semester I/2024, tetapi rasio perpajakan menurun. Realisasi rasio pajak semester I/2025

itu juga masih jauh dari *outlook* terkini rasio perpajakan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 3 Juli. Saat itu, Menkeu menyampaikan realisasi semester I/2025 APBN 2025, termasuk penerimaan perpajakan, dan *outlook*-nya hingga akhir tahun. Mempertimbangkan

performa penerimaan perpajakan yang berkontraksi pada paruh pertama tahun ini sekaligus realisasinya yang jauh dari target, Menkeu menurunkan proyeksi rasio perpajakan 2025 menjadi 10,03% dari semula 10,24% PDB dalam APBN 2025.

• Bersambung ➡ 3

Manajer Konten: Akhirlul Anwar, Ana Noviani, Angrega Permado,
Anissa Sulistyorken, Aprianto Cahyo Nugroho, Aprianus Doni Tolok,
David Eka Issetabudi, Dennis Riantiza Meilanowa, Dwi Setiya Arifianto,
Edi Suwarkono, Emanuel Berkah Caesario, Fajar Sidik, Feni Freychetia
Fitriani, Fitri Sartinda Dewi, Hafiyah, Hendra Wibisono, Kahfi,
Lili Sunardi, Lukas Hendra T. Melyanti, Nita Chitra Dinisari, M.
Nurhadi Pratomo, Moh. Fatkhul Maskur, M. Taufikul Basari, Nirmala
Andana, Novita Sari Simamora, Nurbaiti, Praput Adi Sukarno, Rayful
Munisa, Renni Lestari, Rio Sandy Pradipta, Sri Mas Sari, Syaiful
Millah, Tegar Arief Fadly, Oktaviano Donald Baptista, Wahyu Arifin.

Asisten Manajer Konten: Abdullah Azzam, Andhika Anggoro
Wening, Asteria Desi Kartikasari, Dika Irawan, Dwi Nicken Tari,
Ibad Durrohman, Iim Fathimah Timorria, Jaffry Prabu Prakoso, Leo
Dwi Jatismi, Muhammad Ridwan, Nindyaa Aldila, Nurul Hidayat,
Rinaldi Muhammad Azka, Thomas Mola, Wibi Pangestu Pratama,
Yanita Petriella.

Staf Redaksi: Afifah Rahmah Nurdifa, Akbar Evandio, Alifian Asma'iyah, Anita Widyia Puspa, Anisa Rizki Kamalina, Annisa K. Saumi, Anindya Madya Sukma, Arif Gunawan, Aziz Rahardyan, Chelsea Venda, Dany Dwi Saputra, Desyinta Nuraini, Dewi Andriani, Dionisio Damara, Fahmi Ahmad Burhan, Indah Permata Hati, Lorenzo Anugrah Mahardika T., Luke Andrestara, Markus Gabriel Noviariz Fernandez, Mutiana Nabela, Ni Luh Angela De Merici Sadrine, Pemita Hestin Untari, Prasetyo Agung Ginojar, Rahmad Fauzan, Rika Anggerana, Sholahuddin Al Ayyubi, Surya Duta Artha Samanjatun, Yudi Supriyanto.

Fotografer: Abdurachman, Arief Hermawan P., Eusebio Chrysnamurti, Fanny Kusumawardhani, Himawan L. Nugraha.

DIREKTORAT BISNIS

General Manager Manajemen Konten dan Aktivasi: **M. Rheza Adrian**

Head Digital Marketing & Communication: **Siska Kartika Candra**

General Manager Strategi Digital & Monetisasi: **Arnis Wigati**

Manager Integrated Marketing Solution: **Dwi Putra Marwanto,**
Eka Puspitaningrum

Manager Digital Strategist: **Fardiana Fiqria Qurany**

Manager Sirkulasi: **Rosmayinda**

Manager Aktivasi: **Achmad Fauzi**

Manager Marketing Communication & Partnership: **Sulistyo Hadi**

Growth Marketing & Business Development Manager: **Halimatus**
Syakhdiyah Rambe

DIREKTORAT PRODUKSI

Head of Bisnis Indonesia Resource Center: **Setyardi Widodo**
Manager Produksi: **Muhammad Husin Parapat**

ANAK PERUSAHAAN

Navigasi Informasi Sibermedia: **Hery Trianto** (Direktur),
Didik Ahendra (General Manager),
Ferry Sannevil, **Kalidas Mahendren**, **Rachmad Subiyanto** (Manager)
Ahmad Habibi, **Irene Arta Uli**, **Rachma Amalia** (Asisten Manajer)
 Bisnis Indonesia Gagaskreastama: **Chamdan Purwoko** (Direktur),
Prasektio Nugraha Nagara, **Ervin Kurniawan** (Manager)
 Bisnis Indonesia Konsultan: **Chamdan Purwoko** (Direktur)

KANTOR PERWAKILAN

Bali: **Miftahul Ulum** (Kepala Perwukilan), Jl. PB Sudirman No. 4 Denpasar, Bali 80114 Telp. Fax: 0361-4746069
Bandung: **Dinda Wulandari** (Kepala Perwukilan), Ajiyah, Rachman (Fotografer), Jl. Buah Batu No. 46B Bandung 40261, Telp. 022-7321627, 7321637, 7321698 fax. 022-7321680
Balikpapan: **Sandy Ariatama** (Plt. Kepala Perwukilan), Muhammadiyah Mutawallie Sya rawie (Reporter) Balikpapan Superblok, Jl. Jend. Sudirman St. Kuda Kuda Blok A18, Balikpapan, Telp. 0542-723507 Fax. 0542-7213508
Medan: **Irsad Sali** (Kepala Perwukilan), Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun, Jl. Brigjen. Katamsno No. 6 Medan, Telp. 061-4554121/4553035 Fax. 061-4553042
Makassar: **Amri Nur Rahmat** (Kepala Perwukilan), Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Makassar, Telp. 0411-8112423 Fax. 0411-8114253
Palembang: **Herdiyan** (Kepala Perwukilan), Jl. Basuki Rahmat No. 6 Palembang, Telp. 071-5611474 Fax. 071-5611473
Pekanbaru: **Aang Ananda Suherman** (Kepala Perwukilan), Ruko Royal City Platinum No. 89 P. Jl. SM Amin, Arengka 2, Pekanbaru, Telp. 0761-8415055(hunting), 0761-8415077 Fax. 0761-8415066
Semarang: **Farodiah** (Kepala Perwukilan), Muhammadiyah Faisal Nur Ikhshan, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. 024-8442852 Fax. 024-8454527
Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** (Kepala Perwukilan), Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853

KORAN REGIONAL

Solopos: **Arif Budisusilo** (Presiden Direktur)
Sumwamin (Direktur Bisnis), **Annisa Nurul Aini** (Direktur
 Keuangan), **Rini Yustiningsih** (Pemimpin Redaksi) Jl. Adisucipto No.
 190, Telp. 0271-724811 Fax. 0271-724833
 Harian Joga: **Anton Wahyu Prihartono** (Direktur/Pemimpin
 Redaksi)
 Jl. A.M Sangaji No. 41, Jetis, Joga, Telp. 0274-583183,
 Fax. 0274-564440

Wartawan Bisnis Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apapun dari narasumber berkaitan dengan pemberitaan.

TARIF IKLAN (Rp/mmk)			
	Umum		
Jenis Iklan	Hitam Putih	Berwarna	
Display Khusus(Prospektus/ Neraca/RUPS/Peng Merger)	28.000.	45.000.	
Display Umum	100.000.	110.000.	
Display Hal. 1 (Maks. 1080 mmk)		220.000.	
Banner atas Hal. 1 (uk. 8 x 30 s/d 8 x 50 mmk)		235.000.	
Advertorial Hal. 1 (Maks. 1080 mmk)		240.000.	
Creative Ad.	110.000.	120.000.	
Advertorial Hal. Dalam	110.000.	120.000.	
Kolom*	600.000.	600.000.	
Baris**	50.000.*		
*) Minimum 1 kolom x 50mm, **) Minimum 3 baris			
Bisnis Indonesia Weekly			
Harga Iklan Umum			
1 Halaman Full Color	75.000.000		
1/2 Halaman Full Color	40.000.000		
Harga Iklan Packages			
Full Edition (12 pages FC)	600.000.000		
Half Edition (6 pages FC)	350.000.000		
Quarter Edition (4 pages FC)	250.000.000		
Spesifikasi			
Jenis Iklan	Hitam Putih	Berwarna	
Kemitraan, Layanan Masyarakat, Politik, Kasus Hukum, Lelang/Tender, Dukacita, Pernikahan, Hotel, Resto & Cafe, Pendidikan, Seminar, dan Lowongan	65.000	80.000	
Kolom Occasion (Perkavling)	35.000.000	50.000.000	

Rekening Bank a.n. PT Jurnallindo Aksara Grafika

• Bank BCA Cabang Wisma Asia No. 084-303-757-4

• Bank Mandiri Cabang Wisma Bisnis Indonesia No. 121-00-9009999-9

• Bank BNI (S) Cabang Kramat No. 1-052-886-8

• Harga Langganan Rp300.000 per bulan

• Harga Langganan Rp350.000 per bulan Khusus Wilayah Kalimantan, Sulawesi & Kawasan Timur Indonesia (Admin Langganan Koran: +62857 7044 6300)

• Harga Langganan E-paper Rp200.000 per bulan (Admin Langganan E-paper: +62812 9240 6196)

EDITORIAL

Bijak Mengejar Pajak

Realisasi penerimaan pajak yang loyo pada semester I/2025 mesti menjadi alarm bagi pemerintah untuk bergerilya mencari sumber-sumber baru, jika tak ingin target tahun ini meleset.

Faktanya, hingga Juni 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Padahal, dalam APBN 2025 pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun.

Penerimaan pajak hingga Juni 2025 juga tercatat turun 6,2% (*year-on-year*/YoY) jika dibandingkan dengan Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun. Alhasil, upaya untuk menemukan jalur-jalur penerimaan pajak baru juga inovatif makin mendesak.

Pemerintah memang boleh berharap pada aturan baru yang berlaku pada semester kedua tahun ini, antara lain pemajak-

OPINI

Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?



KUSFIARDI
Analisis Ekonomi Politik &
Co-Founder FINE Institute

kehilangan aset berharga, tetapi juga menyerahkan kendali atas kekayaan informasi rakyatnya kepada entitas asing. Ini bukan kemajuan teknologi, melainkan pengabaian kedaulatan. Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa dan penetrasi internet yang mencapai 78% pada 2024 (APJII, 2024), memiliki potensi data yang sangat besar. Namun, tanpa kebijakan yang jelas, potensi ini justru menjadi celah eksploitasi.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah meletakkan landasan untuk melindungi data warga. UU ini mensyaratkan bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan ke yurisdiksi dengan standar perlindungan setara atau lebih tinggi. Pasal 56 UU PDP secara eksplisit menegaskan bahwa negara tujuan harus memiliki regulasi yang menjamin privasi warga

Namun, hingga pertengahan 2025, otoritas pengawas independen yang diamanatkan UU belum terbentuk sepenuhnya. Peraturan turunan yang seharusnya memperkuat implementasi UU juga masih terjebak dalam proses harmonisasi antar kementerian, mencerminkan lemahnya koordinasi birokrasi (Kominfo, 2024).

DAMPAK

Di dalam negeri, kesempatan ini berpotensi memperdalam ketimpangan digital. Lebih dari 20 juta UMKM Indonesia aktif di platform digital pada 2024 (Kominfo, 2024), tetapi mayoritas tidak memiliki akses ke data perilaku pelanggan. Data ini dikuasai oleh platform asing seperti Shopee, Amazon, atau TikTok, yang menyusun algoritma berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, UMKM lokal hanya menjadi pelengkap dalam rantai pasok digital, tanpa kuasa untuk bersaing secara setara.

Kesenjangan ini makin terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut BPS (2023), hanya 57% rumah tangga di wilayah 3T memiliki akses internet stabil. Literasi digital juga rendah, dengan hanya 34% penduduk di wilayah ini memahami hak mereka atas data pribadi (SAFEnet, 2024). Tanpa intervensi yang terarah, digitalisasi justru menjadi alat eksploitasi struktural baru terhadap kelompok marginal.

itu juga turun dari 2024 mencapai 73,6%.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. Kementerian Keuangan pun sejatinya telah menyadari jika penurunan kepercayaan WP formal tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemungut pajak.

Dus, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak harus dapat merespons cepat untuk menjaga reputasinya, baik melalui profesionalisme maupun kebijakan yang relevan dan adil. Apalagi, selama ini masih sering terdengar tuduhan bahwa kebijakan pajak cenderung 'tajam' ke rakyat.

Contohnya, tudingan atas ketergantungan pemerintah pada pajak konsumsi yang regresif seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Buktinya, penerimaan PPN mencapai Rp819 triliun atau 36,7% dari total penerimaan pajak pada

2024. Problemnya, PPN dianggap lebih menekan rakyat kecil yang barangkali hampir seluruh pendapatannya dipakai untuk konsumsi.

Mempertimbangkan hal tersebut, strategi perpajakan pun ke depan mestinya tak melulu soal inovasi dan tambahan penerimaan, melainkan juga harus berkeadilan. Jangan sampai justru rakyat kecil terus terimpit, sedangkan kelompok kaya justru 'melenggang', padahal sejatinya menyimpan potensi pajak yang amat besar.

Hal yang perlu diingat adalah Indonesia masih menganut sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Artinya, kepatuhan sukarela yang terbentuk salah satunya berdasarkan kepercayaan. Tanpa hal itu, rasanya sulit membayangkan penerimaan pajak yang solid di masa mendatang. **■**

Pemerintah dapat memimpin gerakan non-blok digital di forum seperti UN Global Digital Compact, dengan menggandeng negara-negara di Global South untuk menegaskan bahwa kedaulatan data adalah hak kolektif yang tidak bisa dinegosiasikan secara sepihak.

Selain aspek regulasi dan diplomasi, aspek kapasitas juga penting. Pemerintah harus meluncurkan program nasional literasi digital yang menyasar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini harus mencakup edukasi mengenai hak privasi warga serta pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan data secara mandiri dan berdaya saing.

Akhirnya, negara perlu memprioritaskan investasi pada pusat data lokal dan pengembangan platform digital berbasis domestik. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan super app nasional yang mampu menandingi dominasi platform asing, sebagaimana dilakukan India melalui inisiatif Open Network for Digital Commerce (ONDC).

Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang adil dan berdaulat. Jika hak digital warga dinegosiasikan secara diam-diam demi keuntungan jangka pendek seperti penurunan tarif ekspor, Indonesia sedang membayar masa depan dengan harga murah. Potensi ekonomi digital yang mencapai USD 360 miliar pada 2030 bukanlah sekadar angka, tetapi cerminan peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif—jika dikelola dengan bijak.

Kini saatnya memilih. Apakah Indonesia akan menjadi pemasok data mentah bagi korporasi global, atau menjadi pemilik masa depan digitalnya sendiri? Keputusan ini tidak hanya menentukan arah ekonomi, tetapi juga martabat bangsa di era digital. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadikan data sebagai fondasi kedaulatan, bukan komoditas yang diperdagangkan.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru**. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila kurang dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimmkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.

SPEKTRUM

Buka Tutup

Hendra Wibawa
hendra.wibawa@bisnis.com

Tanda tanya penting tentang motif Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengembalikan status belasan bandara internasional akhirnya terjawab. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan langkah itu bertujuan mempermudah arus perdagangan dan pariwisata, serta pemerataan layanan penerbangan internasional. Jawaban lugas yang di siarkan dalam situs resmi otoritas penerbangan sipil Indonesia itu meneguhkan pengembalian status internasional kepada 17 bandara yang pernah diturunkan derajatnya menjadi hanya bandara domestik pada April 2024. Artinya, status domestik untuk 17 bandara

itu hanya 15 bulan. Menariknya, pengembangan status internasional kepada belasan bandara itu dibarengi juga dengan penetapan empat bandara internasional khusus. Keempatnya adalah Bandara Sultan Syarif Haroen Setia Negara, Bandara Weda Bay, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, serta Bandara Bersujud. Kini, Indonesia memiliki 40 unit bandara internasional, terdiri atas 36 unit bandara internasional dan 4 bandara internasional khusus penanganan penerbangan carter, evakuasi medis, hingga penanganan bencana. Bila motif pengembangan status internasional demi mendongkrak arus perdagangan dan pariwisata, data ternyata berbicara sebaliknya. Ambil contoh Bandara Pattimura Kota Ambon Maluku yang kini menjadi internasional sesuai

dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menangani 432 penumpang rute internasional sepanjang 2019. Pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada 2020—2022 tidak ada penumpang internasional di bandara itu. Hal yang sama juga dialami Bandara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor Papua dengan hanya menangani 141 penumpang ke luar negeri sepanjang 2019. Nasib serupa juga dialami Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang pada 2019 hanya melayani 1.104 penumpang internasional selama 2019, sedangkan pada 2020—2023 sebanyak 0 penumpang. Data tersebut menegaskan bahwa status bandara internasional tidak secara otomatis berdampak signifikan terhadap arus kunjungan turis asing ke

destinasi wisata di daerah. Sebaliknya, penambahan bandara internasional memiliki konsekuensi biaya besar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Dengan status internasional, Kementerian dan Lembaga (K/L) yang membidangi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaa wajib menempatkan unit kerja dan personel di bandara itu. Secara otomatis, operator bandara internasional juga harus memenuhi infrastruktur dasar sesuai standar International Civil Aviation Organization (ICAO), serta memastikan koordinasi kelancaran dan ketertiban melalui Komite Fasilitas (FAL) Bandara. Bila penambahan bandara internasional tak efektif memacu sektor pariwisata, lantas untuk apa kebijakan itu?



RAKOR TATA KELOLA PERBERASAN



Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat rapat koordinasi tata kelola perberasan di Jakarta, Rabu (13/8). Dalam rapat tersebut Menko Pangan menginstruksikan Perum Bulog untuk mempercepat pendistribusian beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

HULU MIGAS NASIONAL |

HITUNGAN AKURAT PRODUKSI MINYAK

Bisnis, JAKARTA — Produksi dan *lifting* minyak bumi nasional terus menunjukkan tren yang menggembirakan, karena per Juni 2025 tercatat telah melampaui target APBN dengan memasukkan komponen *natural gas liquid* ke dalamnya.

M. Ryan Hidayatullah
redaksi@bisnis.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan produksi minyak bumi nasional per Juni telah mencapai 608.100 barel per hari (bph). Angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2025 sebanyak 605.000 bph. Dalam sebuah kesempatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku optimistis tren produksi dan *lifting* minyak akan terus meningkat dan bisa memenuhi target APBN. Sebagai catatan, realisasi *lifting* minyak pada 2024 mencapai 579.000 bph. Menurutnya, ada beberapa tantangan yang mesti disiasati pemerintah untuk bisa meningkatkan *lifting* minyak, yakni sumur-sumur minyak yang sudah terlalu tua, banyaknya sumur *idle* yang tidak teroptimalkan, hingga risiko besar dalam kegiatan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Akan tetapi, merujuk pada paparan Bahlil saat menyampaikan capaian kinerja Kementerian ESDM semester I/2025, otoritas energi nasional itu memasukan *natural gas liquid* (NGL) ke dalam produksi minyak. Berbeda dengan *liquefied natural gas* (LNG), NGL merupakan

kelompok hidrokarbon cair yang terkandung dalam gas alam, termasuk etana, propana, butana, dan pentana yang dipisahkan dari gas alam selama proses pemurnian. Sementara itu, LNG adalah gas alam yang dicairkan dengan cara didinginkan pada suhu yang sangat rendah untuk memudahkannya dalam transportasi dan penyimpanan. Penggunaan NGL ke dalam penghitungan produksi minyak tersebut membuat data Kementerian ESDM sedikit berbeda dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mencatat produksi minyak bumi nasional pada paruh pertama 2025 sebanyak 579.300 bph. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan bahwa pihaknya belum memasukkan NGL ke dalam komponen

produksi minyak nasional. Alhasil, data produksi minyak yang disampaikan SKK Migas lebih rendah dari yang disampaikan oleh Kementerian ESDM. “Saat konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025 yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli belum memasukkan NGL dalam produksi minyak, tetapi hanya minyak dan kondensat,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (13/8). Ke depan, kata Hudi, SKK Migas bakal mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak, sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam data industri hulu migas nasional. Kementerian ESDM sendiri belum menjawab permintaan konfirmasi yang *Bisnis* sampaikan hingga berita ini diturunkan.

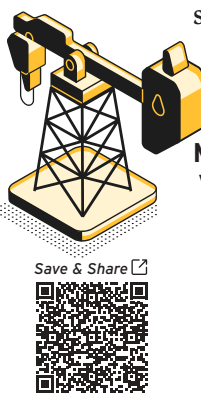
PEMBARUAN DATA

Secara terpisah, praktisi migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak dari SKK Migas

lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh KKKS. “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas, karena di-*update* setiap Minggu dalam *Shipcoord Meeting* yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Hadi kepada *Bisnis*. Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, seharusnya NGL yang menjadi salah satu bahan baku *liquefied petroleum gas* (LPG) ke dalam rezim gas, sesuai dengan

nomenklatur dalam APBN. Dia pun mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi datanya ke SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru terkait dengan pencatatan komoditas, maka harus selaras dengan regulasi dan aturan yang terkait. “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan bisa sinkron dan tidak membingungkan,” ucap Hadi.

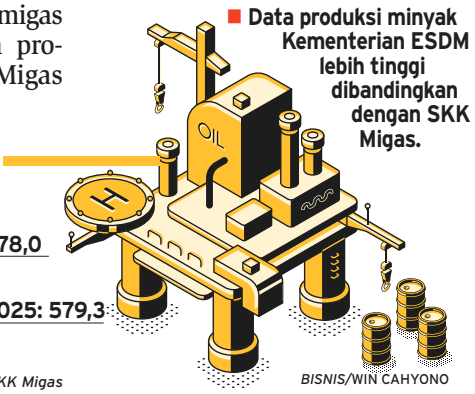
Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat, perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas hanya sebatas pada rekonsiliasi data yang belum sinkron. “Terkait dengan capaian angka produksi atau *lifting* pada suatu waktu tertentu, misalnya pada Juni saja. Itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya. Dia pun mengaku hal tersebut bukan masalah besar, karena APBN memperhitungkan *lifting* minyak untuk periode setahun penuh. Untuk itu, pemerintah mesti menyampaikan data yang akurat di sisi tahun ini. ☐



Produksi Minyak Bumi 2025 versi Kementerian ESDM (MBOPD)	
Januari	599,6
Februari	598,5
Maret	602,9
April	602,4
Mei	602,9
Juni	608,1

Produksi Minyak Bumi versi SKK Migas (MBOPD)	
► Realisasi Juni 2024: 578,0	
► Target 2025: 605	
► Realisasi Semester I/2025: 579,3	
► Outlook 2025: 605	

Sumber: Kementerian ESDM, SKK Migas



Data Capaian Produksi dan *Lifting* Migas Semester I/2025, Target hingga Outlook Akhir Tahun

- Ada perbedaan data produksi minyak bumi antara Kementerian ESDM dan SKK Migas.
- Data produksi minyak Kementerian ESDM lebih tinggi dibandingkan dengan SKK Migas.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Aرسال melihat bahwa tidak ada yang aneh dari fenomena rasio perpajakan turun ketika ekonomi tumbuh. “Karena tidak semua penerimaan pajak kita itu langsung berhubungan dengan PDB pada saat yang bersangkutan,” ujar Yon. Dia melanjutkan, penerimaan dari pajak pertama nilai (PPN) memang bisa mencerminkan ekonomi secara langsung, karena ada sistem kredit pajak. Namun, penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi tidak bisa langsung mencerminkan kondisi ekonomi saat itu. Menurutnya, angsuran PPh korporasi yang dibayar saat ini merupakan cerminan kinerja perusahaan tahun lalu. Oleh sebab itu, jika kinerja perusahaan-perusahaan tahun lalu cerah, maka performa penerimaan PPh Badan akan terlihat

baik tahun ini. “*Nah*, kalau dia sekarang lagi jelek, itu tecerminnya nanti di tahun depan, walaupun perusahaan punya yang namanya dinamisasi dan sebagainya,” jelasnya. Rasio perpajakan rendah yang berkaitan dengan ketidakmampuan sistem perpajakan menangkap pertumbuhan ekonomi telah berulang kali diingatkan oleh Bank Dunia. Organisasi pembangunan internasional itu menemukan bahwa penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Indonesia, salah satunya adalah tingginya ambang batas pengenalan pajak UMKM. Bank Dunia melihat, tingginya ambang batas—hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar yang dikutip PPN dan PPh Badan—menyebabkan banyak korporasi tak dikenai pajak.

UMKM pun menjadi kurang diawasi dan kurang patuh dalam pelaporan pajak formal. Selain itu, Bank Dunia melihat pangsa aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*) di Indonesia sangat besar, sekitar 17,6% hingga 21,8% dari total PDB. Bank Dunia menyarankan agar pemerintah harus memperluas akses informasi tentang seluruh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan data pihak ketiga untuk meningkatkan penegakan kepatuhan pajak. Di sisi lain, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku tidak heran apabila rasio pajak semester I/2025 turun. Menurutnya, penurunan itu lebih banyak dipengaruhi faktor nonekonomi pada periode itu, seperti ada kenaikan restitusi,

penyesuaian tarif efektif rata-rata pajak penghasilan karyawan (TER PPH 21), sampai dengan masalah teknis seperti gangguan implementasi Coretax. “Kondisi ini sama dengan tahun lalu, meski tak sebesar tahun lalu—yang tidak ada masalah teknis, seperti Coretax,” ujar Fahry. Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp978,3 triliun selama semester I/2025 atau baru mencapai 39,3% dari target APBN. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp1.028,04 triliun atau setara 44,51% dari target APBN. Fajry meyakini kinerja perpajakan pada tahun ini mengikuti pola yang sama pada tahun lalu, yakni akan ada perbaikan sampai akhir tahun.

TARGET 2026

Rasio perpajakan yang stagnan di kisaran 8%

selama bertahun-tahun juga menggambarkan betapa sulitnya mencapai rasio yang lebih tinggi, termasuk target 10,08%—10,54% PDB pada 2026 yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR, yang selanjutnya akan mendasari penyusunan target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar, sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada Jumat (15/8). Dari sisi ekstensifikasi penerimaan negara, Kemenkeu ingin mengintegrasikan data dan informasi perpajakan dan penerimaan negara, analisis bersama data perpajakan dan penerimaan negara, serta perluasan basis penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar. Dari sisi pengawasan dan

penegakan hukum, Kemenkeu akan melakukan kerja sama penyidikan tidak pidana perpajakan dalam negeri maupun lintas negara, sinergi patroli laut, satgas bersama untuk penanganan barang ilegal, serta penguatan pengawasan PNBP. Kemenkeu juga melakukan penanganan keberatan/banding/gugatan melalui keputusan perkara, penyelesaian banding, khususnya di DJP, dan penegakan fungsi hukum perpajakan. Di sisi pelayanan, komunikasi, dan edukasi, Kemenkeu akan mendorong inklusi kesadaran perpajakan, promosi ekspor UMKM, hingga kemitraan perpajakan internasional. Meskipun demikian, Fajry dari CITA menilai target rasio perpajakan mendekati 11% sulit terwujud dalam waktu dekat. Menurutnya, rasio perpajakan hanya akan naik sejalan dengan perbaikan kinerja penerimaan. ☐



Hasil Studi Potensi Penerimaan Negara jika Beragam Pajak Progresif Diterapkan Menurut Celios

| SEKTOR KETENAGAKERJAAN |

APINDO MINTA ADA EVALUASI UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta penetapan upah minimum 2026 tidak disamaratakan untuk seluruh jenis usaha menyusul perbedaan kemampuan perusahaan.

Reyhan Fernanda F.
redaksi@bisnis.com

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menjelaskan bahwa permintaan itu menanggapi tuntutan kalangan buruh terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

“Sebaiknya tidak disamaratakan kemampuan perusahaan, jelas berbeda-beda,” katanya kepada *Bisnis* melalui pesan singkat, Rabu (13/8).

Dia menegaskan penentuan upah minimum 2026 perlu memperhitungkan terlebih dahulu data angka inflasi, kemampuan perusahaan, tingkat pengangguran serta daya beli pekerja.

Oleh karena itu, Bob memandang perlu ditekankannya upah minimum sebagai ambang batas acuan atau *threshold* bagi perusahaan.

Dengan langkah itu, masing-masing perusahaan dapat melengkapi kebijakan tersebut secara bipartit, yakni melibatkan dua pihak antara serikat pekerja dengan pengusaha. “Sebaiknya ada ruang untuk bipartit di unit-unit tiap perusahaan,” kata Bob.

Dari Bandung, Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mendorong evaluasi sistem pengupahan di Indonesia yang berbasis Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dia mengatakan persoalan UMK selalu menjadi masalah setiap tahun dan membuat pemerintah menetapkan tidak rasional. Ketidakrasionalan ini bisa tergambar di sejumlah daerah di Jabar yang memiliki perbedaan upah meskipun posisinya berdekatan seperti Sumedang dengan Kabupaten Bandung, Subang dengan Purwakarta, juga Karawang dengan Bekasi.

“Nah, saya tadi ada gagasan disampaikan ke forum Apindo, mudah-mudahan dan di depan Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana kalau

ke depan upah itu terpusat. Berlaku sama di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, penerapan upah sektoral tidak lagi melihat wilayah per wilayah mengingat sejumlah daerah memiliki sektor usaha yang berbeda-beda. Jika masih berbasis UMK, imbuhnya, akan selalu menjadi komoditas politik di daerah terutama menjelang Pilkada.

“Tidak *usah* membedakan wilayah lagi. *Udah*, sektoral [saja]. Sektor kimia, energi, dan pertambangan di manapun sekian upahnya. Sektor garmen di manapun sekian. Sektor makanan dan minuman di manapun sekian, sehingga tidak lagi upah menjadi bahan komoditi politik,” tuturnya.

Menurutnya, penetapan upah yang selalu menjadi komoditas politik akan menjadi beban kepala daerah.

Dia menilai upah sektoral bisa mencegah mudahnya industri merelokasi pabrik atau usaha karena tekanan upah lalu mencari daerah yang upahnya lebih murah. “Jadi tidak lagi nanti industri itu begini. Karawang lari ke Indramayu, karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah,” ucapnya.

Bila standar upah sama, dia yakin penyesuaian upah dengan masing-masing sektor, maka iklim dunia industri dan buruh akan kondusif.

“Menurut saya, kalau berbasis sektoral, maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama. Energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuhan di kita kondusif,” paparnya.

Dia menilai kenaikan upah tidak akan memiliki dampak signifikan pada kehidupan buruh manakala biaya hidup masih mahal. Dia menunjuk tingginya biaya pendidikan, akses air bersih, biaya listrik hingga transportasi. “Maka tugas kita, para bupati dan wali kota dan gubernur adalah menekan agar biaya produksi rakyat kita menurun,” ujarnya.

TUNTUTAN BURUH

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

Presiden KSPI & Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, putusan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup layak mesti dipertimbangkan dalam penetapan

Sebaiknya tidak disamaratakan kemampuan perusahaan, jelas berbeda-beda.

upah minimum. Di samping itu, upah minimum sektoral juga wajib diberikan kepada buruh yang nilainya di atas UMP/UMK.

“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada November,” katanya.

Said menjelaskan bahwa pihaknya telah menganalisis perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral tahun depan. *Pertama*, akumulasi nilai inflasi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.

Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam pada periode yang sama diproyeksikan berkisar 5,1% hingga 5,2%. *Ketiga*, indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPI dan Partai Buruh adalah 1,0 sampai dengan 1,4.

Selain itu, Said memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap nilai tambah tiap sektor industri, yang berada pada kisaran 0,5% hingga 5% tergantung jenis industrinya. Dengan demikian, usulan kenaikan UMSP/UMSK dari KSPI dan Partai Buruh juga mencakup perhitungan tersebut.

“KSPI dan Partai Buruh mendesak peme-

rintah untuk menetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral 2026 dapat diputuskan paling lambat 30 Oktober 2025,” jelasnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh pada Februari 2025 meningkat dibanding Februari 2024.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, rata-rata upah buruh dari Februari 2024 ke Februari 2025 meningkat 1,78%, dari Rp3,04 juta menjadi Rp3,09 juta.

Sebaliknya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik kian marak terjadi periode paruh pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, jika merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan, angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan, ada banyak faktor yang memicu terjadinya PHK, di antaranya menurunnya permintaan sehingga industri mengurangi produksi, perubahan model bisnis, hingga adanya masalah di internal perusahaan.

Adapun, dibandingkan Januari-Juni 2024, angka pengangguran pada periode Januari-Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 32,1%.

Kendati demikian, laporan terkini dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut setidaknya 70.000 buruh terkena PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. *(K57/Atiffah Rahmah Nurdifa)*

Perkembangan Beberapa Upah Minimum Provinsi (Rp juta/bulan)

Provinsi	2025*	2024	2023	2022	2021
Kepulauan Riau	3,62	3,40	3,27	3,05	3,00
Sumatra Utara	2,99	2,80	2,71	2,52	2,49
Sumatra Barat	2,99	2,81	2,74	2,51	2,48
Lampung	2,89	2,71	2,63	2,44	2,43
Banten	2,90	2,72	2,66	2,5	2,46
DKI Jakarta	5,39	5,06	4,9	4,64	4,41
Jawa Barat	2,19	2,05	1,98	1,84	1,81
Jawa Tengah	2,16	2,03	1,95	1,81	1,79
DI Yogyakarta	2,26	2,12	1,98	1,84	1,76
Jawa Timur	2,30	2,16	2,04	1,89	1,86
Bali	2,89	2,81	2,71	2,51	2,49
NTB	2,60	2,44	2,37	2,20	2,18
NTT	2,32	2,18	2,12	1,97	1,95
Kalimantan Barat	2,87	2,70	2,60	2,43	2,39
Kalimantan Selatan	3,49	3,28	3,1	2,90	2,87
Kalimantan Tengah	3,47	3,28	3,18	2,92	2,90
Kalimantan Timur	3,57	3,36	3,20	3,01	2,89
Kalimantan Utara	3,58	3,36	3,25	3,01	3,00
Gorontalo	3,22	3,02	2,98	2,80	2,78
Maluku	3,14	2,94	2,81	2,61	2,60
Papua	4,28	4,02	3,86	3,56	3,51
Papua Barat	3,61	3,39	3,28	3,20	3,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kemenaker, diolah

*) Kenaikan 6,5%

Populasi Angkatan Kerja di Indonesia (juta orang)



BISNIS/SINTA NOVIZAH

PROGRAM KAMPUNG IKLIM



Antara/M Risyah Hidayat

Pekerja bersama warga memanen pakcoy yang ditanam secara hidroponik di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/8). PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan bersama enam ketua RT perwa-

kilan dari Kelurahan Mekar Sari menjalankan program kampung iklim (Proklim) yang merupakan strategi pemerintah untuk mendorong seluruh pihak melaksanakan aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

| PROYEK INFRASTRUKTUR MINIM |

Penjualan Semen Anjlok

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia menyatakan penurunan penjualan semen domestik mengalami penurunan akibat minimnya proyek infrastruktur di Tanah Air.

Menurut data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), produksi semen semester 1/2025 sebesar 28,76 juta ton atau turun 5,8% secara tahunan (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 30,53 juta ton.

Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan penurunan penjualan ini terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali di Sumatra yang tumbuh 4,9% dan Maluku-Papua tumbuh 5% pada periode tersebut.

“Penjualan semen pada periode semester 1/2025 mengalami penurunan 2,5% dibandingkan tahun 2024,” kata Lilik kepada *Bisnis*, Rabu (13/8).

Dia menerangkan bahwa penyebab utama dari penurunan penjualan semen yaitu masih lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur nasional.

Adapun, penyebab penurunan penjualan semen saat ini juga masih menjadi tantangan utama untuk paruh kedua tahun ini. Alasannya, Lilik melihat kondisi pasar masih *oversupply* sehingga utilisasi pabrik masih rendah sekitar 55,6%.

“Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ditambah dengan pengu-rangan budget infrastruktur,” tuturnya.

Bahkan, tantangan penjualan tersebut membuat pelaku usaha pesimistis. Semula, ASI menargetkan pertumbuhan kinerja penju-

alan 2% tahun ini. Namun, dia melihat target tersebut masih menantang dengan pencapaian kinerja semester 1/2025.

Sebelumnya, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk. (INTP) juga mencatat penurunan penjualan semen dan klinker secara keseluruhan turun 1,6% periode paruh pertama tahun ini.

Corporate Secretary INTP Dani Handajani mengatakan penjualan domestik (semen dan klinker) sebesar 8,6 juta ton atau turun 2,4% YoY, sedangkan volume ekspor meningkat 45,8% menjadi 237.000 ton. Penurunan semen secara nasional ini terutama disebabkan oleh kontraksi 10,2% di pasar semen curah, akibat penurunan permintaan dari proyek Ibu Kota Negara. *(Atiffah Rahmah Nurdifa)*

| KOPDES MERAH PUTIH |

DESA DAPAT JATAH IMBAL HASIL 20%

Bisnis, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berkewajiban memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih menyusul besarnya peran desa.

Rika Anggraeni
rika.anggraeni@bisnis.com

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa kewajiban itu merupakan komitmen Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih berperan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.

Menurutnya, kewajiban itu diatur dalam Pada Pasal 7 (1) Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 10/2025 (Permendes dan PDT 10/2025) tentang Mekanisme Perse- tujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. “Keuntungannya, di Permendes [Permen- des dan PDT 10/2025] disebutkan 1 tahun ketika itu ada laba bersih melalui rapat koperasi, berapa persen langsung di situ juga berlaku untuk desa 20%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT Jakarta, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan kewajiban Kopdes itu sejalan dengan keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kajian proposal bisnis Kopdes Merah Putih.

Nantinya, pemberian imbal jasa dilak- ukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APB Desa. Adapun, pemberian imbal jasa dipergunakan sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

“Karena lahirnya, prosesnya, pengawalannya, peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang- kurangnya 20%,” ujarnya.

Yandri juga menambahkan bahwa semua kementerian/lembaga setuju 20% dari keuntungan Kopdes dikembalikan ke desa.

Dengan masuknya keuntungan Kopdes dalam APB Desa, dia menegaskan dana itu bisa digunakan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan sumber daya manusia hingga infrastruktur.

“Permendes ini bukan maunya Menteri Desa dan tim, tetapi sudah lintas kement- erian/lembaga. Jadi, 20% ini sudah disetujui oleh kementerian/lembaga yang ikut dalam harmonisasi lahirnya Permendes Nomor 10 Tahun 2025,” paparnya.

Selain mengatur imbal jasa, Permendes dan PDT itu mengatur ketentuan penggu- naan dana desa yang salah satunya tidak ada kewajiban mengembalikan dana desa jika gagal bayar.

“Jadi, dana desa yang dipakai oleh Kope- rasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri.

Menurutnya, dana desa yang dipinjam tidak menjadi utang Kopdes Merah Putih. Dia menyatakan hal itu sebagai dukungan pemerintah untuk menyelamatkan Kopdes Merah Putih.

Dia memberikan contoh, jika pada bulan ke-8 Kopdes Merah Putih meng- alami gagal bayar ke bank, dana desa akan menalangi pembayaran Rp10 juta dan itu tidak menjadi utang koperasi.

“Itu bagian bentuk dukungan peme- rintah dalam hal untuk menyelamatkan koperasi,” terangnya.

Dengan kebijakan itu, dia menegaskan tidak ada kewajiban bagi Kopdes Merah Putih untuk mengembalikan pinjaman dana desa.

Yandri menerangkan dukungan pin- jaman yang berasal dari dana desa tidak selalu digunakan Kopdes Merah Putih. Penggunaannya hanya berlaku pada saat Kopdes tersebut mengalami gagal bayar alias macet.

Jika di bulan berikutnya Kopdes mam- pu membayar angsuran pokok dan bun- ga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dia menegaskan dana desa tidak digunakan.

Adapun, dukungan pengembalian pin- jaman dari dana desa akan sangat ber- gantung pada setiap pagu dana desa. Jika pagu dana desa Rp400 juta—Rp499,99 juta, maka dukungan pinjaman sebesar 30% dari dana desa, yakni senilai Rp12,49 juta per bulan. Besaran nilai ini sudah termasuk angsuran pokok dan bunga per bulan.

Yandri menegaskan beleid baru yang mengatur Kopdes itu mulai berlaku pada tanggal diundang- kan, yakni pada 12 Agustus 2025. Yandri kembali menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan jika Kopdes tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke Himbara atau menjadi pilihan terakhir.

Aturan itu ditetapkan dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa dukungan pe- ngembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan ke- butuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hal itu disepakati bersama Kement- erian Kesehatan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang menyepakati re- laksasi sejumlah peraturan dan petun- juk teknis pengelolaan apotek desa dan klinik desa itu.

“Harapannya pada akhir bulan ini akan keluar peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yang nanti akan diikuti oleh Ke- menterian Investasi untuk perizinan dalam pengelolaan apotek dan klinik desa serta yang lain-lainnya,” kata Ferry.

Menurutnya, upaya itu dilakukan se- iring dengan hasil pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Bali beberapa waktu lalu, yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih beroperasi Agustus-September tahun ini.

Nantinya, Kopdes Merah Putih dapat melayani penjualan obat dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau diban- dingkan dengan di luar Kopdes.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, juga menyambut baik gagasan menyup- lai obat dengan harga diskon. Dengan Langkah itu, harga jual di apotek desa dapat lebih murah.

“Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa apotek desa cukup dikelola oleh

“**Jadi 20% ini sudah disetujui oleh kementerian/lembaga yang ikut dalam harmonisasi lahirnya Permendes Nomor 10 Tahun 2025.**

tenaga kefarmasian tanpa kewajiban apoteker, dan ti- dak memerlukan perizinan baru selama dilembagakan dalam Kopdes.

Selain relaksasi aturan, tegasnya, Kemenkes juga menerbitkan buku saku



Volume Usaha, SHU dan Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia

SHU: Sisa Hasil Usaha						
Kategori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi (unit)	123.048	127.124	127.846	130.354	130.119	131.617
Volume usaha (Rp triliun)	154,72	174,03	182,35	197,88	197,93	214,01
SHU (Rp triliun)	6,27	7,23	7,18	7,88	8,0	8,15

Sumber: DataIndonesia.id, BPS, Kemenko Pangan, diolah

BISNIS/RADIOO EKO

■ Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan mendapatkan dukungan dari dana desa sebesar 30% dari pagu dana desa per tahun.

■ Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wajib menyisihkan imbal hasil 20% kepada desa.



Unit Usaha Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih

- Kantor Koperasi
- Toko Sembako
- Simpan Pinjam
- Klinik Desa
- Apotek Desa
- Logistik Desa
- Gudang (Cold Storage)

Potensi Lini Bisnis dengan BUMN

- Penyalur/Agen Pupuk
- Outlet LPG 3 kg
- Gerai Sembako
- Agen bank
- Layanan Logistik Pos
- Penyalur Bantuan Pemerintah
- Serap Gabah Petani
- Apotek Obat Murah

Strategi Jitu Kemendag Tingkatkan Ekspor UMKM

Kementerian Perda- ganan (Kemendag) mengeluarkan berba- gai upaya strategis dalam menggenjot ekspor terutama bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain membuka akses ke pasar internasional, pemerintah juga memperkuat posisi produk lokal di kancah dunia.

Salah satu strategi Kemendag memperluas pasar ekspor produk UMKM adalah melalui fasilitas *business matching*. Selain itu, Kemendag juga menginisiasi program UMKM Bisa Ekspor untuk pelaku bisnis kecil dan menengah.

Perluasan ekspor juga dilakukan pemerintah di 33 negara dengan kehadiran perwakilan Kemendag mulai dari Atase Perdagangan hingga Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

“Sampai Mei 2025, Kemendag melalui 46 perwakilan perda- ganan (perwadag) RI di 33 negara mitra dagang telah memfasilitasi 296 kegiatan *business matching* yang diikuti oleh 474 UMKM dengan total transaksi sebesar US\$ 68,65 juta atau setara Rp1,1 triliun. Itu UMKM,” tutur Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melepas tim Jelajah Ekspor Bisnis Indonesia 2025 beberapa waktu lalu.

Data terbaru sepanjang Januari hingga Juli 2025, Kemendag telah memfasilitasi 410 kegiatan *business matching* yang diikuti oleh 773 UMKM. Dari kegiatan tersebut, tercatat total transaksi sebesar US\$90,04 juta atau setara Rp1,46 triliun. Angka ini terdiri atas pesanan pembelian / *purchase order* (PO) senilai US\$ 55,09 juta dan potensi transaksi sebesar US\$ 34,95 juta.

Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025 belum lama ini menemui sejumlah eksportir lintas industri yang merasakan dampak positif dari dukungan Kementerian Perdagangan, salah satunya industri furnitur asal Semarang, Jawa Tengah, PT Philnesia International yang mengapresiasi peran Kemendag dalam penyelenggaraan *business*



matching melalui ITPC.

“Dengan adanya bantuan perwakilan perdagangan RI di berbagai negara, eksportir mendapatkan kredibilitas dan reputasi, sehingga dipercaya untuk menjangkau pasar tersebut,” kata Erick Luwia selaku Direktur PT Philnesia International. Selain itu, pitching dengan calon pembeli dinilai mempermudah Philnesia untuk melakukan riset pasar, dalam hal ini menemukan preferensi produk unggulan. “Kerja sama dengan Kemendag membantu kami melakukan riset secara lebih akurat, lengkap, dan cepat,” tutur Erick.

Sejauh ini, produk Philnesia paling digemari oleh pembeli dari Amerika Serikat dan berbagai negara di kawasan Eropa dengan porsi hingga 90% dari keseluruhan ekspor. Sementara sisanya terbagi untuk kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia.

Di samping itu, eksportir makanan seperti PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co yang berbasis di Jakarta Utara juga menerima dukungan serupa dari Kemendag.

Pemilik Kultiva, Suryaningsih Wibowo menyatakan andil Kemendag dalam pengembangan usahanya dilakukan melalui ruang pamer di Kemendag, yaitu Permanent Trade Exhibition (PTE) dan *business matching*.

“Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena

mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun makin besar,” ungkapnya.

Saat ini, produk Kultiva Co khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS) dengan ekspor sekitar 6 kontainer per bulan senilai US\$ 126.000.

Begitupun, eksportir keripik tempe asal Sleman, DI Yogyakarta yakni CV Arva Indonesia turut merasakan dukungan Kemendag dalam penyelenggaraan *business matching*.

Arnold Wirakusuma selaku Pendiri Arva Indonesia membeberkan bahwa Kemendag juga mendorong partisipasinya pada pameran di dalam maupun luar negeri.

“Jadi, Kementerian Perdagangan memberikan cukup banyak komitmen kepada kami, seperti sertifikasi dan expo,” jelasnya.

Saat ini, negara tujuan ekspor Arva Indonesia mencakup sejumlah negara utama yakni Amerika Serikat, Australia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Kuwait. Dia mengaku tengah melakukan penetrasi pasar ke berbagai tempat, seperti Hong Kong, Taiwan, dan Timur Tengah.

Ke depan, Arnold berharap agar Arva mampu berekspansi baik dari sisi jangkauan ekspor maupun skala usaha. Dia mengungkapkan ketertarikan untuk memasarkan ke Afrika hingga Amerika Latin.

TEKNOLOGI PENANGGULANGAN BENCANA



Antara/ Fahri Hermansyah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno (kedua kanan) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (ketiga kanan) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad

Syafii (kanan) meninjau peralatan kebencanaan milik BNPB pada pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 di Jakarta, Rabu (13/8). Pameran teknologi penanggulangan bencana menjadi forum kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

| HARGA ECERAN TERTINGGI |

MENGHAPUS DISPARITAS HARGA BERAS

Bisnis, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan medium di sebagian besar daerah masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET), Rabu (13/8). Sementara produsen menurunkan produksi, dan pengecer pun menerapkan pembatasan pembelian.

M. Mutawallie Syarawie & Harian Noris Saputra
redaksi@bisnis.com

Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam Informasi Pangan Strategis melaporkan, harga rata-rata beras premium 8,40% di atas HET, sementara beras medium harga rata-ratanya melampaui HET hingga 15,88%.

Hampir seluruh daerah menghadapi harga beras premium di atas HET, kecuali Yogyakarta dan Sumatra Selatan. Sebanyak 13 provinsi menghadapi disparitas hingga 5,3%, dan 20 provinsi lain disparitasnya lebih tinggi hingga 18,32%.

Adapun untuk beras medium, hanya Kalimantan Selatan yang rata-rata harganya di bawah HET. Sementara daerah yang disparitas harganya kurang dari 5% hanya Jambi dan Yogyakarta. Selebihnya berada di zona merah.

Bukan hanya soal harga mahal, sejumlah daerah menghadapi beredarnya isu kelangkaan pasokan. Di Balikpapan, sejumlah peritel dan distributor menerapkan kebijakan pembatasan pembelian beras premium untuk mencegah *panic buying*.

Direktur Yova Supermarket Jett Yova Cahyali mengungkapkan, pihaknya saat ini memiliki stok beras 3,6 ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekitar 1 pekan mendatang.

Sebagai bentuk kehati-hatian, manajemen toko membatasi pembelian hanya untuk kemasan 5 kg dan 10 kg per konsumen. “Pembatasan ini untuk mencegah *panic buying*, bukan menimbun. Memang sempat kosong 2—3 hari, tetapi setelah pasokan masuk, stok kembali aman,” kata Jefri Yova, Senin (11/8).

Untuk memastikan kecukupan stok, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud melakukan inspeksi ke tiga titik distribusi beras, yakni Yova Supermarket, UD Gunung Sari, dan Toko Aulia Sepinggian.

Berdasarkan sidak ke distributor UD Gunung Sari, terdapat ketersediaan 75 ton beras premium, sementara cadangan strategis Bulog mencapai 8.000 ton. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak *panic buying*. Memang stok terbatas di beberapa kota, termasuk Balikpapan, kemungkinan karena faktor panen atau distribusi,” Mas’ud.

Di tingkat distributor, harga beras premium yang ditawarkan Rp395.000 per karung 25 kg dan Rp81.000 per karung 5 kg.

Dari Bali dilaporkan, pabrik beras membatasi pasokan beras premium dengan alasan tingginya harga bahan baku yang menyebabkan harga jual melampaui HET. Sementara itu, pemerintah melarang melarang menjual beras di atas HET.

“Dengan berat hati disampaikan bahwa untuk sementara waktu akan membatasi produksi dan distribusi Beras Putri Sejati Hijau dan Merah,” bunyi pemberitahuan CV Sri Ayu Sejati (SAS), pabrik beras di Banyuwangi.

Menurut SAS, pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas perusahaan. SAS juga berharap keadaan kembali normal sehingga bisa memproduksi beras premium dengan jumlah yang lebih besar.

Budiman A Sinaga, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali, menjelaskan pabrik membatasi pasokan beras premium sejak larangan penjualan beras premium di atas HET.

“Untuk beras premium dibatasi pasokannya oleh pemasok,” jelas Budiman saat dikonfirmasi, Rabu (13/8).

Walau dibatasi, penjualan di ritel kata Sinaga masih normal, tidak ada *panic buying* karena peritel juga menjual beras nonpremium.

Selain itu, tidak ada kenaikan harga beras premium imbas pembatasan stok. “Untuk penjualan masih normal, belum ada *panic buying*, harga beras premium masih sama, hanya stoknya terbatas,” kata Budiman.

Menurut laman info pasar Kota Denpasar, harga beras premium Rp16.000 per kg, sementara beras C4 15.000 per kg, beras kereta Rp11.500 per kg.

Di Medan, peritel modern mengakui stok beras premium di gerai-gerai mereka dibatasi oleh suplai.

Customer Supervisor Irian Supermarket di Pasar Merah Rahmad Angga mengatakan, saat ini pihaknya hanya mendapat pasokan rata 50 karung beras kualitas premium kemasan 10 kg dalam sekali pasok.

“Karena stok terbatas, jadi beras yang datang langsung dipajang seluruhnya. Biasanya kami ada stok karena pasokan bisa mencapai 500—1.000 karung per minggu,” kata Rahmad kepada *Bisnis*, Rabu (13/8).

Harga beras premium di Sumut rata-rata Rp16.664 per kg, atau 8,21% di atas HET.

Provinsi Riau juga menghadapi rata-rata harga beras premiun yang lebih tinggi dari HET. Harga rata-rata beras premium di Riau, Rabu (13/8) mencapai Rp16.622 per kg atau 7,94% di atas HET.

Perum Bulog Kanwil Riau-Kepri telah berupaya meredam harga dengan mengencarkan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Total penyalurannya mencapai 600 ton sejak operasi pasar digelar pada 18 Juli.

“*Insyaaallah* dengan suplai cukup, harga bisa tertahan atau bahkan turun,” ujar Kepala Bulog Riau-Kepri Ismed Erlando, Rabu (13/8).

RAPAT TERTUTUP

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup untuk membahas distribusi beras dengan sejumlah pejabat, Selasa (12/8).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.

“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas soal strategi

Disparitas Harga Beras Premium (Rp/Kg)

Nasional
Harga Rata-rata
Rp16.151
HET
Rp14.900
Disparitas
+8,40%

Zona 1
Harga Rata-rata
Rp15.486
HET
Rp14.900
Disparitas
+3,93%

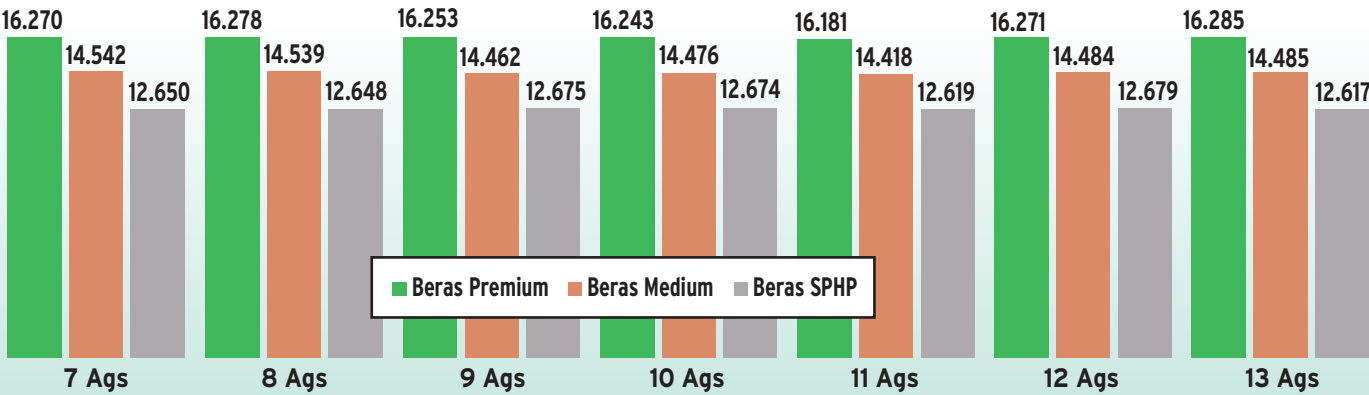
Zona 2
Harga Rata-rata
Rp16.545
HET
Rp15.400
Disparitas
+7,44%

Zona 3
Harga Rata-rata
Rp18.401
HET
Rp15.800
Disparitas
+16,46%

Data Harga Pangan: Bawang Merah hingga Beras Turun, Daging Sapi Lebih Mahal (13 Agustus 2025)



Tren Harga Rata-rata Beras Periode 7 Agustus - 13 Agustus 2025 (Rp/Kg)



Sumber: badanpangan.go.id, 2025, diolah

BISNIS/RADYO EKO

PERINGATAN PERDAMAIAN ACEH



Bisnis/Abdullah Azzam

Presiden Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe (*dari kiri*) berbincang dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wali Nangroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, dan Dekan ERIA School of Government Nobuhiro Aizawa saat acara forum reflektif Peringatan

20 Tahun Perjanjian Damai Aceh di Jakarta, Rabu (13/8). Forum yang membahas perjalanan panjang perdamaian Aceh serta tantangan dalam menjaga komitmen ke depan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang terlibat langsung dalam perdamaian Aceh.

| APBD 2026 |

Jakarta Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

Bisnis, JAKARTA — Pemeritah Provinsi Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor pendidikan dan kesehatan seiring dengan disetujuinya rancangan APBD tahun anggaran 2026 senilai Rp95,35 triliun.

Pemprov Jakarta dan DPRD menyepakati rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (12/8). “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,35 triliun,” kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin.

Kenaikan APBD TA 2026 sebesar 4,4%, lebih moderat dari kenaikan APBD TA 2025 sebesar 11,53% menjadi Rp91,3 triliun. Sebelum disepakati, lima

komisi DPRD telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD TA 2026 selama 5 hari, Selasa-Senin (5—11/8).

Kenaikan anggaran TA 2026 disepakati setelah melihat kondisi inflasi di DKI Jakarta dan pertumbuhan Ibu Kota yang lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimistis,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Jakarta tumbuh 5,18% pada kuartal kedua 2025, sementara ekonomi nasional 5,12%.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Jakarta lebih tinggi karena Jakarta sudah mulai dikelola

secara baik.

Khoirudin menambahkan bahwa dengan besaran APBD 2026, Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga, terutama terkait dengan program prioritas pada sektor kesehatan dan pendidikan, seperti sekolah swasta gratis.

Ia mengemukakan bahwa KUA-PPAS itu akan dijadikan acuan untuk menyusun APBD 2026 yang lebih terperinci lagi. KUA juga bisa menjadi arah kebijakan keuangan dan ekonomi di Jakarta 2026.

“Jadi semoga Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga. Khususnya, prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. (*Sholahuddin Al Ayyubi*)

| SATELIT KOMUNIKASI |

SNL Bakal Meluncur Bulan Depan

Bisnis, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara men-jadwalkan Satelit Nusantara Lima akan meluncur pada bulan depan dari Florida Space Coast Amerika Serikat.

CEO sekaligus Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi komunikasi satelit, dan Satelit Nusantara Lima (SNL) akan melanjutkan warisan tersebut.

“Satelit ini akan memberdayakan komunitas, sekolah, dan bisnis yang belum pernah memiliki akses andal. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, SNL akan memperkuat kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan kapasitas nasional,” katanya dikutip dari laman *Sat News* pada Rabu (13/8).

Adi menambahkan kemitra-

an dengan Boeing dan mitra teknologi global memastikan tidak ada yang tertinggal seiring pertumbuhan Indonesia.

SNL yang baru saja diserahkan Boeing kepada PSN dirancang untuk menyediakan konektivitas berkapasitas tinggi dan andal bagi lebih dari 17.000 pulau di Indonesia serta wilayah Asia Tenggara.

Menggunakan platform 702MP andalan Boeing, satelit itu mampu memberikan kapasitas lebih dari 160 Gbps untuk mendukung akses internet *broadband* dan layanan komunikasi penting di berbagai wilayah. Dengan teknologi pemrosesan muatan canggih, SNL dapat mengarahkan kapasitas internet dan komunikasi secara dinamis ke lokasi yang membutuhkan.

Untuk menunjang kinerjanya, satelit ini dilengkapi sayap surya buatan anak per-

usahaan Boeing, Spectrolab, yang mampu menghasilkan daya hingga 15 kW sehingga dapat beroperasi penuh selama misi 15 tahun.

Spectrolab juga tengah meningkatkan kapasitas produk-sinya guna memenuhi tingginya permintaan sel surya kelas antariksa.

Presiden Boeing Satellite Systems International Ryan Reid menambahkan Boeing memiliki sejarah panjang melayani Indonesia dan Asia Pasifik sejak peluncuran satelit Palapa A1 pada 1976.

“Dengan Nusantara Lima, kami melanjutkan warisan itu, menghadirkan solusi andal dan berkapasitas tinggi yang disesuaikan dengan geografi unik dan kebutuhan konektivitas Indonesia. PSN telah menjadi mitra luar biasa sepanjang program ini,” kata Reid. *(Pernita Hestin Untari)*

■ PENGGUNA ESIM XLSMART



Petugas melayani pelanggan di salah satu gerai milik PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) di Jakarta, Rabu (13/8). Emiten berkode saham EXCL tersebut mencatat jumlah pengguna eSIM telah menembus angka 850.000 hingga pertengahan 2025.

| PENJUALAN MOBIL ELEKTRIFIKASI |

SETRUM KENDARAAN LISTRIK MAKIN KUAT

Penjualan mobil listrik berbasis baterai melanjutkan tren pertumbuhan sangat tinggi didorong oleh banyaknya insentif kepada kendaraan elektrifikasi di Tanah Air.

Rizqi Rajendra
rizqi.rajendra@bisnis.com

Saat industri otomotif nasional tengah lesu, penjualan mobil berbasis baterai atau (*battery electric vehicle/BEV*) justru membukukan pertumbuhan sangat tinggi.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan BEV secara *wholesales* atau pengiriman dari pabrik ke diler selama 7 bulan pertama 2025 menembus 42.178 unit.

Angka penjualan itu nyaris melampaui pencapaian penjualan mobil listrik sepanjang 2024 yang mencapai angka 43.188 unit. Hal itu tak lepas dari makin banyaknya merek dan model terbaru yang kian meramaikan pasar mobil listrik Tanah Air.

Mengilapnya penjualan mobil listrik murni ditopang oleh banyaknya insentif ke kendaraan elektrifikasi. Sejak digaungkan kebijakan subsidi mobil listrik, termasuk untuk impor utuh, tingkat pertumbuhan penjualan mobil listrik cukup signifikan.

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/2025, pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP 10% untuk mobil listrik *completely knoc-ked down* (CKD).

up (CBU) dan CKD sebesar 15%, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.

Produsen mobil listrik asal China, BYD memimpin pasar BEV dengan raihan penjualan 16.427 unit per Juli 2025. Moncernya penjualan BYD itu ditopang dari berbagai model andalannya seperti BYD M6, Sealion 7, Atto 3, Seal dan Dolphin.

Teranyar, BYD juga telah meluncurkan model *city car* terbarunya, BYD Atto 1 di ajang GIIAS 2025 yang mencuri perhatian karena harganya dibanderol mulai Rp195 juta, setara LCGC.

Di peringkat kedua masih dihuni oleh sub-merek premium Grup BYD, yakni Denza yang meraih angka 6.256 unit. Perlu diketahui, Denza baru memiliki satu model yakni MPV listrik premium Denza D9 yang meluncur pada 22 Januari 2025 di harga Rp950 juta.

Berikutnya, Wuling bertengger di posisi ketiga dengan pencapaian sebanyak 6.210 unit per Juli 2025. Sederet mobil listrik andalan Wuling yakni Air EV, Binguo EV dan Cloud EV.

Jenama mobil asal Negeri Panda lainnya yakni Chery membukukan penjualan 5.196 unit, ditopang dari model J6 dan E5. Disusul Aion yang meraih angka 3.126 unit.

Berikutnya, Geely membukukan penjualan mobil listrik 1.508 unit, diikuti Morris Garage (MG) yang meraih angka

sebanyak 1.012 unit.

Berturut-turut, merek mobil listrik terlaris selanjutnya pada 7 bulan pertama 2025 yakni produsen mobil asal Korea Selatan Hyundai sebanyak 978 unit, Neta 433 unit dan Citroen 232 unit.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan moncernya penjualan mobil BYD ditopang model MPV listrik BYD M6 menjadi tulang punggung penjualan perseroan.

Menurutnya, BYD M6 paling diburu konsumen dengan mencatatkan penjualan sebanyak 7.143 unit, atau 43,48% dari total penjualan *wholesales*.

Di urutan kedua ada BYD Sealion 7 yang meraih angka sebanyak 6.395 unit, disusul BYD Atto 3 yang membukukan penjualan 1.364 unit.

Berturut-turut, mobil listrik BYD yang paling diburu konsumen yakni BYD Seal sebesar 999 unit dan BYD Dolphin 429 unit. Adapun, di data Gaikindo tercatat penjualan model BYD E6-GS sebanyak 97 unit, namun tipe itu hanya dijual khusus armada taksi Blue Bird.

Terbaru, BYD telah meluncurkan model *city car* terbarunya, BYD Atto 1 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025.

BYD Atto 1 menjadi sorotan public karena dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, sementara tipe Premium dihargai senilai Rp235 juta OTR Jakarta.

Dia optimistis tersebut sejalan dengan pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) mobil listrik yang meningkat secara eksponensial di Indonesia.

“Dari 2 tahun lalu, mobil listrik itu hanya sekitar 3% [*market share*], tahun lalu sudah mencapai 5%, dan di semester I/2025 telah mencapai hampir 10%. Artinya, ada peningkatan EV *awareness* yang cukup tinggi,” ujar Luther kepada *Bisnis*, Senin (11/8).

Khusus BYD Atto 1, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan keterjangkauan harga model itu tidak hanya berasal dari biaya pembelian (*total cost ownership*) yang sangat kompetitif. “Oleh karena itu, saya percaya semakin banyak orang yang akan memilih BYD Atto 1 sebagai mobil pertama,” ujar Eagle.

Terkait harga yang murah, dia telah melakukan studi mendalam terkait pasar di Indonesia, jauh sebelum meluncurkan sederet model kendaraannya di Indonesia.

Menurutnya, BYD adalah satu-satunya produsen mobil yang memiliki semua teknologi kunci, seperti baterai, motor listrik, bahkan semikonduk-

tor. Tak hanya teknologi, BYD mampu memproduksi sendiri hampir semua komponen inti, kecuali ban dan kaca. Alhasil, hal itu juga berpengaruh terhadap penentuan harga jual kendaraannya.

Eagle menyatakan terkejut bahwa dengan harga yang ditawarkan tersebut, BYD Atto 1 mendapatkan antusiasme yang tinggi di kalangan konsumen di Indonesia.

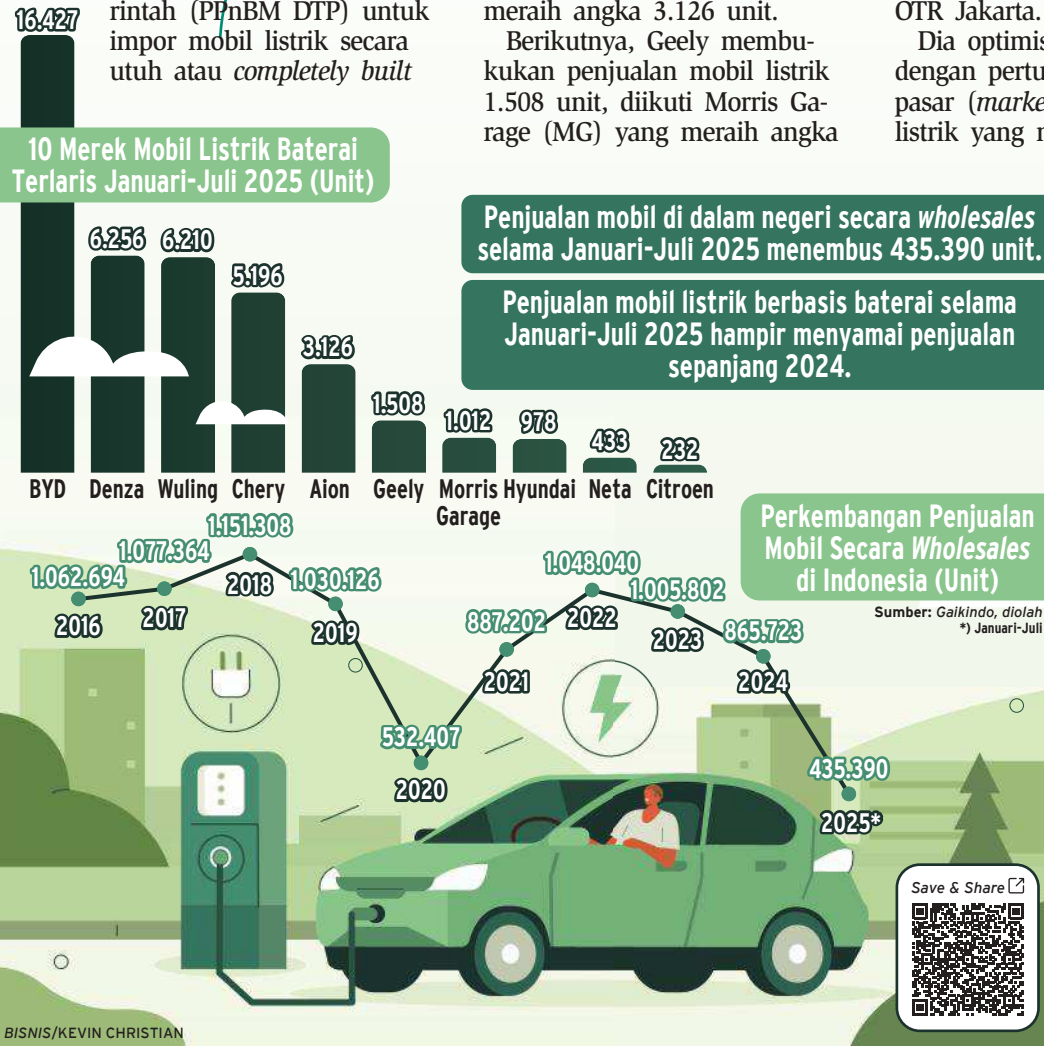
INSENTIF TAMBAHAN

Sebaliknya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza tengah mempertimbangkan wacana untuk mendorong produsen mobil listrik di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti *nickel cobalt aluminium* (NCA) dan *nickel manganese cobalt* (NMC).

Wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu muncul lantaran masih banyak pabrik EV di Tanah Air yang mengadopsi kendaraan baterai berbasis lithium atau *lithium ferro phosphate* (LFP).

Imbauan *shifting* atau peralihan penggunaan baterai berbasis nikel ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air. Pabrik baterai BYD di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC.

Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut. Kementerian BUMN pun mendorong pemberian insentif kepada produsen EV yang melakukan pengalihan itu. “Kami dukung usulan Kementerian BUMN,” ucap Faisol. ■



PENGUMUMAN
RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA
PT APTIV COMPONENTS INDONESIA

Direksi **PT APTIV COMPONENTS INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa **APTIV INTERNATIONAL HOLDINGS 2 (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg bermaksud untuk melakukan pengambilalihan terhadap 99,79% saham Perseroan dari **APTIV GLOBAL HOLDINGS 2 (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, selaku pemilik 99,79% saham Perseroan ("**Pengambilalihan**").

Pengambilalihan saham tersebut merupakan pengambilalihan yang dilakukan secara langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), yang mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.

Para kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan lainnya yang keberatan dengan rencana Pengambilalihan dapat mengajukan keberatan secara tertulis, sehubungan dengan rencana Pengambilalihan ini disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT Aptiv Components Indonesia
Jl. Raya Semarang – Kendal KM. 12 Blok B 06 Kawasan Berikat, PT Putra Wijayakusuma Sakti, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, 50153

Pengumuman ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UUPT.

Semarang, 14 Agustus 2025
Wiryawan
DIREKTUR
PT Aptiv Components Indonesia

ANNOUNCEMENT
PLAN FOR SHARE ACQUISITION IN
PT APTIV COMPONENTS INDONESIA

The Board of Directors of **PT APTIV COMPONENTS INDONESIA**, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta ("**Company**"), hereby announces that **APTIV INTERNATIONAL HOLDINGS 2 (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, an entity established under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, intends to acquire approximately 99,79% of the Company from **APTIV GLOBAL HOLDINGS 2 (LUXEMBOURG) S.A R.L.**, the holder of approximately 99,79% of the Company's shares ("**Acquisition**").

The proposed Acquisition constitutes a direct acquisition from the shareholder of the Company as referred to in Article 125 paragraph (1) in conjunction with Article 127 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended from time to time ("**Company Law**"), which will result in a change of control over the Company.

Creditors or other interested third parties who object to the proposed Acquisition may submit their written objections, along with reasons and supporting evidence, no later than 14 calendar days from the date of this announcement to:

PT Aptiv Components Indonesia
Jl. Raya Semarang – Kendal KM. 12 Blok B 06 Bonded Zone, PT Putra Wijayakusuma Sakti Wijaya Kusuma Industrial Estate, Semarang City, 50153

This announcement is made in compliance with the provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3) of the Company Law.

Semarang, 14 August 2025
Wiryawan
DIRECTOR
PT Aptiv Components Indonesia

| PERKARA KORUPSI KUOTA HAJI |

KPK Perkirakan 100 Agen Terlibat

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan lebih dari 100 agen perjalanan haji terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023—2024.

“Travel itu [yang terlibat] tidak cuma satu. Puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” ujar Plt. Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

Menurut Asep, pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan 10.000 kuota haji khusus pada 2024 yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Berdasarkan SK itu, kuota haji tambahan yang didapatkan Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler, dan 10.000 kuota haji khusus.

Asep menduga agensi perjalanan haji dengan skala besar diduga mendapatkan

jatah kuota haji khusus yang besar dari alokasi yang tersedia sebanyak 10.000 kuota tambahan haji pada 2024.

“Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya sebagian 10 atau dibuat 10. Jadi, sesuai dengan travel, seperti itu,” katanya.

Sebelumnya pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan telah memulai penyelidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023—2024.

Pengumuman tersebut dilakukannya setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada Senin, 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut men-

capai lebih dari Rp1 triliun.

Pada tanggal yang sama, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut atas nama Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim telah menemukan sejumlah kejanggalaan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan sebanyak 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Him-

puh) Muhammad Firman Taufik menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum terkait adanya pihak travel haji yang terlibat dalam kasus kuota haji yang ditangani oleh penyidik KPK.

Ketika ditanya berkaitan dengan identitas agen perjalanan haji yang diusut oleh KPK, Firman mengakui tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu siapa saja dan saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

Firman juga menegaskan bahwa Himpun tidak akan memberikan bantuan hukum kepada lebih dari 100 agen perjalanan umrah dan haji yang terlibat dalam dugaan perkara korupsi tersebut.

“Tidak ada bantuan, kita ikuti saja proses hukumnya dan kita berdoa bersama-sama,” katanya.

Firman berharap proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan agen perjalanan haji diharapkan diurus secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya harapkan sekali penegakan hukum berjalan sesuai aturan jangan ada titipan apapun,” ujarnya. (Muhammad Ridwan/Sholahuddin Al Ayyubi)

| DEMO DI PATI RICUH |

Korban Luka 34 Orang



Antara/Aji Styawan

Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Dalam unjuk rasa tersebut massa kecewa dan menilai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya tidak segera dipenuhi.

Bisnis, JAKARTA — Aksi unjuk rasa di kantor Bupati Pati Jawa Tengah kemarin, Rabu (13/8), berlangsung ricuh. Demonstrasi yang menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya tersebut menimbulkan 34 korban luka.

Polda Jawa Tengah juga mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sebelumnya di media sosial dikabarkan aksi tersebut menimbulkan korban jiwa.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto menyampaikan isu terkait korban tewas dalam unjuk rasa itu adalah berita bohong atau hoaks.

“[Info meninggal dunia] tersebut tidak benar, nihil yang meninggal, tersebut berita tidak

dapat dipercaya,” ujar Artanto saat dikonfirmasi, Rabu (13/8).

Artanto menambahkan bahwa dalam peristiwa unjuk rasa itu tercatat total ada 34 korban luka dengan perincian 7 anggota kepolisian dan sisanya berasal dari pendemo. Korban yang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Suwondo.

“Data sementara 34 orang yang diobati di Rs Suwondo. 7 anggota Polri dan 27 kelompok pendemo. Ada sebagian yang sudah dipulangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat memantau dinamika di Pati dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. (Anshary Madya Sukma/Akbar Evandio)

| LOGISTIK UNTUK GAZA |

Kemhan RI Kirim Bantuan Via Udara

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan bantuan logistik bagi warga korban perang di Gaza dengan metode *air drop* atau dijatuhkan dari pesawat angkut Hercules milik TNI AU, Rabu (13/8).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Letjen) TNI Tri Budi Utomo mengatakan bantuan seberat 800 ton terdiri atas bantuan makanan, obat-obatan hingga pakaian dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma.

“Semua bantuannya mudah-mudahan bisa untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Gaza ya,” kata Tri dilansir dari laman resmi Kemhan, Rabu (13/8).

Tri menjelaskan pengiriman

ini merupakan bagian dari misi perdamaian yang dijalankan Indonesia. Ini juga bukan pengiriman pertama yang dilakukan.

Sebelumnya, TNI telah mengirimkan bantuan logistik dengan metode yang sama ke beberapa titik lokasi di Gaza. Dalam pengiriman kali ini, TNI bekerja sama dengan militer Yordania. Informasi dari Yordania, ada 10 titik aman di wilayah Gaza yang menjadi lokasi *dropping* bantuan.

TNI juga sudah memperhitungkan kemungkinan upaya pencegahan oleh militer Israel saat mengirim bantuan tersebut.

“Jadi dari 1 Agustus sampai tanggal 24 Agustus ini Israel sudah membuka khusus untuk bantuan ini.” (Muhammad Ridwan)

| OPERASI TANGKAP TANGAN |

KPK Tangkap Direksi Inhutani V

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan menjangar sejumlah pihak. Salah satu pihak yang terjaring yakni direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kegiatan OTT KPK tersebut kemarin, Rabu (13/8). “[OTT di] Jakarta,” ujar Fitroh dilansir dari Antara, Rabu (13/8).

Lebih lanjut, Fitroh mengatakan bahwa KPK telah menangkap direksi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dan pihak swasta. “Inhutani V,” kata Fitroh mengungkapkan.

Diketahui, PT Eksploitasi dan

Industri Hutan (Inhutani) V merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Umum Perhutani. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. OTT tersebut merupakan yang keempat pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjangar anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada Maret 2025. Pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut. Kemudian OTT selama 7—8 Agustus 2025 di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. (Muhammad Ridwan)

Afrika Selatan Paling Banyak Main Judi Online

Sumber: We Are Social & Meltwater, DataIndonesia.id



Daftar Negara Pengguna Internet Judi Online Tertinggi (kuartal I/2025)	
Afrika Selatan	29,5%
Afrika Selatan menjadi negara dengan persentase pengguna internet yang bermain judi online tertinggi pada periode tersebut, yakni 29,5%.	
Yunani	29,1%
Norwegia	29,1%
Yunani dan Norwegia menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna internet yang bermain judi online masing-masing sebesar 29,1%.	
Selandia Baru	23,8%
Austria	17,8%
Hungaria	20,9%
Australia	17,2%
Inggris	18,8%
Ghana	16,9%
Irlandia	18,4%
Kanada	15,7%
Brasil	18,3%
Hong Kong	15,7%
Portugal	17,9%
Nigeria	15,6%

| HUT KE-80 RI |

Persiapan Sudah 70%

Bisnis, JAKARTA — Istana Kepresidenan terus bersiap menyambut perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta yang akan digelar pada Minggu (17/8).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan gladi kotor kedua perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka sudah mencapai proses hingga 70%.

“Alhamdulillah, baru saja selesai kita gladi yang kedua. Tentu tadi sempat kita perhatikan semakin mendekati sempurna dibandingkan kemarin. Meskipun demikian tetap masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Rabu (13/8).

Dia memberikan contoh salah satu yang masih perlu penyempurnaan adalah ketepatan waktu pergantian antar-pertunjukan, termasuk sinkronisasi antara atraksi udara dan pesawat. “Kita mau atur supaya waktu dan koordinatnya lebih pas, supaya lebih bagus dan enak untuk ditonton,” jelasnya.

Peringatan HUT ke-80 RI akan digelar dengan rangkaian acara di Istana Merdeka dan area publik sekitar Monas, lengkap dengan upacara, atraksi udara, dan pesta rakyat. (Akbar Evandio)

| HAK CIPTA |

Ketentuan Karya Musik dan Lagu Bebas Royalti

Bisnis, JAKARTA — Di tengah kisruh royalti karya musik, masyarakat sebenarnya tetap bisa memutar lagu di ruang publik tanpa harus yang terbebas royalti. Apalagi belakangan ini, beberapa musisi Indonesia telah secara terbuka mengizinkan lagu-lagu mereka dibawakan atau dinyanyikan masyarakat dalam situasi tertentu.

Namun, di luar karya-karya yang telah digratiskan para musisi tersebut, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) juga telah mengatur bahwa ada jenis-jenis karya yang masuk kategori bebas royalti.

Pertama, Lagu kebangsaan. Pasal 43 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengumuman, distribusi, hingga penggandaan lagu kebangsaan dalam bentuk aslinya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Siapa pun bebas membawakan lagu kebangsaan versi asli tanpa harus membayar royalti. Namun, kebebasan ini tidak berlaku untuk aransemen, perubahan lirik, atau penggunaan yang bersifat komersial yang dapat mengubah makna atau merendahkan martabat lagu kebangsaan.

Kedua, lagu *public domain*. Menurut Pasal 58 Ayat 1 UU Hak Cipta, perlindungan hak cipta atas lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa teks berlaku selama penciptanya masih hidup hingga 70 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Pada Ayat 2 dijelaskan, jika lagu tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka masa perlindungan hak cipta

hanya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Setelah masa perlindungan berakhir, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tidak lagi berlaku, sehingga karya tersebut dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun dan menjadi *public domain*. Meski demikian, hak moral tetap melekat, artinya pengguna karya wajib mencantumkan identitas penciptanya.

Lagu-lagu yang termasuk *public domain*, misalnya, musik klasik dari komponis besar seperti Beethoven, Mozart, sampai Bach atau lagu daerah seperti Rasa Sayange atau Ampar-Ampar Pisang yang penciptanya tidak diketahui atau masa perlindungan telah habis.

Ketiga, lagu untuk tujuan non-komersial. Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan penyebarluasan karya cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat nonkomersial, serta memberikan manfaat bagi pencipta atau pengguna, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Keempat, lagu yang dibebaskan oleh kreatornya. Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan karya melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila pencipta menyatakan tidak keberatan atas tindakan tersebut. Artinya, jika kreator secara terbuka memberikan izin, publik dapat memutar atau membagikan lagunya tanpa harus membayar royalti. (Kintan Nabila)

2. Peserta mengirimkan foto jawaban melalui pesan ke 0851-3704-5586

| KESELAMATAN PELAYARAN |

KEMELUT TRANSPORTASI LAUT

Sejumlah insiden kecelakaan kapal belakangan ini perlu perhatian serius dari pemangku kebijakan terkait untuk mengakselerasi transformasi transportasi laut, utamanya guna memastikan keselamatan pelayaran nasional. Langkah perbaikan perlu diupayakan lantaran peran moda angkutan ini dalam menggerakkan perekonomian antarpulau.

Anitana W. Puspa, Rahmad Fauzan, & Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa lebih dari 190 kecelakaan laut besar terjadi di Indonesia pada rentang 2015—2025 dengan lebih dari 787 korban jiwa.

Pola yang berulang dalam kasus-kasus ini mencakup kondisi kapal tua, kelebihan muatan, *manifest* yang tidak akurat, minimnya alat dan penerapan *standard operational procedure* (SOP) keselamatan, dan lemahnya pengawasan di titik keberangkatan.

Tak ayal, insiden kecelakaan moda transportasi laut yang dialami Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan Kapal Motor (KM) Barcelona 5 di perairan Sulawesi Utara pada Juli 2025 memicu desakan untuk dilakukannya perbaikan di berbagai aspek industri pelayaran Indonesia.

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas menyebutkan bahwa ada empat aspek yang perlu dibenahi secara sistemik demi keselamatan transportasi pelayaran di dalam negeri.

Pertama, peran dan kapasitas regulator. Dia menilai bahwa kompetensi pemahaman dan komitmen keselamatan pejabat dari tingkat menteri sampai dengan eselon pelaksana seperti direktur jenderal, direktur, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) perlu diaudit.

Selain itu, imbuhnya, regulator independen sektor penyeberangan perlu dibentuk untuk mencegah konflik kepentingan, terutama di lintasan yang didominasi badan usaha milik negara (BUMN).

Kedua, menciptakan iklim usaha yang sehat dan seimbang. Dia mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya seperti dengan moratorium izin kapal baru atau lintasan baru apabila kapasitas dermaga dan pasar belum memadai; penataan kembali *supply* dan *demand* yang meliputi jumlah kapal, trayek, jadwal operasi, dan kapasitas dermaga.

“Perbaikan tata kelola menjadi elemen penting dalam transformasi sistem transportasi nasional.



Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi operator yang berinvestasi pada keselamatan, serta menjamin operator tidak beroperasi rugi karena hari operasi minimal 9—15 hari/bulan akibat rebutan pasar yang tidak seimbang.

Ketiga, menyeimbangkan tarif dengan biaya operasional.

“Dalam hal ini pemerintah diminta segera menerapkan tarif yang sudah disepakati mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hingga kini tertahan,” katanya kepada *Bisnis*.

Pemerintah, imbuhnya, diharapkan membuat mekanisme penyesuaian tarif periodik berdasarkan kenaikan biaya komponen seperti bahan bakar minyak (BBM), upah, perawatan, dan asuransi.

“Skema subsidi silang dari lintasan komersial untuk membantu lintasan perintis menjaga keselamatan juga perlu diadakan,” ujarnya.

Keempat, perbaikan infrastruktur pelabuhan. Darmaningtyas mengatakan bahwa banyak dermaga tidak layak, seperti dermaga *landing craft mechanized* (LCM) yang hanya berupa *plengsengan* beton tanpa *moving bridge*, sehingga saat pemuatan kapal haluan duduk, membuat garis muat (*plimsol mark*) tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Belum lagi, sambungnya, banyak pelabuhan tanpa kolam pelabuhan dan pemecah gelombang (*breakwater*), sehingga sangat rentan terhadap arus dan ombak, terutama saat kondisi cuaca buruk.

Untuk itu, Dharmaningtyas

menilai bahwa kelayakan seluruh pelabuhan penyeberangan dan prioritas pembangunan/renovasi memerlukan audit nasional.

Sementara itu, peneliti Transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Djoko Setijowarno memandang pentingnya alokasi anggaran untuk keselamatan pelayaran agar peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali tak terulang kembali.

“Kita seperti tidak pernah mau belajar dari setiap kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan di perairan. Alasan mendasar dan gampang dilontarkan ke masyarakat adalah cuaca buruk, daftar *manifest*, tata cara pemuatan, dan lemahnya pengawasan terhadap keselamatan manajemen pelayaran. Alih-alih na-

khoda, pemilik kapal dan staf bawah yang harus bertanggung jawab,” jelasnya kepada *Bisnis*.

Sebelumnya, Ketua Umum MTI Tory Damantoro juga menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga sistem keselamatan.

“Keselamatan adalah sebuah sistem yang baru akan berhasil jika semua komponen perhubungan laut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.

MTI mengidentifikasi beberapa akar masalah utama, termasuk fragmentasi pengawasan antarlembaga (Kemenhub, Syahbandar, operator, pemerintah daerah), ketiadaan inspeksi berbasis risiko untuk kapal penumpang, tidak berfungsinya sistem *manifest* dan komunikasi darurat secara optimal, serta minimnya

penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan.

Menanggapi kondisi ini, MTI mendesak sejumlah langkah prioritas. *Pertama*, audit teknis menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penumpang, terutama kapal tua.

Kedua, digitalisasi *manifest* dan pelacakan kapal secara *real time*. *Ketiga*, peningkatan kapasitas dan sertifikasi awak kapal. *Keempat*, penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran keselamatan.

Kelima, reformasi tarif dan subsidi agar operator mampu memenuhi standar keselamatan tanpa mengorbankan layanan publik. *Keenam*, kepastian kelayakan sarana untuk berlayar. *Ketujuh*, pembentukan sistem penguatan dan pemeliharaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), mengingat banyak regulasi yang belum dilaksanakan.

AKSI PERBAIKAN

Di sisi lain, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Masyhud mengklaim bahwa saat ini sektor transportasi laut nasional berada dalam kondisi stabil dan terus menunjukkan perbaikan.

Perbaikan ini, imbuhnya, terutama terasa dalam mendukung distribusi logistik dan perdagangan antarwilayah, sejalan dengan upaya Kemenhub dalam hal meningkatkan keselamatan pelayaran.

Dia menegaskan bahwa peningkatan keselamatan menjadi prioritas mutlak. Pihaknya mengkampanyekan *Zero Tolerance for Safety* dengan menargetkan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran standar keselamatan pelayaran, baik untuk kapal maupun awak. “Perbaikan tata kelola men-

jadi elemen penting dalam transformasi sistem transportasi nasional, termasuk sektor laut. Langkah yang ditempuh meliputi penguatan regulasi keselamatan, pengawasan teknis kapal dan awak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem perizinan dan pelaporan,” ujarnya, Sabtu (9/8).

Kemenhub menegaskan bahwa kecelakaan kapal laut tidak semata disebabkan oleh usia kapal. Faktor cuaca ekstrem, kelaian manusia, pelanggaran prosedur, dan kondisi teknis kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan menjadi penyebab dominan.

“Untuk itu, Ditjen Hubla [Direktorat Jenderal Perhubungan Laut] secara rutin melakukan uji kelaiklautan, pembinaan operator, serta penegakan hukum terhadap kapal yang tidak laik laut atau tidak memiliki sertifikat sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kendati demikian, meski menunjukkan perbaikan, sektor ini masih menghadapi tantangan, antara lain tingginya biaya logistik, keterbatasan pembiayaan infrastruktur, kurangnya integrasi sistem digital, kualitas SDM yang belum merata, koordinasi lintas sektor, dan disparitas muatan antarwilayah.

Guna mengatasinya, Kemenhub terus mendorong kerja sama lintas sektor, melibatkan pelaku industri pelayaran, operator pelabuhan, dan masyarakat untuk taat regulasi, mendukung transformasi digital, meningkatkan SDM, dan memperkuat pengawasan keselamatan.

“Pemerintah juga memperluas konektivitas maritim melalui program Tol Laut dan angkutan perintis yang memprioritaskan wilayah 3TP [tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan],” katanya. ■

| PLT KETUA SUBKOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PELAYARAN KNKT ANGGIAT PTP PANDIANGAN |

Dominasi Aspek Pengawasan untuk Keselamatan Pelayaran

Bisnis, JAKARTA — Dalam 10 tahun terakhir, kecelakaan kapal yang ditangani oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memang berangsur menurun sejak level tertingginya pada 2018.

Akan tetapi, sejumlah kejadian kecelakaan kapal yang terus berulang mengindikasikan perlunya aksi perbaikan sistem transportasi ini. Bisnis berkesempatan mewawancarai Plt. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan. Berikut petikannya.

Bagaimana kondisi transportasi laut nasional saat ini?

Sampai saat ini kami masih mencatat beberapa kejadian yang sama terulang, seperti kecelakaan kapal penyeberangan dan kapal penumpang dengan kondisi yang hampir sama.

Di sisi yang lain, memang pemerintah telah melakukan beberapa perubahan aturan keselamatan seperti misalnya pengawasan kapal penyeberangan sungai dan danau yang awalnya dilaksanakan oleh Ditjen Hubdat [Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat], sekarang diserahkan kembali ke Ditjen Hubla [Direktorat Jenderal Perhubungan Laut].

KNKT akan terus mendukung perubahan yang dilakukan dalam upaya mencegah kecelakaan yang sama terulang kembali.



Bagaimana perkembangan kecelakaan laut dari hasil KNKT?

Terjadinya kecelakaan yang berulang menunjukkan kelemahan atau temuan yang disampaikan KNKT dari suatu kasus masih belum diperbaiki seperti misalnya masalah perbedaan jumlah penumpang antara *manifest* dengan jumlah riil di atas kapal yang di beberapa pelabuhan memang memiliki keterbatasan fasilitas, tetapi di tempat lain didapat adanya kelemahan sistem.

Masalah kebakaran kapal roro [roll on/

roll off] di mana KNKT menemukan kelemahan pengawasan muatan berbahaya yang sampai hari ini masih mengandalkan laporan dari pemilik muatan atau supir dan belum tersedia sistem pemeriksaan seperti kargo di bandara untuk mendeteksi adanya muatan B3 [muatan berbahaya].

Dari temuan KNKT, apa penyebab utama kecelakaan transportasi laut nasional?

Jika bicara temuan banyak dan bisa berbeda-beda meski jenis kecelakaannya sama misalnya dari tindakan awak kapal atau pun ketersediaan kontrol risiko.

Namun, jika dilihat dari rekomendasi keselamatan yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan maka aspek pengawasan adalah yang paling dominan, lalu disusul dari aspek ketersediaan aturan atau prosedur.

Rekomendasi apa yang disiapkan KNKT untuk layanan transportasi yang lebih baik?

Kecelakaan adalah pembelajaran terbaik untuk kita bisa melihat kelemahan yang kita miliki. Hasil investigasi KNKT yang di dalamnya memaparkan secara lengkap fakta di lapangan dan temuan investigasi dapat menjadi rujukan perbaikan sistem transportasi yang lebih baik.

Seberapa penting peran utama kapal untuk menjamin keselamatan transportasi?

Selama kapal dirawat dengan baik, diperiksa dengan benar oleh orang yang benar, artinya semua aspek yang diatur atau ditentukan dalam peraturan yang ada dipenuhi, maka kapal dapat tetap laik meskipun usia kapal sudah tua.

PERSAINGAN SENGIT ANTARPEMAIN

Penyetaraan arena bermain antarpelaku layanan transportasi laut dipandang dapat menjadi salah satu opsi perbaikan operasional bagi pengguna moda angkutan ini, terutama di dermaga-dermaga utama nasional. Harapannya, lewat aksi ini dapat membuka persaingan yang lebih sehat sehingga daya saing operator dapat ditingkatkan.

Anitana W. Puspa & Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

Hal ini tak terlepas dari sektor angkutan penyeberangan yang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam meningkatkan layanan transportasi laut nasional. Mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga ketimpangan persaingan dengan pemain Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mencontohkan misalnya, kapasitas dermaga yang tidak sebanding dengan jumlah kapal menjadi persoalan utama. “Kapal yang diizinkan beroperasi jumlahnya terlalu banyak, sementara dermaga terbatas. Alhasil, kapal di lintasan padat sekalipun hanya beroperasi 9—15 hari per bulan,” ujarnya, Sabtu (9/8).

Selain itu, imbuhnya, regulasi tarif yang ketat membuat pelaku usaha tidak leluasa menyesuaikan harga sesuai musim dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Kebijakan peremajaan armada pun dinilai terlambat, minim insentif fiskal, dan akses pembiayaan yang sulit.

Dia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mengakibatkan sekitar 35%—40% dari 450 kapal baja berklas Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI yang dioperasikan anggota Gapasdap sudah berusia di atas 25 tahun dan mendesak untuk diganti.

Selain itu, Khoiri menegaskan, persaingan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum berjalan setara. Menurutnya, perusahaan pelat merah memperoleh kapal dari APBN, mengelola pelabuhan sekaligus mengoperasikan kapal, dan menjadi pengelola sistem tiket terpadu yang wajib digunakan semua operator.

“Di pelabuhan utama seperti Merak—Bakauheni, dermaga strategis dikuasai penuh BUMN, sehingga operator swasta tak punya kesempatan bersaing setara,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mendorong efisiensi dengan penataan jadwal, digitalisasi tiket, dan *manifest*, serta kerja sama antaroperator.

Khoiri menjelaskan bahwa pelaku usaha swasta juga telah melakukan sejumlah langkah



untuk peremajaan kapal, dengan memesan kapal baru dari galangan dalam maupun luar negeri serta pembelian kapal bekas laik laut dari luar negeri. Namun, imbuhnya, keterbatasan dana membuat realisasi berjalan lambat.

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan skema penjaminan kredit, insentif pajak, dan pembiayaan bunga rendah khusus untuk peremajaan kapal, mengacu pada masa Orde Baru ketika pemerintah mendukung pembiayaan melalui PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan transportasi laut nasional melalui percepatan peremajaan armada dan penguatan infrastruktur pendukung.

Corporate Secretary ASDP Shelly Arifin mengungkapkan bahwa tantangan utama sektor transportasi laut berkuat pada keterbatasan armada kapal modern, tingginya biaya operasional, infrastruktur pelabuhan yang belum merata di wilayah timur, serta kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pelayaran yang terampil.

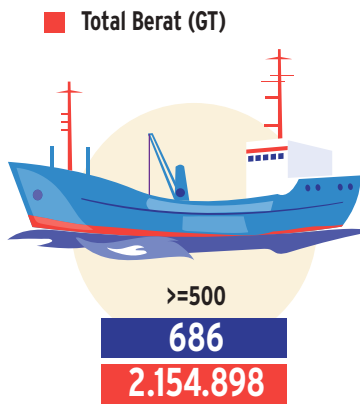
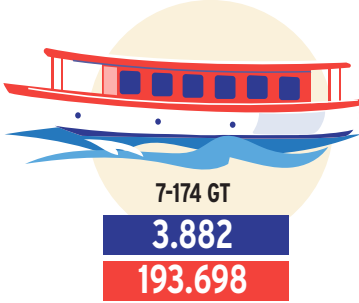
“Selain itu, proses perizinan yang masih perlu disederhanakan dan akses pembiayaan untuk investasi kapal baru juga menjadi perhatian penting,” ujarnya, Jumat (8/8).

Guna menjawab tantangan tersebut, pelaku usaha termasuk ASDP terus memperkuat kolaborasi dengan regulator, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Upaya yang dilakukan antara lain melalui digitalisasi layanan, integrasi sistem pelabuhan, optimalisasi operasional berbasis data, dan mendorong dukungan kebijakan dari pemerintah.

ASDP juga mengusulkan insentif fiskal seperti keringanan bea masuk dan pajak pembelian kapal baru, serta skema pembiayaan yang lebih kompetitif guna mempercepat proses peremajaan kapal nasional.

Shelly menyebutkan bahwa peremajaan armada merupakan

Jumlah Kapal Penumpang di Indonesia (per 2024)



Jumlah kapal penumpang dengan bobot kecil mendominasi per akhir 2024.

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub
BISNIS/SINTA NOVIAZH



bagian penting dari transformasi layanan. Pihaknya juga telah melakukan audit teknis dan pemetaan usia kapal secara berkala untuk menentukan prioritas pembaruan. Kapal baru didesain lebih efisien, hemat energi, ramah lingkungan, dan memenuhi standar keselamatan terkini.

Saat ini, ASDP mengoperasikan lebih dari 200 kapal di lebih dari 300 lintasan penyeberangan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekitar 30% armada atau 60—70 unit kapal berusia di atas 25 tahun, sehingga masuk dalam prioritas peremajaan.

Meski demikian, Shelly menegaskan seluruh kapal tetap laik laut dan tersertifikasi.

“Dalam lima tahun ke depan, kebutuhan peremajaan diperkirakan mencapai sekitar 40 unit kapal, mencakup penggantian kapal yang sudah mendekati batas usia optimal serta penambahan armada baru untuk melayani lintasan padat,” jelasnya.

LEMBAGA BARU

Di sisi, peneliti transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Djoko Setijowarno menekankan urgensi pemerintah membentuk kelembagaan tersendiri untuk transportasi

sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasalnya, Indonesia memiliki memiliki 357 lintas angkutan penyeberangan, dengan 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis yang dilayani oleh 427 kapal.

Negara ini juga punya sekitar 70.000 aliran sungai besar dan kecil. Adapun, danau dengan berbagai tipologi jumlahnya 840 danau dan sebagian besar terbentuk secara alami, dengan luas total seluruh danau mencapai 7.103 kilometer persegi (km2), serta memiliki 735 situ (danau kecil) dengan total luas sekitar 5.000 km2.

“Supaya lebih fokus dan anggaran tersendiri mengurus transportasi sungai, danau dan penyeberangan, maka diperlukan direktorat jenderal tersendiri. Contoh nyata, angkutan sungai sekarang terabaikan, lantaran minim anggaran. Padahal angkutan sungai bisa digunakan untuk limpahan logistik yang selalu terfokus di jalan raya,” jelasnya kepada *Bisnis*.

Djoko prihatin melihat pemanfaatan aliran sungai untuk mengangkut logistik di Kalimantan makin minim, setelah terhubung Trans Kalimantan. Beberapa aliran sungai di Sumatera, seperti Sungai Musi dan Sungai Batanghari pun sama nasibnya.

“Di sisi lain, yang dilirik untuk menguntungkan, sementara angkutan penyeberangan yang menghubungkan pulau-pulau kecil tidak atau kurang diperhatikan, misalnya kasus akses ke Pulau Enggano. Masih ada juga Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil tersebar cukup banyak, namun minim angkutan penyeberangan,” jelasnya.

Terlebih, jika dibebankan pemerintah kabupaten, pasti tidak cukup fiskal untuk mengoperasikan angkutan penyeberangan di sejumlah pulau-pulau kecil di wilayahnya.

Kesuksesan pembenahan di angkutan Danau Toba bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di lokasi yang lain.

“Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara daratan atau kontinental, sehingga perhatian terhadap angkutan perairan menjadi sangat penting untuk mobilitas orang dan barang,” jelasnya. ■



Operator swasta tak punya kesempatan bersaing setara.

Urgensi Peremajaan Kapal Penumpang ‘Sepuh’

Bisnis JAKARTA — Konektivitas antarpulau menjadi hal mutlak yang perlu diperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan guna memperlancar arus barang dan orang untuk menjaga denyut perekonomian antarwilayah.

Akan tetapi, pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa transportasi perlu dioptimasi menyusul kapal yang telah tua. Bisnis berkesempatan mewawancarai Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero) Evan Eryanto. Berikut petikannya.

Tantangan apa yang dihadapi pebisnis untuk meningkatkan layanan transportasi laut nasional?

Saat ini, tantangan nyata untuk meningkatkan layanan angkutan laut adalah kesenjangan fasilitas dan infrastruktur di masing-masing wilayah. Di samping itu, akses menuju pelabuhan dan opsi transportasi umum yang terbatas menuju pelabuhan, seakan pengguna angkutan laut semakin menjadi kelompok yang terpinggirkan,

padahal angkutan laut merupakan alat transportasi tertua dari alat transportasi lain.

Apa upaya pebisnis untuk menyelesaikan tantangan ini?

Dalam hal pelayanan penumpang kapal PELNI, kami terus berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* di pelabuhan, khususnya Pelindo [PT Pelabuhan Indonesia (Persero)] dan KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan].

Beberapa hal utama yang selalu kami tekankan antara lain sterili-

sasi area pelabuhan atau jalur masuk menuju dermaga sehingga meminimalisir pedagang asongan yang naik ke atas kapal melalui jalur masuk ilegal; fasilitas x-ray yang seharusnya menjadi fasilitas wajib yang disediakan pengelola terminal penumpang, sehingga tidak lagi ditemukan barang ilegal yang lolos naik ke atas kapal; dan perbaikan akses dan opsi transportasi menuju pelabuhan.

Bagaimana langkah pebisnis terkait peremajaan kapal?

PELNI sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan perawatan dan peremajaan kapal. Namun untuk kapal-kapal dengan usia teknis di atas 30 tahun, per-



emajaan, peremajaan hanya menjadi solusi sementara, sementara kenyamanan dan keselamatan penumpang menjadi taruhannya.

Mengingat PELNI tidak dalam kemampuan finansial untuk melakukan pembelian kapal baru, alhamdulillah Pemerintah sudah memberikan dana Penyertaan Modal Negara [PMN]

sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal penumpang baru.

Berapa kapal yang dimiliki saat ini dan berapa yang sudah tua dan butuh diganti baru?

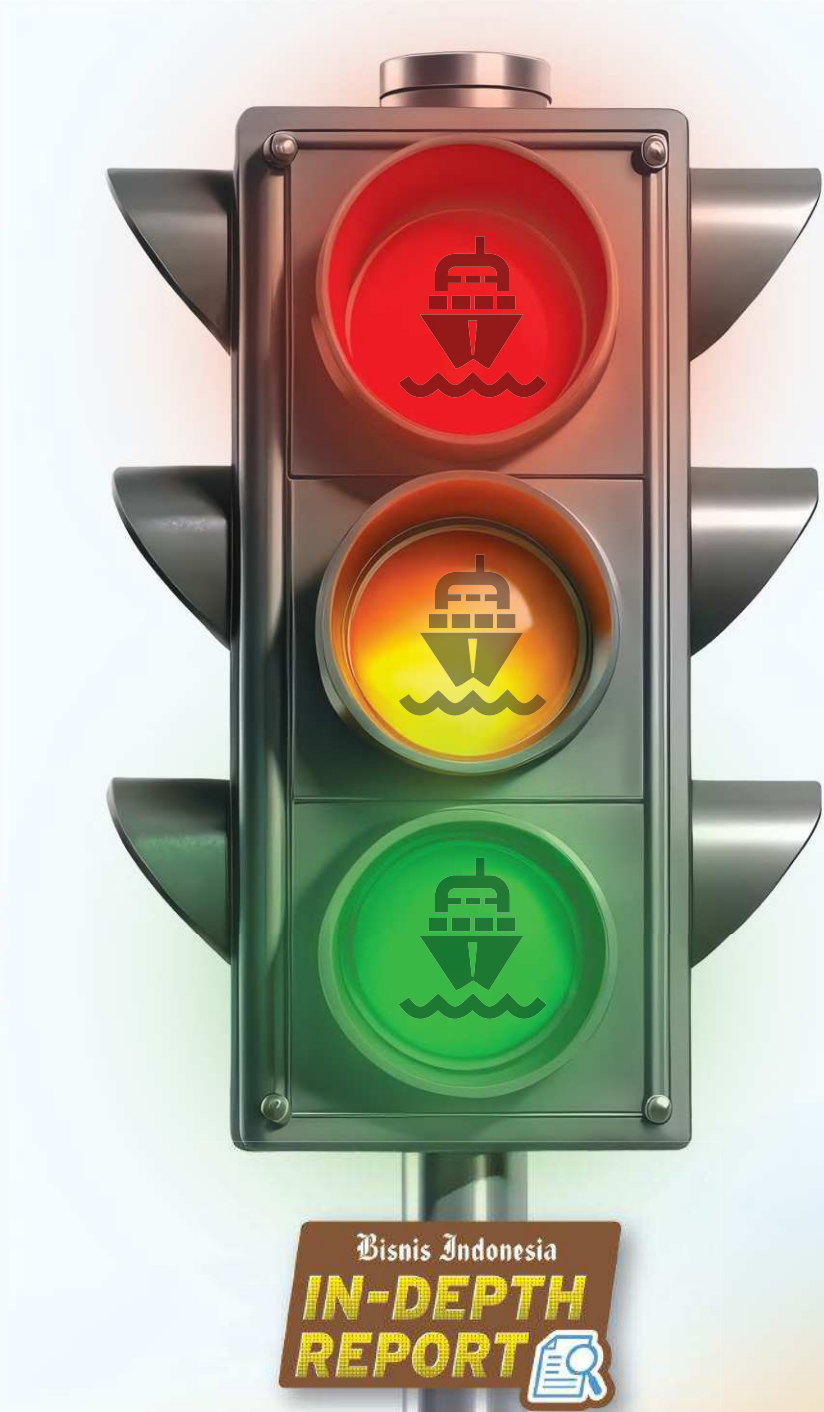
Jika mengacu pada batasan usia teknis kapal di Eropa yang maksimal 25 tahun, dan hampir seluruh kapal PELNI merupakan buatan

Jerman, kami memiliki 23 [unit] kapal berusia di atas 25 tahun dari total 26 kapal penumpang yang kami punya.

Untuk PMN yang sudah kami terima, kami prioritaskan untuk mengganti tiga kapal penumpang yang sudah berusia 40 tahun, yaitu KM [kapal motor] Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit.

Bagaimana pandangan perseroan terkait sentralitas transportasi laut dalam mendukung PDRB nasional?

Aktivitas bisnis dan operasional yang dilakukan PELNI selama 73 tahun terakhir tidak hanya berkontribusi dalam pergerakan masyarakat antarpulau, namun juga mendukung perputaran perekonomian, pendidikan hingga kesehatan masyarakat kepulauan, termasuk arus logistik.



REFORMASI TATA KELOLA PELAYARAN

Redaksi
redaksi@bisnis.com

Meski mencatatkan penurunan, kejadian berulang kecelakaan kapal tak boleh dipandang sebelah mata. Perbaikan tata kelola industri pelayaran nasional mesti segera dilakukan dan diakselerasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Hal ini tak terlepas dari peran besar sektor pelayaran nasional sebagai urat nadi kelancaran arus barang dan orang di berbagai wilayah di Indonesia yang notabene adalah negara

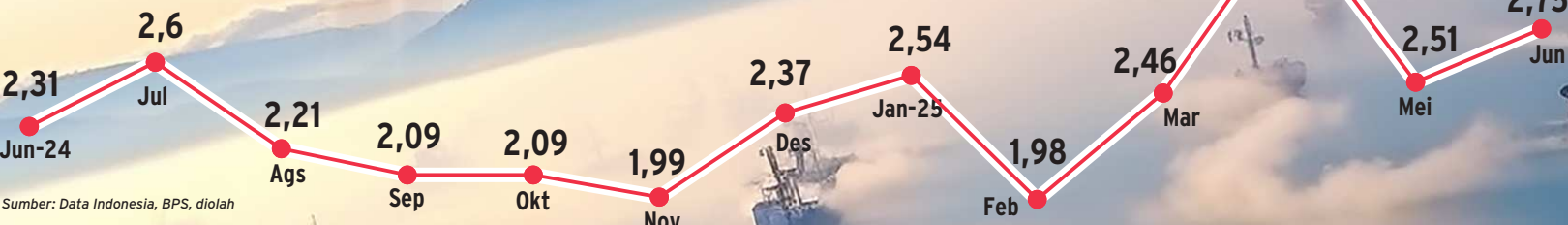
kepulauan. Bisnis industri pelayaran nasional yang makin solid bakal memainkan perannya sebagai penggerak produk domestik regional bruto (PDRB) yang pada akhirnya akan mengerek produk domestik bruto (PDB) nasional.

Oleh sebab itu, sejumlah tantangan yang masih menghambat sektor ini perlu untuk segera dituntaskan. Revitalisasi pelabuhan mendesak untuk dilakukan. Aksi percepatan peremajaan kapal mutlak untuk dilaksanakan demi memenuhi aspek keselamatan. Penguatan tata kelola dan sumber daya

manusia (SDM) juga menjadi barang wajib untuk mengungkit daya saing sektor ini.

Sektor perbankan dan finansial juga diharapkan mampu memberikan keterlibatan penuh dalam aksi 'penyelamatan' industri pelayaran. Tak hanya dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, melainkan juga dalam injeksi permodalan untuk peremajaan kapal yang sudah 'sepuh' sehingga masyarakat mampu memanfaatkan secara optimal dengan hadirnya transportasi angkutan laut yang lebih memadai.

Jumlah Penumpang Kapal Laut Domestik (Juta Orang)



Rekapitulasi Kapal Indonesia (hingga akhir 2024)

Kapal laut

45.768
UNIT
Bobot (juta GT)
48,57

Kapal Penangkap Ikan

52.193
UNIT
Bobot (juta GT)
2,56

Kapal Penumpang

5.103
UNIT
Bobot (juta GT)
2,5

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub

Kecelakaan Pelayaran di Indonesia

Tahun	Tenggelam	Terbakar	Ledakan	Tubrukan	Kandas	Terbalik	Lain-lain	Total
2015	2	4	0	2	2	1	0	11
2016	6	4	0	3	3	0	2	18
2017	6	14	0	6	6	0	2	34
2018	10	12	0	3	7	0	7	39
2019	6	6	0	9	0	0	4	25
2020	3	2	0	2	4	0	1	12
2021	5	5	1	4	2	0	2	19
2022	5	5	0	1	2	0	0	13
2023	1	5	0	0	0	0	0	6
2024	1	4	0	0	0	0	0	5

Sumber: Data Indonesia, KNKT, diolah

Bongkar/Muat Barang Angkutan Laut Antarpulau di Lima Pelabuhan Utama (juta ton)

Tahun	Bongkar	Muat
2021	36,38	30,76
2022	46,13	35,36
2023	49,63	37,21
2024	50,31	38,59
2025*	21,88	15,29

*KET: hingga Mei
Sumber: BPS, diolah

Save & Share



| EMITEN PELAYARAN |

ARUS TENANG DI LANTAI BURSA

Meski likuiditas yang relatif rendah, pergerakan harga saham sektor transportasi laut di Bursa Efek Indonesia secara fundamental dinilai cukup stabil. Bahkan, sejumlah sentimen positif juga diproyeksi mampu mengungkit performa saham di sektor ini pada paruh kedua tahun ini.

Anitana W. Puspa & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang bahwa tantangan terkait dampak gangguan rantai pasok atau *supply chain disruption effect* dinilai masih dapat dikelola lantaran ada langkah-langkah mitigasi risiko yang bisa diterapkan.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian saat ini yang relatif stabil memungkinkan sektor transportasi laut dapat berperan sebagai tulang punggung (*backbone*) dalam distribusi barang-barang yang memerlukan jasa pengiriman, khususnya ke pelosok Tanah Air.

Hal ini, imbuhnya, dipandang penting lantaran pasar domestik Indonesia yang kuat. Menurutnya, dengan pasar domestik yang solid, maka keperluan terhadap layanan transportasi laut untuk mendistribusikan barang dan jasa tetap tinggi.

Dia menjelaskan bahwa dari sisi komoditas, ketika harga berada di atas *lower base* atau keluar dari pola *lower low*, maka aktivitas pengiriman (*shipment*) menjadi sangat penting untuk menunjang pergerakan berbagai komoditas esensial.

“Baik untuk kebutuhan domestik seperti bahan baku industri dan energi, maupun untuk ekspor ke luar negeri. Selama perdagangan tetap berjalan, peran transportasi laut akan terus menjadi krusial,” kata kepada *Bisnis*.

Tak ayal, Head Riset Kiwom Sekuritas Liza Camelia Suryanata juga memproyeksikan bahwa sejumlah emiten pelayaran seperti PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR), PT Temas Tbk. (TMAS), PT Wintemar Offshore Marine Tbk. (WINS), dan PT Pancaran Samudera Transport



Tbk. (PSAT) bakal memiliki performa positif pada semester II/2025 berkat pemulihan perdagangan global, stabilitas geopolitik, dan peningkatan utilisasi armada.

“Sentimen positif untuk sektor pelayaran adalah pemulihan rantai pasok global, meredanya tensi geopolitik, diversifikasi rute, ekspansi armada, dan potensi kenaikan tarif sewa kapal 10%—15%,” katanya, Selasa (12/8).

Akan tetapi, dia juga melihat bahwa ada sejumlah sentimen negatif pada sektor ini yang perlu diwaspadai seperti volatilitas harga komoditas, *on-off* tarif Trump, fluktuasi kurs, serta risiko perlambatan ekonomi global.

Hanya saja, lembaga riset pasar modal PT Infovesta Utama melihat ada masa depan cerah di sektor pelayaran, terutama terkait sektor logistik.

“Salah satu emiten pelayaran yang kami analisis, ada sentimen positif karena ternyata sektor logistik laut sedang diuntungkan dengan geliat sektor otomotif, terutama tren masuknya mobil listrik di Indonesia,” jelas Vice President Infovesta Wawan Hendrayana kepada *Bisnis*.

Oleh karena itu, dia menggarisbawahi tidak semua kinerja emiten pelayaran akan kompak meningkat, tergantung jenis bisnisnya, fundamentalnya, serta prospek bisnis ke depan.

“Selain itu, kalau untuk kinerja sahamnya, tidak kalah penting soal likuiditas. Karena kebanyakan masih kurang likuid, ya.

Jadi mungkin baru akan mencolok ketika investor institusi sudah melirik,” katanya

MOMENTUM

Ketidakpastian kondisi geopolitik justru dipadang oleh pelaku bisnis kapal pendukung lepas pantai (*offshore support vessel/OSV*) WINS sebagai momentum bagi armada berbendera Merah Putih untuk unjuk gigi.

“Ketidakpastian geopolitik justru memunculkan sentimen nasionalisme, sehingga berapa negara memutuskan lebih gencar mencari sumber energi sendiri, dan akhirnya mendorong aktivitas eksplorasi minyak dan gas [migas], termasuk di lepas pantai,” kata Investor Relations WINS Pek Swan Layanto kepada *Bisnis*, Senin (11/8).

Oleh karena itu, WINS pun menyambut sentimen positif tersebut dengan mempercepat realisasi gelontoran belanja modal dalam rangka ekspansi dan investasi kapal tambahan.

Kendati di sisi lain, sejumlah emiten pelayaran juga telah mengidentifikasi tantangan bahwa masih ada tantangan yang menghambat performa sektor ini pada paruh kedua tahun ini.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya 3 tantangan yang dihadapi oleh emiten pelayaran.

Pertama, infrastruktur jauh tertinggal dengan kualitas di bawah negara-negara tetangga. *Kedua*, masih sering ada kesimpangsiuran alias ketidakpastian aturan di Indonesia.

Ketiga, kebijakan bea cukai dan perpajakan tidak cukup bersaing dibandingkan negara tetangga. *Keempat*, *enforcement* peraturan keselamatan dan ketidak-samaan

level playing field di antara para operator nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, imbuhnya, layanan transportasi laut di Tanah Air mestinya tidak bergantung kepada satu pasar domestik saja. Selain itu, dia mengatakan bahwa pemain harus mencoba berperan serta membangun infrastruktur yang bersaing secara kualitas dan produktivitas.

“Termasuk, memberikan saran-saran dan masukan kepada pemerintah dan regulator,” kata Bani kepada *Bisnis*.

Pemain ekspedisi peti kemas, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) juga menekankan bahwa pemerintah perlu fokus mengatasi tantangan domestik, demi merealisasikan visi Indonesia sebagai negara maritim yang diperhitungkan dunia.

“Geopolitik memang memberikan dampak, namun tantangan lebih signifikan justru berasal dari dalam. Misal, ketimpangan infrastruktur pelabuhan, ketidakseimbangan volume muatan antarwilayah, keterbatasan integrasi digital di pelabuhan sekunder, serta ketersediaan SDM terampil sektor kemaritiman,” kata Commercial General Manager SPI Jimmy Liesensia kepada *Bisnis*, Jumat (8/8).

Setidaknya, imbuhnya, harus mulai ada komitmen untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia, baik dari barat dan khususnya di wilayah timur Indonesia.

Mulai dari kesiapan dan kecukupan dermaga, keda-

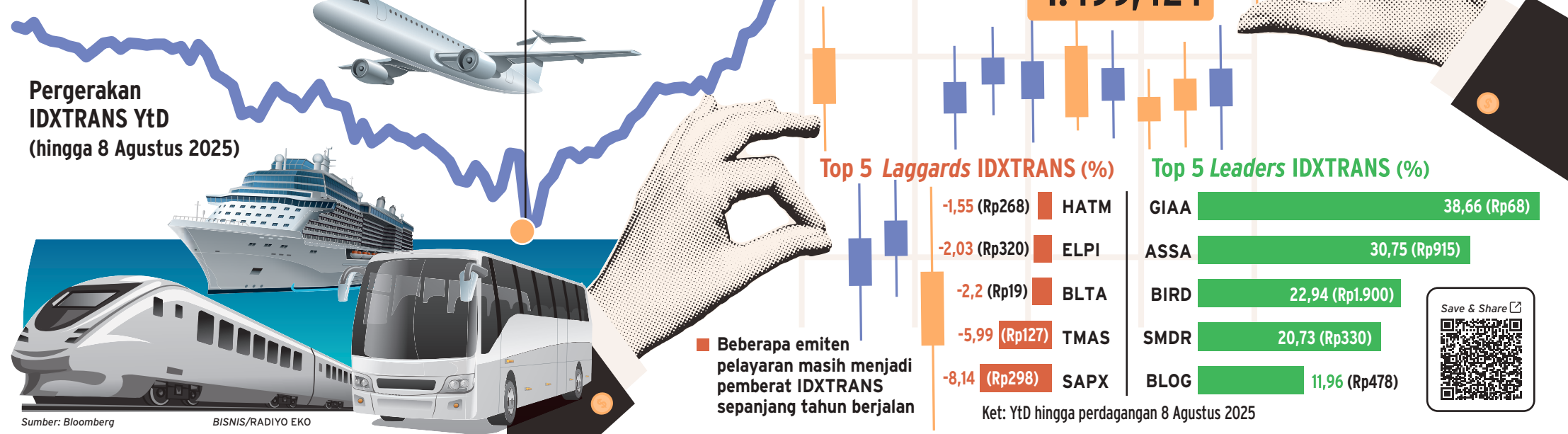
“Geopolitik memang memberikan dampak, namun tantangan lebih signifikan justru berasal dari dalam.

laman alur pelayaran, hingga kapasitas kolam pelabuhan. Modernisasi suprastruktur seperti ketersediaan alat berat, peralatan bongkar muat, dan sistem penanganan peti kemas pun belum merata di banyak pelabuhan, terutama di wilayah timur Indonesia.

“Kondisi ini menyebabkan proses *stevedoring* memerlukan waktu lebih lama, yang pada akhirnya memicu peningkatan ongkos logistik. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat dampaknya terhadap efisiensi distribusi barang dan daya saing nasional,” jelasnya.

Dia berharap bahwa pemerintah dapat semakin memberikan prioritas pada pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah sekunder dan tersier, khususnya dalam penyediaan fasilitas operasional yang memadai.

Selain itu, dia memandang bahwa pengembangan pelabuhan di daerah memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar perencanaan, pendanaan, dan implementasi proyek dapat berjalan selaras. (Aziz Rahardyan)



| KETUA UMUM INSA CARMELITA HARTOTO |

Opsi Pendanaan Alternatif Pembaruan Armada Nasional

Bisnis, JAKARTA — Sektor pelayaran memainkan peran yang amat sentral untuk menjaga kelancaran arus barang dan orang antarpulau. Tak ayal, sektor ini juga menjadi ‘tulang punggung’ produk domestik regional bruto.

Akan tetapi, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan guna meningkatkan perannya. Bisnis berkesempatan mewawancarai Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto. Berikut petikannya.

Tantangan apa yang dihadapi pebisnis untuk meningkatkan layanan transportasi laut nasional?

Berbicara tentang peningkatan layanan dalam jasa transportasi nasional, maka tentunya sebagai tulang punggung distribusi logistik nasional, transportasi laut harus *comply* dengan regulasi nasional maupun internasional, mengadaptasi perkembangan teknologi digitalisasi, modernisasi sarana dan prasarana, peremajaan kapal, dan meningkatkan

kapasitas sesuai permintaan. [Hal ini] karena paradigma yang dipakai adalah *ship follow the trade*.

Akan tetapi, industri ini menghadapi tantangan yg cukup berat dalam pendanaan. Investasi di sektor transportasi laut berisiko tinggi, *high cost but slow yielding*, sehingga kurang diminati oleh perbankan nasional.

Untuk meminimalisir risiko, maka suku bunga pinjaman yang diberikan masih dua digit, dan *loan tenure*-nya pun yang pendek.

Apa upaya pebisnis untuk menyelesaikan tantangan ini?

Masing-masing pelaku usaha tentu punya strategi masing-masing dalam menghadapi tantangan pendanaan ini. Ada yang menjadi perusahaan emiten, ada yang berusaha mencari pendanaan dari perbankan internasional, dan lain sebagainya.

Bagaimana langkah pebisnis terkait peremajaan kapal?

Walaupun sulit dalam kondisi seperti saat ini, tentunya kami berusaha mengupayakan kapal selalu *comply* dengan regulasi, dan tetap menempatkan *safety* sebagai *priority*.

Walaupun dengan biaya yang cukup berat, untuk memperpanjang usia teknis kapal. Hal tersebut tercermin dalam rata-rata usia kapal nasional kita relatif tua.

Walaupun umur kapal tidak menentukan kelaik-



lautan, tetapi biaya perawatan menjadi tidak ekonomis bagi kapal tua, tetapi memang tentu peremajaan kapal ini sangat berkaitan dengan dukungan pendanaan dan kebijakan yang bisa memberikan pendanaan dengan bunga satu digit, *tenure* yang panjang dan aturan lain yang ramah terhadap pendanaan pelayaran dalam peremajaan kapal.

Bagaimana dukungan pendanaan baik dari internal maupun perbankan terkait aksi ini?

Ini merupakan masalah klasik. Dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17/2008 yang sudah direvisi dalam Undang-Undang No. 66/2024, sudah mengamanahkan dukungan pendanaan industri pelayaran.

Akan tetapi, sebagaimana sudah disampaikan pada poin pertama; kita masih dikenakan bunga bank dua digit dan tenor pinjaman yang hanya 3—5 tahun saja. Kita ingin mendorong agar perusahaan pelayaran bisa dapatkan kebijakan pendanaan yang lebih ramah.

Untuk itu, kami mendorong agar kapal ini bisa dimasukkan dalam kategori infrastruktur yang menjembatani Nusantara sehingga pembiayaannya bisa lebih kompetitif.

Bagaimana pandangan anda terkait sentralitas transportasi laut dalam mendukung PDRB nasional?

Sektor maritim kita sejauh ini menyumbang 7% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Adapun pelayaran sendiri mungkin tidak sebesar itu, tapi *multiplier effect* yang dihasilkan dari industri pelayaran sangat besar.

[Hal ini] karena pelayaran merupakan motor terhadap banyak industri terkait lainnya, seperti galangan, sekolah [sumber daya manusia] SDM pelaut, kepelabuhanan, perdagangan, asuransi dan lainnya. Terlebih, sektor transportasi laut merupakan tulang punggung kegiatan logistik kita, yang mana negara ini terdiri dari belasan ribu pulau ya.

Pewawancara: Rahmad Fauzan

| DANA INVESTASI |

STRATEGI DAPEN KELOLA VOLATILITAS

Bisnis, JAKARTA — Strategi konservatif menjadi pilihan industri dana pensiun (dapen) dalam menghadapi volatilitas di pasar modal. Hingga Juni 2025, penempatan investasi di saham cenderung menurun, sedangkan penempatan di instrumen risiko rendah tetap bertumbuh.

Annisa Nurul Amara
redaksi@bisnis.com

Melansir data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penempatan investasi di saham turun 11,11 % secara *year-on-year* (YoY), dan secara bulanan (*month-to-month*) turun 6,71 %, menjadi sebesar Rp22,67 triliun per Juni 2025.

Adapun, pada Juni 2024 penempatan investasi di saham mencapai Rp25,50 triliun, dan Mei 2025 sebesar Rp24,30 triliun. Sementara itu, penempatan investasi di instrumen berisiko rendah terus bertumbuh.

Misalnya saja deposito *on call* tumbuh 54,27% YoY menjadi Rp4,05 triliun, deposito berjangka mencapai Rp99,03 triliun atau tumbuh 14,86% YoY untuk periode yang sama.

Kemudian, penembatan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tumbuh 78,44% YoY menjadi Rp10,90 triliun, dan SBN tumbuh 2,95% YoY menjadi Rp137,55 triliun.

Adapun, dari segi hasil investasinya, pendapatan dari bunga dan dividen masih konsisten. Per Juni 2025, bunga/bagi hasil tumbuh 2,66% YoY menjadi Rp10,60 triliun. Sementara itu, hasil dari dividen mencapai Rp1,68 triliun atau tumbuh 5,65% YoY.

Di sisi lain, laba pelepasan investasi yang biasa menjadi acuan *capital gain* saham, mengalami koreksi 22,24% YoY menjadi Rp631,06 miliar.

Merespons hal itu, Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan bahwa secara umum perubahan penempatan investasi mencerminkan upaya menyesuaikan portofolio terhadap kondisi pasar yang masih dinamis.

“Penurunan alokasi di saham dan peningkatan pada instrumen berisiko rendah, seperti deposito dan SBN menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat stabilitas portofolio dan menjaga likuiditas, khususnya di tengah volatilitas pasar modal dan ketidakpastian ekonomi global,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (13/8). Meski begitu, dia tak menampik bahwa tren *bullish* di pasar modal dapat

membuka peluang untuk mendorong kinerja investasi, tetapi bagi dana pensiun risiko koreksi pasar tetap perlu diantisipasi.

“Dana pensiun memanfaatkan momentum positif secara selektif, sambil menjaga porsi instrumen aman, seperti SBN dan deposito untuk memastikan arus kas manfaat pensiun tetap terjaga,” ucapnya.

Menurutnya, pendekatan seperti itu memungkinkan dana pensiun tetap memperoleh pertumbuhan aset yang berkesinambungan tanpa harus mengorbankan keamanan dana kelolaan.

Lebih jauh, Budi menjelaskan bahwa strategi investasi dapen berorientasi pada pencapaian imbal hasil optimal dengan tingkat risiko yang terukur dan sesuai profil kewajiban jangka panjang, serta regulasi yang berlaku.

Bagi dapen, lanjutnya, investasi itu menerapkan prinsip PAS (*prudent, agile, secure*). *Prudent* artinya investasi disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. *Agile* berarti investasi harus dinamis dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Sementara itu, *secure* berarti risiko investasi harus dihitung secara cermat, sehingga bisa aman.

Sementara itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyampaikan industri dana pensiun akan terus konsisten menerapkan strategi investasi *lifecycle fund* di tengah tren *bullish* pasar saham.

Sebagai informasi, *lifecycle fund* adalah strategi pengelolaan investasi yang alokasi asetnya disesuaikan dengan usia atau tahap hidup peserta. Dalam konteks ini, dihitungnya seberapa dekat peserta dengan usia pensiun.

TETAP PROSPEKTIF

Humas ADPI Syarifudin Yunus mengemukakan bahwa penempat-



Save & Share



Dana pensiun per Juni 2025 terus meninggalkan pasar saham dalam penempatan investasinya. Terbukti secara YoY dan MtM, penempatan investasi di saham turun 11,11% dan 6,71% menjadi sebesar Rp22,67 triliun.



Berkebalikan, penempatan di instrumen risiko rendah, seperti deposito berjangka, deposito on call, serta SBN dan SRBI tumbuh. Hal ini menunjukkan strategi investasi yang lebih konservatif dari dana pensiun.

an investasi di pasar modal tetap prospektif apabila kondisi makroekonomi sudah pulih. Pasalnya, investasi di saham tetap menjadi alternatif instrumen di dapen, apalagi untuk jangka panjang.

“Namun, di dana pensiun kan harus menerapkan juga prinsip *lifecycle fund*. Jadi untuk peserta yang mau pensiun harus konservatif, tetapi peserta yang masih lama pensiunnya tetap bisa di saham,” katanya.

Bagi dapen, lanjutnya, tantangan investasi di pasar modal sebenarnya terletak pada volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi. Sebab, dapen akan terus memegang prinsip kehati-hatian.

Syarifudin menyebut hal ini karena dapen bertugas untuk memastikan ketersediaan likuiditas agar bisa membayar manfaat pensiun kepada peserta.

“Meski tren *bullish* terjadi, prinsip kehati-hatian tetap dipegang oleh pengelola dana pensiun. Dana pensiun tetap pada pakemnya harus hati-hari melalui strategi diversifikasi, *lifecycle fund*, dan fokus pada keseimbangan antara risiko dan imbal hasil untuk memenuhi kewajiban kepada pesertanya.”

Sementara itu, pengamat industri dana pensiun Suheri Lubis menilai strategi investasi di dapen berupaya mengoptimalkan hasil dengan tetap mengacu pada kesesuaian antara aset dan liabilitas, supaya tidak mengalami masalah likuiditas.

“Jadi bukan semata-mata mereka mencari profit, tapi mereka tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara aset dan profitabilitasnya, karena dana pensiun ini kan sebetulnya investasi jangka panjang,” katanya.

Penurunan alokasi di saham menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat stabilitas portofolio dan menjaga likuiditas.

Jika menilik data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 11,48% sepanjang tahun berjalan. Bahkan sejak penutupan Februari, IHSG telah menguat 25,87%. Hal ini menunjukkan pasar modal berada pada momentum *bullish*.

Suheri menilai momentum *bullish* ini malah mengkhawatirkan untuk masuk pasar.

“Tinggal tunggu turunnya dan kecenderungan sekarang saham itu bergerak *sideways* naik turun, naik turun.”

Ketua Umum ADPI periode 2017—2022 ini menjelaskan kalau pun ada perubahan kecil strategi investasi lebih taktikal dalam mengambil momen momentum.

Selama ini, pengembangan hasil investasi dapen menjadi penopang dana kelolaan dapen ketika liabilitas manfaat pensiun meningkat.

Pengamat industri dana pensiun Bambang Sri Muljadi melihat di tengah kondisi ketimpangan liabilitas dan iuran, hasil investasi dana pensiun cukup solid dan mampu menjaga keberlangsungan

dana pensiun, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

“Hasil investasi dana pensiun sukarela cukup konsisten atau tidak fluktuatif, dan penantaan portofolionya masih sesuai dengan kebutuhan likuiditas, baik jangka pendek, menengah, dan panjang.”

Adapun, OJK mencatatkan total aset industri dana pensiun secara keseluruhan mencapai Rp1.578,47 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut angka itu setara dengan pertumbuhan 8,99% YoY.

“Jumlah peserta dana pensiun per Juni 2025 tercatat mencapai 29,01 juta orang,” katanya.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, total aset tersebut meliputi nilai aset program pensiun sukarela yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% YoY atau setara dengan Rp391,43 triliun.

Adapun, iuran program pensiun sukarela mencapai Rp18,10 triliun, tumbuh 2,14%.

Sementara itu, nilai aset dari program pensiun wajib yang meliputi program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, dan program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun ASN, TNI, dan Polri itu naik 10,36% atau senilai Rp1,187 triliun.

Lebih jauh, Ogi juga menuturkan dalam upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK melalui pengawasan khusus. Hingga Juli terdapat sembilan dapen masuk pengawasan khusus. ■

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun Gabungan (dalam miliar Rp)

No.	LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA	Jun-24	May-25	Jun-25	Perubahan(%) YoY Juni	Perubahan MtM Juni (5)
1	Bunga/Bagi Hasil	10.331.17	8.747.76	10.605.90	2,66%	21,24%
2	Dividen	1.595.01	1.217.19	1.685.15	5,65%	38,45%
3	Sewa	309.23	274.54	329.00	6,39%	19,84%
4	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	811.51	306.59	631.06	-22,24%	105,83%
5	Pendapatan Investasi Lain	7.50	7.37	8.02	7,02%	8,77%
6	Total Pendapatan Investasi	13.054.41	10.553.45	13.259.13	1,57%	25,64%
7	Total Beban Investasi	334.80	285.96	348.46	4,08%	21,86%
8	HASIL USAHA INVESTASI	12.719.62	10.267.49	12.910.68	1,50%	25,74%
9	Total Beban Operasional	1.187.07	988.03	1.181.36	-0,48%	19,57%
10	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	81.16	52.62	50.64	-37,60%	-3,75%
11	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	11.613.71	9.332.07	11.779.96	1,43%	26,23%
12	PAJAK PENGHASILAN	11.73	7.91	9.54	-18,64%	20,60%
13	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	11.601.98	9.324.16	11.770.42	1,45%	26,24%

Laporan Aset Neto Dana Pensiun Gabungan (dalam miliar Rp)

No.	LAPORAN ASET NETO	Jun-24	May-25	Jun-25	Perubahan YoY Juni (%)	Perubahan MtM Juni (%)
1	Tabungan	41,42	1,16	0,75	-98,19%	-35,20%
2	Deposito on call	2.630,13	2.366,10	4.057,51	54,27%	71,49%
3	Deposito berjangka	86.216,99	92.118,84	99.032,92	14,86%	7,51%
4	Sertifikat deposito	58,84	-	-	-100%	-
5	Surat berharga BI	6.109,92	14.978,23	10.902,32	78,44%	-27,21%
6	SBN	133.606,85	139.998,96	137.552,81	2,95%	-1,75%
7	Saham	25.507,27	24.303,92	22.672,76	-11,11%	-6,71%
8	Obligasi korporasi	59.002,15	56.719,90	56.967,34	-3,45%	0,44%
9	Sukuk korporasi	6.849,01	7.046,53	7.133,89	4,16%	1,24%
10	Reksadana	10.930,09	10.777,40	10.219,64	-6,50%	-5,18%
11	Investasi Lain-Lain	28.986,28	30.362,31	30.377,54	4,80%	0,05%
12	TOTAL INVESTASI	359.938,94	378.673,35	378.917,48	5,27%	0,06%
13	ASET NETO	370.567,29	388.871,81	389.111,47	5,00%	0,06%

Sumber: OJK, diolah

BISNIS/SINTA NOVIZAH

| PEMBIAYAAN NON-BANK |

Kredit UMKM Tumbuh

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) menyalurkan total pembiayaan kepada para pelaku UMKM sebesar Rp272 triliun per Juni 2025.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas PVML Agusman menyebut penyaluran pembiayaan di sektor PVML meningkat 4,30% secara tahunan atau *year-on-year* (YoY) menjadi Rp955 triliun per Juni 2025.

Adapun, 88% atau Rp844 triliun dari Rp955 triliun itu merupakan penyaluran pembiayaan konvensional. Sementara itu, Rp111 triliun adalah syariah.

“[dari jumlah itu] PVML juga berkontribusi untuk pembiayaan UMKM, sebesar

Rp272 triliun,” kata Agusman baru-baru ini.

Tak hanya itu, dia juga membeberkan bahwa pertumbuhan aset di sektor PVML per Juni 2025 mencapai Rp1.049 triliun atau tumbuh 4,02% YoY, dengan jumlah pelaku industri sebanyak 742 entitas.

Lebih jauh, Agusman berujar total pembiayaan ke pelaku UMKM di sektor PVML bisa besar lantaran di sektornya ini ada segmen bisnis yang langsung berfokus ke UMKM seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

“Setiap segmen bisnis kita masing-masing bidang itu di pusat pembiayaan, di modal ventura, di pegadaian, apalagi pinjaman dari itu semua memang ada segmen UMKM, jadi sangat mungkin terus diperkuat,” ujar dia.

Pada kesempatan yang

sama, Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyampaikan telah mengarahkan 36 kantor OJK di daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi UMKM, dengan cara mendukung pembiayaan melalui industri keuangan yang ada di daerah itu.

“Termasuk mendukung prioritas dan program pemerintah daerah di sektor dan industri terkait. Jadi semua sejalan dengan apa yang menjadi keinginan, komitmen, dan tentu cita-cita kita bersama.”

OJK juga baru merilis peraturan mewajibkan bank memasukkan target pembiayaan atau kredit UMKM dalam rencana bisnis bank (RBB).

Aturan itu telah melewati proses konsultasi dan mendapatkan persetujuan DPR.

(Annisa N. Amara)

| PENGEMBANGAN POTENSI UMKM



Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan) mengamati produk UMKM didampingi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah (kedua kiri), Wakil Presiden Direktur BCA Armand W. Hartono (tengah), dan Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih (kiri) se usai pembukaan BCA UMKM Fest 2025 di

Jakarta, Rabu (13/8). Pada kegiatan itu BCA menghadirkan 50 pelaku UMKM terpilih dari sektor fesyen, *health & beauty*, *hobby & activity*, hingga F&B, sekaligus sebagai bagian dari komitmen untuk membina dan mengembangkan potensi UMKM Indonesia secara berkelanjutan.

| LAYANAN PERBANKAN |

UNTUNG & RUGI *UNIVERSAL BANKING*

Bisnis, JAKARTA — Wacana OJK untuk mengkaji kemungkinan penerapan *universal banking* di Indonesia guna mendukung kemajuan pasar modal berpotensi mengerek pundi-pundi keuntungan bank, meski risikonya tak bisa dinafikan.

Ni Luh Angela
angela.sadrine@bisnis.com

- Universal banking memberi bank ruang masuk ke berbagai lini bisnis, dari investasi hingga asuransi.
- Berpotensi memperdalam pasar modal Indonesia dengan tambahan likuiditas dari bank.
- Namun, meningkatkan risiko sistemik, konflik kepentingan, dan kompleksitas pengawasan.

Apa Itu Universal Banking?
Definisi

Model perbankan yang menggabungkan layanan bank komersial (simpanan & pinjaman) dengan layanan keuangan lain seperti investasi, asuransi, manajemen aset, perdagangan efek.

Asal-usul

Muncul di Eropa abad ke-19, dipelopori oleh bank-bank Jerman seperti Deutsche Bank.

Praktik di Global

Lazim di negara maju; bank bisa bertindak sebagai pialang, underwriter, manajer investasi, hingga perusahaan asuransi.

Kondisi di Indonesia

Bank & pasar modal masih terpisah. Bank belum jadi anggota bursa, akses pasar modal terbatas lewat sekuritas.

Kinerja Pendapatan dan Laba Industri Perbankan

Keterangan	2021	2022	2023	2024	Mei 2024	Mei 2025	Pertumbuhan Mei 2025 (YoY)
Pendapatan Bunga Bersih	431.203	487.848	529.665	549.757	222.278	231.288	4,05%
Pendapatan Operasional Selain Bunga	460.019	522.998	664.976	877.623	271.224	587.027	116,44%
□ Peningkatan Nilai Wajar dan Keuntungan Penjualan Surat Berharga	20.448	10.408	16.855	17.415	6.144	11.686	90,21%
□ Peningkatan Nilai Wajar dan Keuntungan Penjualan Kredit	-	-	57	130	1	42	3296,10%
□ Peningkatan Nilai Wajar dan Keuntungan Penjualan Aset Keuangan Lainnya	60	276	1.360	1.489	917	514	-43,95%
□ Keuntungan Transaksi Spot dan Derivatif	208.665	318.768	426.023	612.234	167.153	483.073	189,00%
□ Deviden, Keuntungan Penyertaan Modal, Komisi, Provisi, & Fee	87.234	97.515	103.364	111.769	46.588	46.234	-0,76%
□ Lainnya	143.612	96.030	117.317	134.586	50.421	45.478	-9,80%
Labas Bersih	140.206	201.817	243.326	255.200	101.467	106.502	4,96%

Potensi Manfaat	Bidang	Manfaat
Diversifikasi Pendapatan	Diversifikasi Pendapatan	Pendapatan tak hanya dari bunga pinjaman, tapi juga dari investasi, underwriting, M&A advisory, asuransi.
	Perluasan Bisnis	Bank bisa memperdagangkan instrumen keuangan, valas, dan derivatif.
Penguatan Pasar Modal	Penguatan Pasar Modal	Bank menjadi pemain besar yang meningkatkan likuiditas & kedalaman pasar modal.
Hedging & Manajemen Risiko	Hedging & Manajemen Risiko	Fasilitas lindung nilai yang lebih luas bagi bank & nasabah.

Potensi Risiko	Risiko	Penjelasan
Risiko Sistemik	Risiko Sistemik	Skala usaha lebih besar → risiko kegagalan berdampak luas.
	Konflik Kepentingan	Potensi mendorong nasabah membeli produk tak sesuai profil risiko.
	Risiko Pasar & Likuiditas	Lebih banyak jenis transaksi berisiko tinggi.
	Kompleksitas Pengawasan	Butuh regulasi & kontrol ketat dari OJK, revisi UU Perbankan.

Sumber: Berbagai sumber, diolah.

BISNIS/MUHAMMAD AFANDI

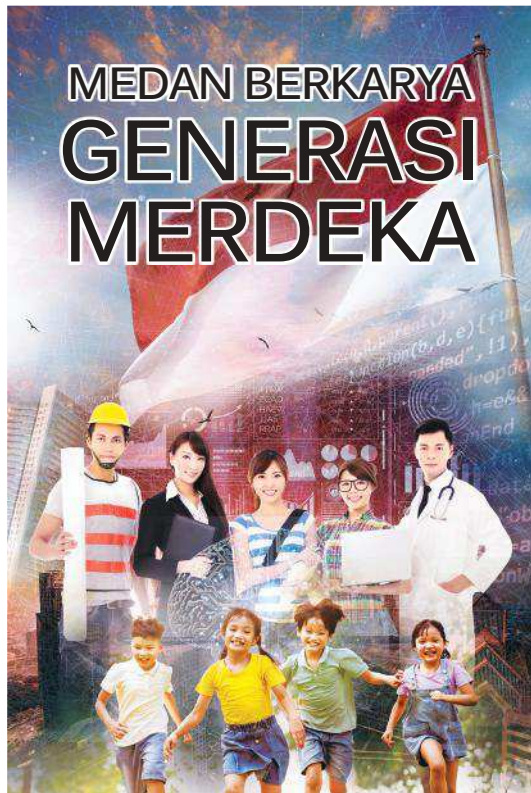
Bisnis Indonesia
WEEKLY

Tematik Relevan Kekinian

EDISI

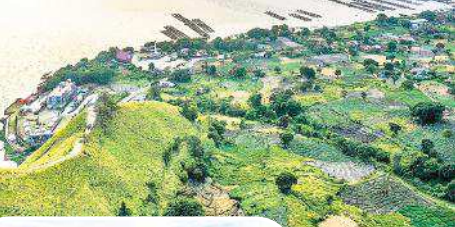
17 AGUSTUS 2025

BEREDAR JUMAT



TRAVEL & FOODISM

PESONA ASRI DARI DAIRI



Dairi. Angin yang berembus dari perbukitan membawa aroma tanah basah dan harum kopi yang baru disangrai.

Udara sejuk langsung menyapa begitu kaki menapaki tanah Kabupaten

SPOTLIGHT

JELI MENANGKAP PELUANG

Di tengah meningkatnya pengangguran dan kasus PHK, generasi muda kreatif ini justru pantang menyerah dan berjuang membalik kondisi sulit menjadi peluang.



CUSTOMER SERVICE:
Telp. (021) 57901023 ext. 520, 515
0800-1-247647

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 57901023 ext. 520, 504, 531
Faks. (021) 57901024 | email: iklan@bisnis.com

Sinyal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar. Menurutnya, pengaturan terkait penerapan *universal banking* di Indonesia kini sedang dikaji oleh Bidang Pengawasan Perbankan OJK.

“Nanti boleh *ngobrol* dengan Pak Dian [Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae] untuk kemajuan pasar modal, termasuk yang sangat menarik pengkajian tentang *universal banking*,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara seremoni 48 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (11/8).

Universal banking adalah model usaha bank yang memungkinkan satu entitas bank menawarkan berbagai layanan keuangan sekaligus di bawah satu atap, mulai dari perbankan komersial, investasi, asuransi, hingga manajemen aset.

Model ini memberi kemudahan bagi nasabah untuk mengakses banyak produk keuangan melalui satu institusi. Namun, di Indonesia selama ini perbankan hanya menjalankan fungsi komersial, melalui penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) pun menyambut baik wacana ini. Kendati begitu, ada beberapa catatan yang menurut Perbanas perlu diperhatikan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan *universal banking* sangat baik lantaran akan memberikan *custom experience* yang lebih mulus melalui *one stop solutions* lewat perbankan.

“Sehingga untuk perbankan bisa menjadi sumber penghasilan lain, dan bagi pemerintah mungkin lebih terkonsolidasi dari sisi aturan dan pengawasan,” kata Lani kepada *Bisnis*, Rabu (13/8).

Kendati begitu, Lani menyebut bahwa keberhasilan konsep ini membutuhkan kesiapan industri perbankan, pengawasan yang kuat, serta perangkat hukum yang memadai. “Harus ada *enhancement* [regulasi],” ujarnya.

Pengamat Perbankan sekaligus dosen Binus University Moch Duddy Ariefianto juga menilai *universal banking* memberikan ruang bagi bank untuk memperluas sumber pendapatan, sehingga tidak lagi terkonsentrasi dari bunga.

“Jadi, manfaatnya ada karena bisa dipakai buat investasi, diversifikasi bisnis, juga bisa buat *hedging*,” kata Duddy kepada *Bisnis*, Selasa (13/8).

Duddy mengatakan penerapan *universal banking* juga akan membawa

dampak positif bagi pasar modal. Kehadiran bank sebagai pemain baru akan menambah jumlah pembeli dengan kapasitas besar sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan memperdalam pasar modal Indonesia.

RISIKO

Sementara itu, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan turut mengamini prospek yang dihadirkan oleh *universal banking*. Namun, dia menyebutkan bahwa semua ini hanya boleh dilakukan dalam kerangka konglomerasi keuangan yang diawasi ketat oleh OJK.

Meski *universal banking* berpotensi membuka peluang *cuan* baru untuk bank, Trioksa mengungkapkan dampak negatif jika konsep ini diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, *universal banking* dapat semakin meningkatkan risiko sistemik bagi bank dan kompleksitas dalam pengawasan oleh regulator.

Selain itu, *universal banking* berpotensi memicu adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini, Trioksa menyebut bahwa nasabah akan didorong untuk membeli produk bank yang tidak sesuai dengan profil risiko nasabah.

Dampak negatif lainnya, yakni makin besarnya risiko pasar dan risiko likuiditas bagi bank lantaran makin banyak dan beragamnya aktivitas bank.

Mengingat pengawasan perbankan dan pasar modal berada di bawah OJK, Trioksa menilai pengawasan perlu ditingkatkan dengan masuknya perbankan ke *universal banking*. “Karena kegiatan bisnis semakin kompleks,” ujarnya.

Adapun, wacana penerapan *universal banking* di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam arsip harian *Bisnis Indonesia*, Bank Indonesia pada 2007 sempat mengkaji kemungkinan mengizinkan perbankan menerapkan prinsip *universal banking*.

Melalui konsep ini, selain menyediakan jasa layanan keuangan mencakup penghimpun dan menyalurkan pendanaan, bank juga dapat memperdagangkan instrumen keuangan dan valas serta produk derivatifnya.

Bank juga dapat menjamin emisi utang dan saham baru, berfungsi sebagai pialang, manajer investasi, dan bahkan sebagai perusahaan asuransi.

Kabiro Stabilitas Sistem Keuangan BI kala itu, Wimboh Santoso mengatakan praktik seperti ini umum dilakukan oleh perbankan internasional.

“Implikasinya *universal banking* harus masuk Undang-Undang [UU]. UU Perbankan perlu direvisi, supaya *clear* bank bisa menjadi *universal banking*,” tuturnya.

Dia menyampaikan, kemungkinan ini tengah diteliti untuk kemudian diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan rancangan UU Perbankan. Selanjutnya, aturan lebih rinci akan diatur dalam peraturan BI (PBI). ■

| EBITDA & LABA |

ARPU TERTEKAN, PROYEKSI EMITEN TELKO KOREKSI

Sejumlah sekuritas memangkas proyeksi EBITDA dan laba ISAT, EXCL, TLKM untuk 2025-2026 meski industri diprediksi pulih pada paruh kedua 2025.

Oktaviano DB Hana
oktaviano.donald@bisnis.com

Sederet sekuritas memangkas proyeksi EBITDA dan juga laba bersih emiten telekomunikasi ISAT, EXCL dan TLKM untuk periode 2025 meskipun memperkirakan kondisi industri akan memulih pada paruh kedua tahun ini.

Pada kuartal II/2025, EBITDA (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) beberapa emiten telekomunikasi tampak tertekan di tengah penurunan pendapatan rata-rata per pengguna alias *average revenue per user* (ARPU).

ARPU merupakan metrik untuk mengukur pendapatan rata-rata yang dihasilkan setiap pengguna aktif suatu bisnis, aplikasi, atau layanan.

Bahana Sekuritas dalam riset terbarunya melaporkan, ARPU PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 1,8% secara kuartalan (*quarter-to-quarter*/QtQ) ke level Rp38.500 pada kuartal II/2025, sedangkan ARPU Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), terkoreksi 2,8% QtQ menjadi Rp41.200.

Kondisi itu dipengaruhi penurunan belanja masyarakat pasca-periode Lebaran pada kuartal I/2025. Selain itu, penurunan tersebut dinilai terkait dengan masih beredarnya paket perdana lama kendati TLKM mengklaim penyerapannya telah tuntas dan ISAT menyebutkan 75% telah terserap dengan sisanya diperkirakan akan rampung pada kuartal III/2025.

“Pada kuartal kedua 2025, ARPU menurun karena belanja konsumen yang lebih rendah pasca-pencairan THR pada kuartal I 2025,” jelas Kevin Jonathan Panjaitan & Yogi Satrio Bagus, analis Bahana Sekuritas, dalam risetnya, Jumat (8/8).

Sementara itu, secara semesteran, Telkomsel mencatatkan ARPU sebesar Rp41.800, turun sebesar 7,4% secara tahunan (*year-on-year*/YoY) pada semester I/2025. Pada saat yang sama, ARPU ISAT mencapai Rp38.900, naik 2,5% YoY.

Sejalan dengan kinerja ARPU tersebut, Bahana Sekuritas mencatat bahwa EBITDA TLKM turun menjadi Rp17,9 triliun pada kuartal II/2025. Realisasi itu menurun 2,0% QtQ dan 3,1% YoY. Untuk semester I/2025, EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp36,1 triliun atau terkoreksi 4,7% YoY.

Kevin dan Yogi menilai bahwa EBITDA tersebut sesuai dengan estimasi Bahana Sekuritas dan mencapai 47% dari konsensus. Namun, laba inti perseroan berada di bawah estimasi.



Pengendara motor melintas di kantor PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) di Jakarta.

Bisnis/Abdurachman

“Laba inti TLKM turun 2,7% QtQ menjadi Rp5,4 triliun pada kuartal II/2025, sehingga laba inti semester I/2025 menjadi Rp11,0 triliun (-7,3% YoY), di bawah proyeksi kami dan konsensus (46%).”

Untuk ISAT, Bahana Sekuritas melaporkan bahwa EBITDA tetap stagnan sebesar Rp6,4 triliun pada kuartal II/2025. Realisasi itu meningkat 0,4% QtQ, tetapi terkoreksi 6,7% YoY. Alhasil, total EBITDA perseroan pada semester I/2025 turun 4,2% YoY menjadi Rp12,9 triliun.

Kevin dan Yogi menilai bahwa angka tersebut berada di bawah estimasi pihaknya dan baru mencapai kisaran 45% dari proyeksi dan 46% dari konsensus.

“Laba bersih inti turun 1,9% QtQ menjadi Rp1,0 triliun pada kuartal II/2025, sehingga laba bersih inti semester I/2025 mencapai Rp2,1 triliun (-21,1% YoY), di bawah proyeksi kami/konsensus (38%),” jelas mereka.

Sebagai catatan, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) direncanakan untuk merilis laporan keuangan konsolidasi pada pertengahan Agustus 2025 usai merealisasikan merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) pada paruh pertama tahun ini.

Bahana Sekuritas memperkirakan EBITDA EXCL akan naik 23% QtQ menjadi Rp5,3 triliun pada kuartal II/2025 karena merger tersebut. Namun,

sekuritas ini memperkirakan hasil yang lemah pada paruh pertama tahun ini.

REVISI PROYEKSI

Sejalan dengan hasil itu, Bahana Sekuritas memangkas proyeksi EBITDA dan laba bersih untuk sederet emiten telekomunikasi tersebut untuk periode 2025 dan 2026.

Untuk EBITDA ISAT, sekuritas ini menurunkan proyeksinya sebesar 4,3% menjadi Rp27,1 triliun pada 2025 dan sebesar 6,8% menjadi 28,1 triliun untuk 2026.

Seperti diketahui, manajemen ISAT sendiri telah merevisi panduan terkait pertumbuhan EBITDA pada 2025 menjadi satu digit kecil dari sebelumnya sekitar 10%.

Ranjan Sharma, analis JP Morgan, menjelaskan bahwa revisi panduan tersebut menyiratkan prospek pertumbuhan EBITDA yang tajam pada semester II/2025, usai turun sekitar 4% pada paruh pertama tahun ini.

JP Morgan sendiri memperkirakan Indosat masih akan mencatatkan pertumbuhan EBITDA pada 2025 dan 2026. Namun, perbankan investasi asal Amerika Serikat ini memangkas estimasinya sekitar 6,7% menjadi Rp26,46 triliun pada 2025 dan sekitar 6,1% menjadi Rp28,92 triliun pada 2026.

“Proyeksi EBITDA 2025 kami yang direvisi menyiratkan peningkatan EBITDA sebesar 8% dari kuartal II/2025 ke kuartal IV/2025. Kami memperkirakan

“

ARPU menurun karena belanja konsumen yang lebih rendah pasca-pencairan THR pada kuartal I 2025.

pertumbuhan EBITDA sebesar 9% pada 2026,” jelas Ranjan Sharma dkk, dalam risetnya, Rabu (30/7).

Sementara itu, Bahana Sekuritas turut merevisi turun proyeksinya untuk EBITDA TLKM sebesar 3,2% menjadi Rp74,4 triliun pada 2025 dan sekitar 4,3% menjadi Rp75,3 triliun pada 2026.

“Proyeksi laba bersih lebih rendah menjadi sebesar 5,1% pada 2025 dan 6,8% pada 2026,” jelas Kevin dan Yogi.

Adapun, JP Morgan menurunkan sekitar 3,7% estimasinya untuk EBITDA TLKM pada 2025 menjadi Rp70,97 triliun dan sebesar 3,9% pada 2026 menjadi Rp72,38 triliun.

“Kami yakin TLKM terus menghadapi risiko persaingan yang tinggi dalam layanan nirkabel dan *broadband*,” jelas Ranjan Sharma cs.

Adapun untuk EXCL, Bahana Sekuritas turut memangkas estimasi EBITDA sebesar 10,4% menjadi Rp21,3 triliun pada 2025 dan 5,4% menjadi

Rp23,9 triliun pada 2026.

Sejalan dengan revisi itu, sekuritas ini menurunkan proyeksinya untuk laba bersih EXCL 10,1% menjadi Rp1,2 triliun pada 2025 dan 6,4% menjadi Rp1,6 triliun untuk 2026.

“Kami merevisi proyeksi kami untuk EXCL untuk mencerminkan konsolidasi dengan Smartfren yang dimulai pada pertengahan April 2025, serta kinerja yang diperkirakan lemah pada semester I/2025,” ungkap Kevin dan Yogi.

Kendati memangkas estimasi tersebut, Bahana Sekuritas sendiri memperkirakan ARPU emiten telekomunikasi akan lebih kuat dengan imbal hasil data yang lebih baik pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini.

Bahana Sekuritas tetap mempertahankan rating optimal alias *overweight* untuk sektor telekomunikasi seiring adanya tanda-tanda pemulihan kinerja industri. Proyeksi itu didukung oleh kondisi pasar yang lebih kondusif karena kartu SIM lama hampir sepenuhnya terserap dan penyerbuan produk serta konsolidasi industri yang berkelanjutan.

“Meskipun hasil yang lebih lemah pada kuartal II/2025, kami mempertahankan peringkat *overweight* kami untuk sektor Telekomunikasi. Kami yakin industri ini akan mengalami perbaikan pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025 dan seterusnya,” ungkap Kevin dan Yogi. ■



Karyawan melayani pelanggan di salah satu gerai PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta.



Pelanggan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) di Jakarta.

Foto-foto: Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

| EFISIENSI TRANSFER KE DAERAH |

RUANG GERAK DAERAH KIAN TERIMPIT

Sejumlah daerah mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran transfer dana ke daerah (TKD). Mereka khawatir kebijakan itu akan meningkatkan ketimpangan pembangunan karena tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai.

Dany Saputra & Surya D.A. Simanjuntak
redaksi@bisnis.com

Sekadar catatan bahwa porsi dana transfer ke daerah (TKD) masih cukup dominan dalam struktur pendapatan daerah. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi pendapatan daerah per 12 Agustus tercatat Rp648,16 triliun. Jumlah itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp204,17 triliun, TKD Rp417,38 triliun, dan pendapatan lainnya Rp26,06 triliun. Peran TKD mencakup 64,39% dari total pendapatan daerah.

Persoalannya, dengan postur pendapatan daerah tersebut, sangat sedikit provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki kemandirian secara fiskal. Banyak daerah memiliki kapasitas fiskal sedang, rendah, bahkan sangat rendah.

Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 3 daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 127/2024 tentang Perubahan PMK No. 65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Provinsi yang memiliki kapasitas fiskal tinggi hanya 5.

Sisanya, yakni 12 provinsi memiliki kapasitas fiskal sedang, 16 provinsi berkapasitas rendah, dan 2 provinsi berkapasitas sangat rendah (Lihat infografik).

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah bisa menjadi ilustrasi yang timpang untuk membandingkan daerah yang mandiri secara fiskal dengan daerah yang masih tergantung dengan transfer dana dari pusat. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat bahwa sampai 12 Agustus 2025 lalu, Jakarta

mencatat pendapatan daerah senilai Rp44,49 triliun. Mayoritas sumber pendapatan Jakarta berasal dari PAD senilai Rp31,4 triliun. Jumlah transfer dana dari pusat dalam bentuk TKD hanya sebesar Rp13,09 triliun. Sebaliknya Jawa Tengah, dengan jumlah pendapatan daerah senilai Rp58,8 triliun, PAD-nya hanya Rp20,7 triliun, transfer dana dari pusat cenderung besar yakni sebanyak Rp35,9 triliun. Sisanya adalah pendapatan lainnya yang tercatat sebesar Rp2,1 triliun.

Gambaran akan lebih komplek lagi ketika melihat kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota. Ada 211 kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah. Angka ini nyaris separuh dari 508 kabupaten/kota di Tanah

Air. Angka ini mengonfirmasi bahwa tidak semua daerah memiliki kemandirian fiskal.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengemukakan bahwa kabupaten dengan PAD kecil akan menjadi pihak paling dirugikan apabila pemangkasan TKD dilakukan secara

seragam. Tapanuli Tengah memiliki kapasitas fiskal rendah, menurut PMK No. 127/2024.

“Daerah-daerah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah yang PAD-nya di bawah Rp100 miliar akan sangat terdampak pembangunannya. [Pemangkasan TKD] perlu dipertimbangkan kembali agar pembangunan di daerah tidak mengalami hambatan,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (12/8).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini pun mengusulkan agar pemerintah pusat menyusun klaster daerah berdasarkan kemampuan keuangan untuk menghindari efek pemangkasan anggaran yang

Artinya, ruang daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai persoalan di wilayahnya makin terbatas.

tidak proporsional. Dia mengusulkan klaster dibagi berdasarkan PAD di bawah Rp100 miliar, PAD Rp100 miliar-Rp250 miliar, dan PAD di atas Rp250 miliar. Dengan demikian, kebijakan efisiensi TKD bersifat lebih tertarget dan adil.

Masinton juga menyoroti penyempitan kewenangan otonomi daerah yang ikut menggerus potensi pendapatan. Dia memberi contoh wilayah laut dan sumber daya alam lokal yang selama ini berpotensi menambah PAD, tetapi kewenangan daerah untuk memanfaatkannya terbatas.

Dia menyerukan kebutuhan untuk merumuskan kembali skema pembagian TKD yang mempertimbangkan kapasitas fiskal dan fungsi otonomi masing-masing daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai efisiensi TKD akan makin menekan kemandirian keuangan daerah. Armand mengungkapkan selama ini ruang fiskal daerah sudah sempit akibat *mandatory spending* yang melebar seperti yang diatur UU 1/2025 dan aturan turunannya. Dia memberi contoh ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dan infrastruktur minimal 40%, serta makin banyak alokasi yang

peruntukannya diatur pusat. “DAU [dana alokasi umum] sekarang tidak murni *block grant*, sudah bercampur *specific grant*. Ada DAU rasa DAK [dana alokasi khusus]. Artinya ruang daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai persoalan di wilayahnya makin terbatas,” ujar Armand.

Selain itu, lanjutnya, pemotongan TKD sekitar Rp50 triliun, terutama pada dana alokasi khusus (DAK) fisik, berdampak signifikan. Hampir setengah DAK fisik dipangkas dan itu sangat mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.

DIBICARAKAN BERSAMA

Dia mendorong agar rencana efisiensi anggaran pada tahun-tahun mendatang dibicarakan dalam forum pusat-daerah sebelum penetapan APBN. Dengan demikian, pembangunan dan kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan daerah.

Armand mengungkapkan selama ini keputusan pemotongan TKD selama ini bersifat sepihak, tanpa dialog dengan daerah yang terdampak langsung. Dia memberi contoh, pemerintah daerah tidak diminta pendapat ketika pemerintah pusat memutuskan realokasi anggaran dana TKD hingga Rp50 triliun sesuai Inpres 1/2025 dan kini tata caranya diatur dalam PMK 56/2025.

Sementara, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pencadangan hasil efisiensi dana TKD sesuai PMK 56/2025 akan menggeser keseimbangan hubungan pusat-daerah ke arah kontrol pusat yang lebih dominan atau tersentralisasi, terutama dalam aspek fiskal.

“Prinsip desentralisasi fiskal yang seharusnya memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola sumber daya menjadi tereduksi ketika alokasi TKD menjadi instrumen cadangan di pusat,” jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman.

Dia khawatir, jika pola itu terus berlanjut tanpa reformasi tata kelola TKD berbasis kinerja dan transparansi, maka secara *de facto* otonomi fiskal daerah akan tereduksi menjadi sekadar fungsi administratif, bukan instrumen pembangunan yang mandiri.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memperingatkan bahwa penghematan belanja pemerintah harus dipastikan tidak mematikan pemulihan.

Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda tetap menyoroti bahwa seharusnya belanja pemerintah tetap bisa menjadi stimulus ketika daya beli masyarakat masih turun. Belanja di sektor perhotelan atau sektor transportasi, misalnya, dinilai bisa menjadi stimulus bagi ekonomi daerah. Dia pun mengamini efisiensi awal tahun, yang menargetkan sejumlah pos belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, berdampak negatif ke perekonomian.

“Sebagai mesin stimulus utama dari pemerintah, belanja negara gagal memberikan dampak yang signifikan. Meskipun ada anggaran yang sebagian dibuka oleh pemerintah. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah masih minus atau berkontraksi. Padahal seharusnya ketika daya beli masyarakat masih turun, belanja pemerintah bisa menjadi stimulus yang tepat bagi perekonomian,” ujar Nailul.

Bisnis sudah meminta respons sejumlah pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait nasib desentralisasi fiskal daerah sesuai penerbitan PMK 56/2025. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Kemkeu Jaka Sucipta menolak menjawab dan meminta *Bisnis* meminta tanggapan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemkeu. Kepala Biro KLI Kemkeu Deni Surjantoro tak menjawab pertanyaan *Bisnis*.

Efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut PMK No. 56/2025

a.

TKD untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur

b.

TKD yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan suatu daerah

c.

TKD yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah dalam peraturan perundang-undangan mengenai APBN tahun anggaran berkenaan

d.

TKD yang tidak digunakan untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan; dan/atau

e.

TKD lainnya yang ditentukan, berdasarkan arahan Presiden

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2025

Sebanyak 18 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan rendah.

Transfer ke daerah (TKD) untuk infrastruktur menjadi salah satu sasaran efisiensi oleh pemerintah pusat.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sangat Rendah : 2 (Aceh, Sulawesi Tenggara)

Rendah : 16 (Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali, Maluku Utara, dll)

Sedang : 12 (Papua Pegunungan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Riau, dll)

Tinggi : 5 (Sumatra Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Utara)

Sangat Tinggi : 3 (Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah)

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 127/2024

■ RENCANA UBAH INDIKATOR KEMISKINAN

Sejumlah permukiman padat penduduk di Jakarta, Senin (11/8). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendukung rencana Badan Pusat Statistik memperbarui indikator kemiskinan sebagai respons terhadap

masukannya publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi terkini. BPS sebelumnya mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi.

| REKENING DORMANT |

Jutaan Rekening Penerima Bansos Tak Aktif

Bisnis, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 10,4 juta rekening penerima bansos pemerintah yang pasif alias rekening *dormant*. Temuan tersebut, sekaligus potensi bansos lebih dari Rp2 triliun yang tidak tersalurkan, telah dilaporkan ke Kementerian Sosial. Kepala PPATK Ivan Yustivandana menyebut bahwa seluruh temuan lembaganya terkait dengan rekening dormant penerima bantuan sosial sudah diserahkan ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf. “Semua sudah di Kemensos, ya. Kami sudah serahkan semua, berkenan dikonfirmasi ke Bapak Bensos, ya,” ujarnya kepada *Bisnis*. Ivan sebelumnya menje-

laskan bahwa PPATK menemukan ada 10,4 juta pemilik rekening *dormant* yang merupakan penerima bansos pemerintah. Temuan ini sejalan dengan laporan berasal dari 105 perbankan kepada PPATK berupa 122 juta rekening *dormant* atau menganggur. Dari total 10,4 juta rekening penerima bansos yang *dormant* itu, terdapat saldo yang tersimpan di dalamnya senilai Rp2,41 triliun. Mayoritas rekening dimaksud sudah tidak aktif bertransaksi selama lima tahun lebih, atau sebanyak 6,3 juta rekening dengan saldo Rp1,37 triliun. PPATK menemukan bahwa 9,32 juta rekening *dormant* penerima bansos itu sudah tidak aktif lebih dari tiga tahun dan menyimpan

saldo sampai dengan Rp1 juta. Total saldo yang disimpan pada rekening-rekening *dormant* itu Rp1,42 triliun. Sementara itu, sebanyak 520.119 rekening dengan status *dormant* yang juga sudah tidak aktif bertransaksi lebih dari tiga tahun memiliki saldo Rp1 juta—Rp2 juta. Keseluruhan rekening menyimpan Rp692,9 miliar. “Potensi total dana pada rekening *dormant* bansos yang tidak/belum tersalurkan sebesar Rp2,1 triliun,” terang Ivan. Temuan PPATK itu didapatkan dari hasil pencocokan data rekening *dormant* yang dihimpun PPATK dari perbankan serta data penerima bansos 28,4 juta nomor induk kependudukan. (Dany Saputra)

| KINERJA EMITEN |

IMPAK MINIM PASAR BARU ITMG

Strategi emiten batu bara, PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) merambah pasar Eropa dan Korea Selatan berhasil menumbuhkan penjualan perusahaan, meski penurunan harga ‘emas hitam’ masih menjadi penekan utama performa pada paruh pertama tahun ini.

Annisa K. Saumi & Anna Noviani
redaksi@bisnis.com

Wilayah baru di Eropa dan Korea Selatan tercatat menjadi pasar ekspor baru PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) pada semester I/2025, dengan total pendapatan yang berhasil diraup dari kedua kawasan itu sebesar US\$30,3 juta. Berdasarkan laporan keuangannya, ITMG membukukan pendapatan sebesar US\$919,4 juta sepanjang semester I/2025. Penjualan tersebut diperoleh dari pasar domestik sebesar US\$205,4 juta, dan ekspor sebanyak US\$713,9 juta.

ITMG mencatatkan ekspor ke negara baru, yaitu Korea Selatan senilai US\$14,5 juta, dan ke wilayah baru Eropa sebesar US\$15,8 juta. Sebelumnya, ITMG tidak mencatatkan penjualan ekspor ke dua wilayah tersebut pada periode yang sama tahun lalu.

Secara geografis, pasar ekspor batu bara terbesar ITMG adalah China dengan pendapatan mencapai US\$243,2 juta. Meski demikian, jumlah ini turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang senilai US\$361,9 juta.

Kemudian, ITMG meng-ekspor batu bara ke Jepang dengan nilai US\$203,8 juta, dan India dengan penjualan sebesar US\$115,1 juta. ITMG juga mengekspor batu baranya

ke negara-negara lain, seperti Filipina dengan penjualan US\$44 juta, Bangladesh sebesar US\$28,1 juta, Hong Kong dengan penjualan sebesar US\$23 juta, Thailand sebesar US\$10,7 juta, dan negara lainnya sebesar US\$15,4 juta.

Adapun, pendapatan ITMG pada semester I/2025 tercatat turun 12,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US\$1,04 miliar.

Manajemen ITMG dalam keterangannya menuturkan bahwa meskipun volume penjualan meningkat 8% secara tahunan, penurunan pendapatan dipengaruhi oleh turunnya rata-rata harga jual (*average selling price/ASP*) batu bara sebesar 19%, dari US\$97 per ton pada 6 bulan 2024 menjadi US\$78 per ton pada 6 bulan pertama 2025.

Hal itu juga seiring dengan harga acuan batu bara yang melemah, terutama Indonesia Coal Index (ICI).

Di sisi lain, secara operasional ITMG mencatatkan peningkatan produksi batu bara sebesar 12% secara tahunan mencapai 10,4 juta ton. Peningkatan produksi tersebut disertai dengan peningkatan volume penjualan sebesar 8% menjadi 11,7 juta ton.

Alhasil, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk atau laba bersih ITMG turun menjadi

US\$90,9 juta atau setara dengan Rp1,47 triliun. Laba itu turun 29,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US\$129,07 juta.

Pada perdagangan kemarin, saham ITMG ditutup merosot 0,33% ke level Rp22.475 per lembar. Hal tersebut melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun, di mana saham ITMG telah turun 14,14% sepanjang tahun berjalan atau *year-to-date* (YtD).

Akan tetapi, saham ITMG sebenarnya sudah mengalami tren penguatan dalam sebulan terakhir, karena tercatat menghijau 0,11%.

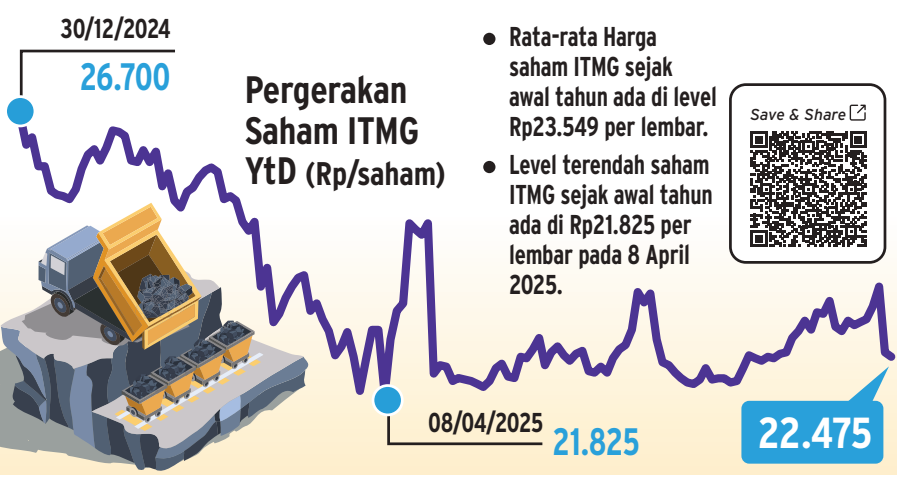
TEKANAN HARGA

Pandangan analis pun terbelah untuk saham ITMG. Berdasarkan data *Bloomberg*, sebanyak 11 analis menyematkan peringkat beli, 16 analis menyarankan *hold*, dan dua analis lainnya merekomendasikan jual terhadap saham ITMG.

Target harga saham ITMG berdasarkan konsensus analis berada di level Rp23.729 per saham dalam 12 bulan ke depan.

Terbaru, analis DBS Bank William Simadiputra menyarankan *hold* untuk saham ITMG, dengan target harga Rp21.000. Senada, analis Panin Sekuritas Andhika Audrey juga merekomendasikan *hold* untuk saham ITMG, dengan target harga Rp23.000 per saham.

Rekomendasi *hold* juga dibe-



rikan oleh analis BNI Sekuritas Indrawan Sitorus dan analis Indo Premier Sekuritas Reggie Parengkuan dengan target harga berturut-turut sebesar Rp21.350 dan Rp21.000 per saham.

Sementara itu, analis Citi Ryan Davis menyematkan peringkat jual terhadap saham emiten batu bara itu, dengan target harga Rp18.000 per saham.

Dalam risetnya, analis Panin Sekuritas Andhika Audrey mengatakan bahwa target harga Rp23.000 per saham mencerminkan estimasi harga per laba (*price to earnings ratio/PER*) 4,7 kali pada 2025.

Andhika Audrey juga mengatakan bahwa strategi ekspansi pasar ekspor ITMG dihadapkan pada tantangan penurunan ASP batu bara yang anjlok menjadi US\$78 per ton atau menyusut 19% YoY pada paruh pertama

tahun ini, sejalan dengan melemahnya harga acuan global, khususnya ICI.

“Kondisi ini tetap menekan pendapatan perseroan [ITMG] walaupun dari strategi ekspansi pasar ekspor, khususnya ke India dan Bangladesh tercatat tumbuh signifikan masing-masing 121% YoY dan 173% YoY, tetapi pengimpor terbesar, seperti China dan Jepang tercatat turun masing-masing 33% YoY dan 13% YoY,” jelasnya dalam riset Panin Sekuritas, dikutip Rabu (13/8).

Adapun, rekomendasi *hold* disematkan terhadap ITMG dengan mempertimbangkan faktor pelemahan harga batu bara global lanjutan, ekspektasi risiko dari rencana pengenaan bea keluar pada 2026, serta penurunan laba perseroan yang berisiko mempengaruhi pembagian dividen ke depannya.

(Oktaviano DB Hana)

PERTUMBUHAN PENYALURAN PEMBIAYAAN



Bisnis/Himawan L. Nugraha

Pegawai melayani nasabah yang melakukan transaksi di kantor cabang CIMB Niaga Syariah di Jakarta, Rabu (13/8). PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyampaikan Unit Usaha Syariah (UUS)

berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan mencapai Rp59,6 triliun hingga 30 Juni 2025, tumbuh Rp1,5 triliun atau 2,5% secara *year-on-year* (YoY).

| AKSI KORPORASI |

Sumber Pasti Pendanaan Pusat Data DSSA

Bisnis, JAKARTA — Emiten Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) mengandalkan dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 dan pinjaman dari bank untuk memuluskan proyek pusat data yang membutuhkan investasi Rp4,9 triliun.

Direktur DSSA David Fernando Audy dan Mona Angeline Susanto mengatakan, perseroan tengah menggarap proyek *data center* yang berlokasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Proyek itu ditangani oleh dua entitas yang terafiliasi dengan DSSA, yaitu PT Kuningan Mas Gemilang (KMG).

Adapun KMG adalah entitas anak tidak langsung perseoran dan PT LG Sinarmas Technology Solutions (LGSM)

yang merupakan perusahaan patungan LG CNS Co. Ltd. dan entitas Grup Sinar Mas PT SMPlus Digital Investama sebesar 50%.

Untuk melancarkan proyek tersebut, KMG dan LGSM telah menyepakati transaksi afiliasi senilai Rp1,22 triliun pada 4 Agustus 2025. Di perjanjian itu, KMG membeli pekerjaan dari LGSM yang mencakup sistem *mechanical electrical and plumbing, long lead equipment, information and communication technology*, keamanan, serta sistem manajemen dan pengendalian terpadu untuk proyek pusat data SMX01.

“Total capex untuk proyek tersebut adalah sekitar Rp4,9 triliun,” tulisnya dalam jawab tertulis kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (12/8).

Lebih terperinci, David dan Mona memberitakan sumber

pendanaan untuk proyek itu. “Pendanaan untuk proyek ini berasal dari kombinasi sebagian dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 dan pinjaman dari bank.”

Berdasarkan data BEI, Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 diterbitkan senilai Rp1,5 triliun dan dicatatkan pada 6 Juni 2024.

Berdasarkan *feasibility study* DSSA, proyek pusat data di Jakarta dinilai merupakan investasi yang menarik dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan pusat data, dampak limpahan dari pasar regional, konsentrasi geografis dan peluang diversifikasi lokasi, serta profil imbal hasil yang kompetitif dan menarik. (Ana Noviani)

ESG Initiatives

Pijakan Kuat Energi Hijau MEDC

Akbar Maulana & Iim F. Timorria
redaksi@bisnis.com

Emiten energi dan migas keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), bersiasat menjaga performa meski harga minyak dunia melanjutkan tren pendinginan. Lini bisnis listrik berbasis sumber terbarukan menjadi salah satu penopangnya. Melemahnya harga minyak global telah berdampak signifikan pada kinerja MEDC pada paruh pertama 2025, tecermin dari laba bersih perusahaan yang anjlok 81,52% (*year-on-year/YoY*) menjadi US\$37,36 juta, dari US\$202,27 juta pada semester I/2024.

Penurunan laba tersebut sejalan dengan performa pendapatan perusahaan yang terkoreksi 2,3% secara tahunan menjadi US\$1,13 miliar, seiring dengan harga realisasi minyak yang turun 14% YoY menjadi US\$69,5 per barel.

Di tengah torehan tersebut, MEDC melaporkan telah menghabiskan belanja modal (*capital expenditure/capex*) senilai US\$193 juta sepanjang semester I/2025. Mayoritas capex dipakai untuk proyek migas, mengingat alokasi anggaran tahun ini menembus US\$400 juta.

Akan tetapi, hal itu tak lantas membuat lini produksi listrik luput dari perhatian. MEDC secara spesifik menyiapkan capex sebesar US\$30 juta untuk produksi listrik, termasuk dari sumber hijau.

“Belanja modal sebesar US\$193 juta sebagian besar digunakan untuk pengeboran di Blok 60 Oman, proyek pengembangan di Blok B Laut Natuna Selatan dan Blok Corridor, serta untuk penyelesaian proyek Ijen Geothermal Tahap-1 dan PLTS [pembangkit listrik

tenaga surya] Bali Timur di Medco Power,” tulis manajemen Medco.

Dengan demikian, Medco masih menyisakan anggaran capex senilai US\$237 juta untuk dibelanjakan pada semester II/2025.

MEDC menargetkan penjualan ketenagalistrikan sebesar 4.000 gigawatt *hours* (GWh) sepanjang 2025. Adapun, realisasi penjualan pada semester I/2025 mencapai 1.994 GWh, lebih rendah dibandingkan dengan 2.003 GWh pada semester I/2024.

“Kontraksi ini disebabkan oleh pemeliharaan terjadwal di PLTGU [pembangkit listrik tenaga gas dan uap] Riau, gempa bumi di dekat fasilitas panas bumi Sarulla, serta banjir di PLTS Sumbawa,” tulis manajemen.

Akan tetapi, dampak dari kejadian-kejadian tersebut sebagian diimbangi oleh mulainya operasi proyek Ijen Geothermal Tahap 1 berkapasitas 35 megawatt (MW) pada Februari dan commissioning proyek PLTS Bali Timur (25 MWp) pada Juni.

CEO Medco Energi Roberto Lorato mengatakan kinerja semester pertama 2025 yang ditorehkan perusahaan masih menunjukkan ketahanan finansial, meskipun terjadi penurunan harga minyak yang signifikan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, operasional bisnis yang bertumpu pada sektor dengan jejak emisi tinggi ternyata turut menentukan arah komitmen lingkungan MEDC. Dalam laporan teranyar, perusahaan mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) dibandingkan dengan tahun dasar 2019.

Jumlah tersebut melampaui target perusahaan untuk 2025, yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara

dengan 20% dari total emisi tahun dasar 2019.

MedcoEnergi sendiri menargetkan netral karbon (*net zero emission*) Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060. Penurunan ditempuh dengan sejumlah upaya, seperti efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

Pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e. Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan *flare avoidance* (penghindaran gas suar) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

“Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan.

Pengurangan emisi juga diperoleh dari optimalisasi proses produksi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar gas dan pengurangan emisi gas metana. Di wilayah *offshore*, panel surya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi di beberapa anjungan di South Natuna Sea Block B dan Blok Sampang.

Penggunaan panel surya juga diterapkan pada operasi aset *onshore* di Indonesia. Konversi penggunaan genset ke sistem kelistrikan dilakukan di Oman, Grati Facilities (Jawa Timur), dan Rawa Gas Plant (Sumatra Selatan). Selain itu penggunaan biodiesel telah diimplementasikan untuk kapal suplai di Thailand.

| ASET KEUANGAN DIGITAL |

Pedoman Keamanan Kripto Cs Diluncurkan

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dokumen Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) di Indonesia. Pedoman ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) dari penyelenggara perdagangan aset keuangan digital seperti kripto hingga *non-fungible tokens* (NFT) mengenai keamanan siber dalam rangka memperkuat integritas serta ketahanan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang kian dinamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan pedoman ini merupakan perluasan dari Pedoman Keaman

manan Siber khusus bagi penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang diterbitkan OJK tahun lalu.

“Kami memperluas pedoman tersebut untuk penyelenggara perdagangan di ekosistem aset keuangan digital nasional. Pedoman ini berangkat dari pemahaman akan urgensi memperkuat integritas dan ketahanan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang kian dinamis,” kata Hasan, Rabu (13/8).

Intinya, pedoman ini menekankan pentingnya keamanan siber serta membangun sistem informasi yang aman dan perlindungan yang adaptif, tangguh, dan visioner dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Pedoman penyelenggara perdagangan AKD juga me

rupakan bentuk implementasi dari UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan mandat bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor IAKD mulai Januari 2025.

Hasan mengatakan pedoman ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing industri aset keuangan digital Indonesia di kancah global.

“Diharapkan agar pedoman ini dapat menjadi rujukan strategis dalam membangun ekosistem perdagangan aset digital yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi Indonesia,” pungkasnya. (*Akbar Maulana al Ishaqi*)

■ HARGA EMAS TURUN



Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Rabu (13/8). Harga emas yang dijual di Pegadaian mengalami penurunan dari angka Rp1.924.000 menjadi Rp1.908.000 per gram, begitu pula emas Antam turut turun ke angka Rp1.992.000 dari awalnya Rp2.014.000 per gram.

| KOMODITAS FOSIL |

PELUANG BATU BARA DI TENGAH TEKANAN BIAYA

Bisnis, JAKARTA — Ekspor batu bara Indonesia berpotensi meningkat terutama ke China pada paruh kedua meski industri menghadapi tekanan biaya produksi yang kian tinggi sepanjang 2025.

Rayful Mudassir
rayful.mudassir@bisnis.com

Ekspor batu bara ke China menghadapi tekanan sepanjang semester I/2025. Laporan Badan Pusat Statistik mendapati bahwa pengapalan emas hitam RI ke negara itu hanya menyentuh 86,69 juta ton.

Realisasi itu turun sekitar 20,80% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya di level 109,46 juta ton. Meski demikian, ekspor ke negara itu mengalami peningkatan pada awal paruh kedua tahun ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan bahwa pengiriman batu bara Indonesia ke Beijing mengalami peningkatan 43% secara bulanan pada Juli menjadi 15,83 juta ton.

Pertumbuhan ini didorong oleh harga batu bara kalori rendah dan menengah yang kompetitif serta suhu udara tinggi yang meningkatkan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan di negara itu.

“Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan ekspor ke China jika dapat terus menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas produk yang sesuai kebutuhan pasar,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (13/8).

Pada enam bulan pertama tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi produksi emas hitam mencapai 357,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, 238 juta ton di antaranya merupakan ekspor dan sisanya 104,6 juta ton untuk dalam negeri berbalut *domestic market obligation* (DMO).

Pemerintah menargetkan produksi emas hitam dapat mencapai

739,7 juta ton hingga akhir tahun ini. Dari total itu, 239,7 juta ton untuk kebutuhan domestik dan 650 juta ton untuk ekspor.

Dari kacamata APBI, target produksi batu bara dapat saja tercapai hingga akhir tahun. Kendati demikian, target ekspor ditambah dengan DMO diproyeksi cenderung menjadi pada kisaran 450—510 juta ton.

Gita menyebutkan bahwa kondisi ini akan bergantung pada bagaimana Indonesia dapat berkompetisi dari sisi biaya produksi yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi.

“Yang perlu dilihat saat ini juga dengan tidak adanya subsidi biodiesel menyebabkan kenaikan *cost* yang semakin tinggi dan menggerus laba perusahaan dan juga akan mempengaruhi penerimaan negara dari pajak yang turun,” katanya.

Pemerintah sejatinya telah menetapkan mandatori penggunaan B40 sejak 1 Januari 2025. Aturan ini mewajibkan industri baik PSO maupun non-PSO pengguna bahan bakar solar mengonsumsi bahan bakar nabati tersebut.

Bila sektor PSO mendapat harga subsidi dari pemerintah, industri non-PSO seperti sektor pertambangan, manufaktur, perkebunan hingga transportasi dan logistik harus menyerap BBN dengan harga non-subsidi.

Kondisi ini dinilai memberatkan sektor industri. Terlebih harga bahan bakar ini tidak sama di setiap daerah. Hal ini memicu pembengkakan biaya operasional industri.

Di sektor pertambangan misalnya, APBI memprakirakan minyak nabati itu berkontribusi sekitar

30% dari total biaya operasional. Tekanan biaya operasional ini berlangsung di tengah penurunan permintaan dan harga emas hitam.

“Jadi perlu dipertimbangkan agar industri ini tetap kompetitif. Kami tidak menentang penggunaan B40, namun terkait subsidi FAME kami berharap dapat dikembalikan seperti semula,” katanya.

HARGA BATU BARA

Di sisi lain, harga batu bara masih berada di level rendah sepanjang tahun ini. Emas hitam di bursa ICE Newcastle diperdagangkan pada level US\$113 per ton untuk kontrak Oktober. Sedangkan kontrak September dilego senilai US\$111,60 per ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti kondisi harga batu bara yang saat ini mengalami penurunan dikisaran 25%-30% yang dipicu permintaan dan pasokan global. Dalam kondisi ini, dia mengakui bahwa Indonesia banyak terpengaruh.

“Sebenarnya agak lucu memang Indonesia sebagai eksportir batu bara untuk listrik 45% untuk dunia, begitu harga turun kita tidak bisa apa-apa, kita permintaan dikit tapi produksi banyak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa ke depannya ESDM akan melakukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara sesuai arahan dari DPR RI dengan tujuan untuk menjaga stabilitas.

“Kalau kita harga bagus berarti negara akan mendapatkan pajak yang baik, pengusaha kana mendapatkan keuntungan yang baik,” tuturnya.

“**Dengan tidak adanya subsidi biodiesel menyebabkan kenaikan *cost* yang semakin tinggi dan menggerus laba perusahaan dan juga akan mempengaruhi penerimaan negara dari pajak yang turun.**”

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa batu bara harus dikelola dengan hati-hati di tengah harga yang kurang bagus.

Sebagaimana diketahui, batu bara yang beredar di perdagangan di dunia 1,3 miliar ton, sementara total kebutuhan batu bara dunia 8,9 miliar ton.

Adapun, dari 1,3 miliar ton Indonesia melakukan ekspor berdasarkan 2024 ke bawah 600-650 juta ton. “Ini gara-gara RKAB 3 tahun, akhirnya harga turun kita tidak bisa mengendalikan, ini bicara *supply and demand*,” jelasnya.

Sementara itu, harga emas hitam untuk pembangkit listrik di China telah naik ke level tertinggi sejak Maret 2025. Kondisi ini terjadi karena hujan lebat di area pertambangan yang mengganggu produksi.

Padahal saat ini panas terik di kota-kota meningkatkan permintaan energi untuk pendingin.

Harga spot di Qinhuangdao, patokan negara itu, naik menjadi 678 yuan (US\$94) per ton pada pekan ini, tertinggi sejak 17 Maret, menurut China Coal Resource. Berdasarkan *Bloomberg*, harga telah naik 11% sejak titik terendah empat tahun terakhir pada Juni.

Kenaikan harga di pasar ini menyusul hujan lebat dan inspeksi yang menargetkan kelebihan produksi di wilayah pertambangan, yang telah menekan *output*.

Sementara itu, permintaan listrik melonjak karena orang-orang menyalakan AC. Konsumsi batu bara termal di 25 provinsi naik ke level tertinggi setidaknya dalam lima tahun pada 6 Agustus, menurut analis Morgan Stanley, termasuk Hannah Yang, dalam sebuah catatan riset pada hari Senin.

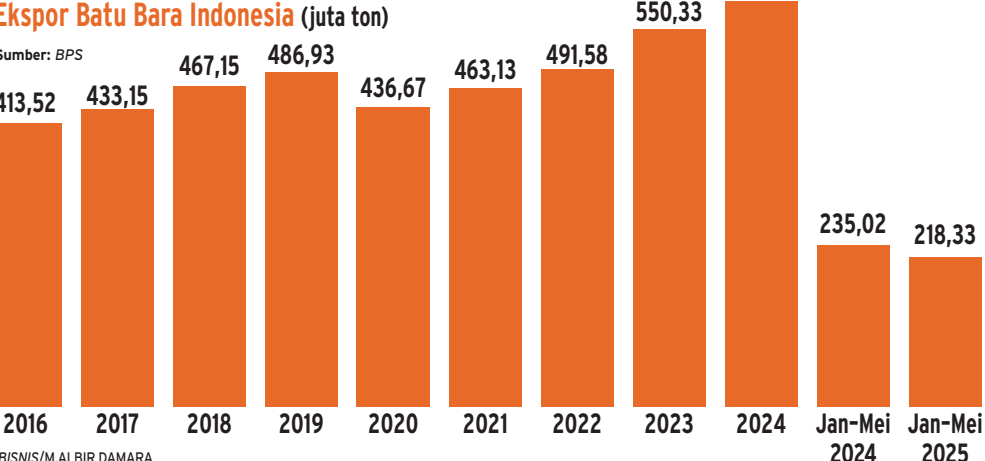
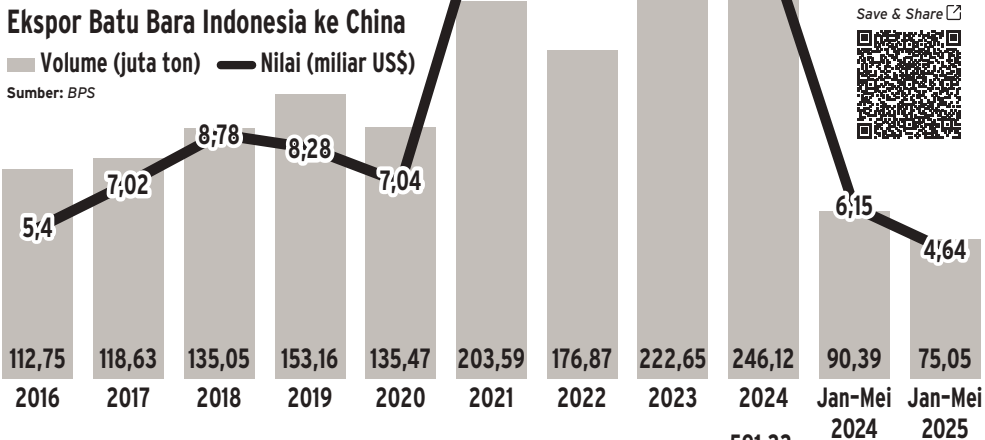
“Kami memperkirakan harga batu bara akan melanjutkan tren kenaikan ini dalam waktu dekat, tetapi kemungkinan akan mulai terkoreksi pada akhir Agustus,” ujar Yang seperti laporan *Bloomberg*.

Peningkatan harga musiman ini mungkin bermanfaat bagi pemerintah, yang sedang berupaya meredam tekanan deflasi dalam perekonomian. Namun demikian, setelah suhu mulai mendingin, permintaan batu bara kemungkinan akan kembali tertekan.

Pengapalan emas hitam RI ke China hanya menyentuh 86,69 juta ton pada paruh pertama, turun 20,80% YoY.

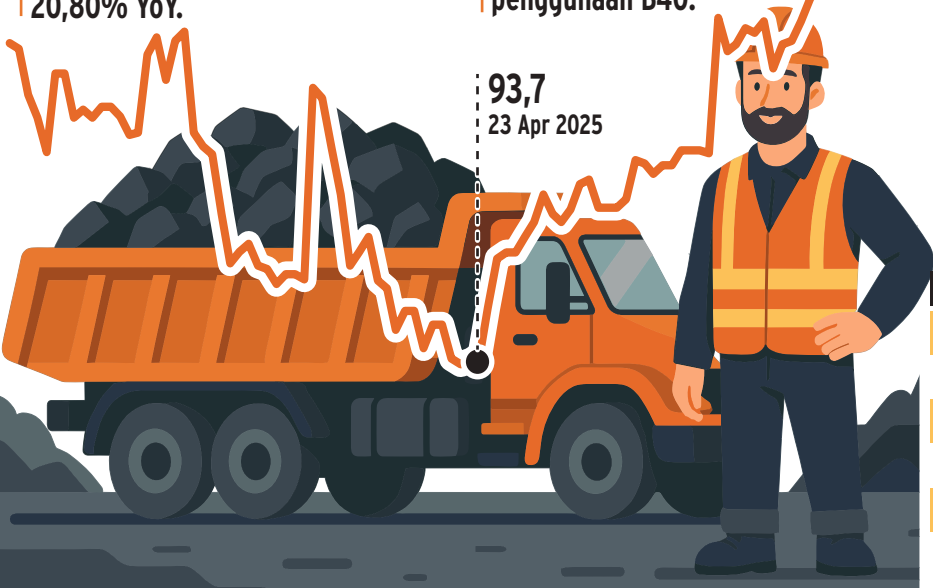
Ekspor paruh kedua ke China meningkat pada awal semester II/2025.

Industri hadapi tekanan biaya operasional dari mandatori penggunaan B40.



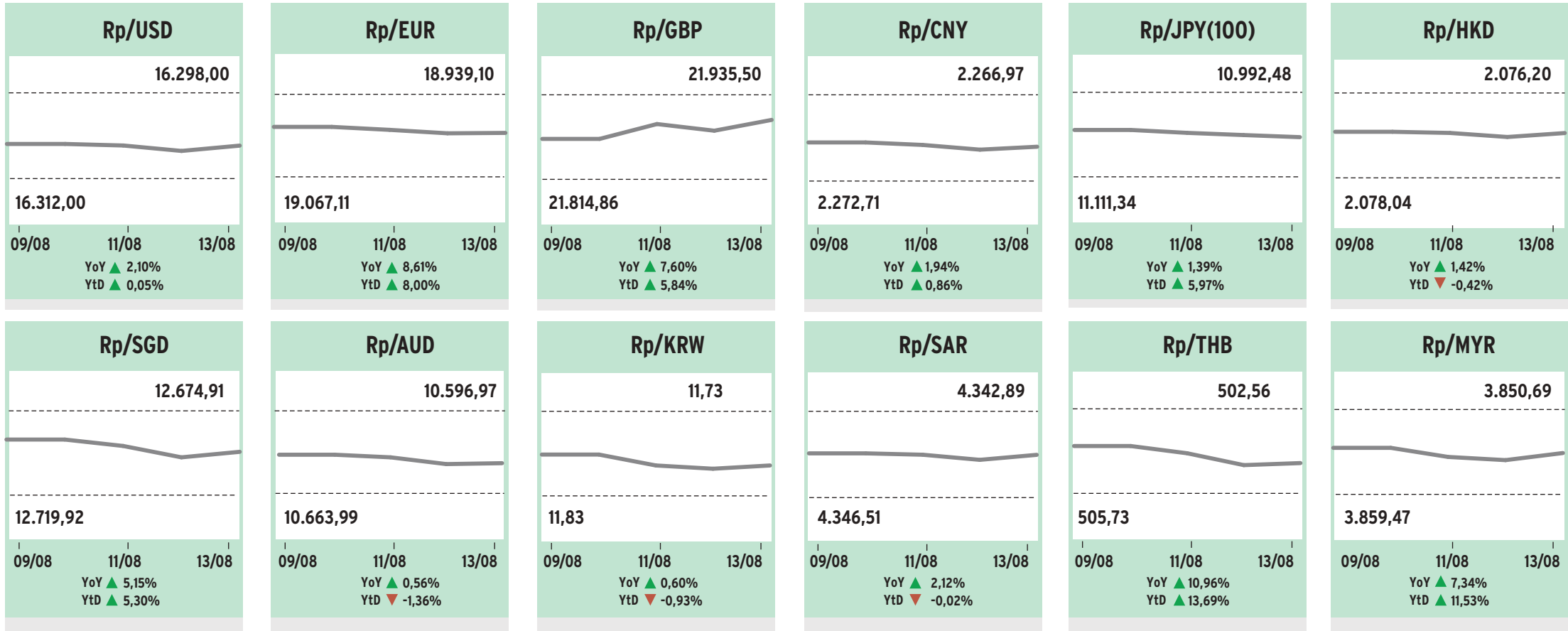
Tahun	Realisasi
2019	Rp45 triliun
2020	Rp35 triliun
2021	Rp75 triliun
2022	Rp180,4 triliun
2023	Rp172,1 triliun
2024	Rp140,5 triliun

Sumber: Kementerian ESDM





NILAI TUKAR



SUKU BUNGA

SUKU BUNGA DASAR KREDIT						
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) beberapa bank di Indonesia pada 13 Agustus 2025 (% per tahun).						
No	Bank	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi KPR Non-KPR	Mulai Berlaku
	Bank ANZ Indonesia	6,93	-	-	-	31 Juli 2025
	Bank Bumi Arta Tbk	8,58	8,64	13,86	8,29 13,52	05 Agustus 2025
	Bank Central Asia Tbk	7,82	8,23	8,29	9,39 7,65	31 Juli 2025
	Bank CIMB Niaga Tbk	8,25	9,00	-	8,70 12,11	31 Juli 2025
	Bank CTBC Indonesia	8,75	-	-	- 17,50	01 Agustus 2025
	Bank Danamon Tbk	8,50	9,00	-	8,00 9,25	01 Agustus 2025
	Bank DBS Indonesia	8,33	-	-	- 14,07	04 Agustus 2025
	Bank DKI	7,75	7,75	12,29	9,65 9,80	07 Agustus 2025
	Bank HSBC Indonesia	6,81	-	-	8,10 16,00	28 Juli 2025
	Bank ICBC Indonesia	8,77	9,77	-	9,77 9,77	31 Juli 2025
	Bank J Trust Indonesia Tbk	11,75	12,75	12,75	11,75 12,50	01 Agustus 2025
	Bank Jago, Tbk	7,86	8,17	9,48	- 11,51	01 Agustus 2025
	Bank Saqui Indonesia	7,75	9,00	-	9,00 9,00	31 Juli 2025
	Bank KB Bukopin Tbk	9,17	9,31	9,31	9,72 9,72	08 Agustus 2025
	Bank Maluku Malut	8,28	-	9,57	- 11,14	01 Juli 2025
	Bank Mandiri Tbk	8,50	-	13,50	12,50 12,00	31 Juli 2025
	Bank Mayapada Internasional Tbk	11,20	11,20	14,40	11,70 14,10	31 Juli 2025
	Bank Mizuho Indonesia	6,18	-	-	- -	30 Juni 2025
	Bank Multiarta Sentosa	7,50	7,50	8,00	6,00 6,00	31 Juli 2025
	Bank Negara Indonesia Tbk	8,57	8,77	11,77	9,14 10,39	07 Agustus 2025
	Bank OCBC NISP Tbk	8,25	9,00	12,50	8,50 15,50	26 Juli 2025
	Bank of China Limited	5,98	-	-	- -	31 Juli 2025
	Bank Panin Tbk	8,77	9,06	9,56	8,56 8,51	31 Juli 2025
	Bank Permata Tbk	7,84	8,00	8,75	9,00 18,00	01 Agustus 2025
	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,50	-	14,00	10,00 9,30	01 Agustus 2025
	Bank Seabank Indonesia	12,01	12,01	12,01	12,01 12,01	01 Juli 2025
	Bank Sinarmas Tbk	10,03	9,14	11,21	7,77 10,27	01 Agustus 2025
	Bank SMBC Indonesia Tbk	7,95	9,68	11,78	- 12,40	30 Juni 2025
	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8,76	10,70	13,75	8,04 10,80	01 Agustus 2025
	Bank UOB Indonesia	8,25	9,00	-	9,38 16,75	01 Agustus 2025
	BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	7,12	9,31	12,29	9,84 10,06	08 Agustus 2025
	BPD Jawa Tengah	11,78	11,78	11,51	11,33 11,06	31 Juli 2025
	BPD Jawa Timur Tbk	7,06	7,63	12,14	8,84 8,83	22 Juli 2025
	BPD Kalimantan Barat	6,53	-	10,35	9,63 9,03	31 Juli 2025
	BPD Kalimantan Timur dan Utara	6,65	-	12,36	8,07 7,68	31 Juli 2025
	BPD Nusa Tenggara Timur	10,66	-	12,02	10,34 10,90	01 Juni 2025
	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	7,52	-	10,15	11,68 9,92	31 Juli 2025
	BPD Sulawesi Utara Gorontalo	11,27	-	11,27	9,60 13,12	06 Agustus 2025
	BPD Sumatera Utara	7,37	10,83	12,29	9,48 10,23	16 Juli 2025
	Citibank	5,75	-	-	- -	31 Mei 2025
	Standard Chartered Bank Indonesia	7,03	-	-	- 12,18	01 Juni 2025
Keterangan: Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.						
Bagi bank yang ingin menampilkan SBDK dapat mengirimkan data ke : Email: datatabel@bisnis.com , datatabel@gmail.com .						

SUKU BUNGA DEPOSITO							
Tingkat suku bunga deposito berjangka Rp/US\$ pada 13 Agustus 2025 (% per tahun).							
Nama bank	Saldo	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Tgl Berlaku	
Bank Central Asia Tbk.	< Rp10 jt.	2,75	2,75	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 10 jt s/d < Rp 100 jt.	2,75	2,75	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 100 jt s/d < Rp 500 jt.	2,75	2,75	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 500 jt s/d < Rp 2 M.	2,75	2,75	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 2 M s/d < Rp 5 M.	3,15	3,00	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 5 M s/d < Rp 10 M.	3,25	3,00	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 10 M s/d < Rp 25 M.	3,25	3,00	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 25 M s/d < Rp 100 M.	3,25	3,00	2,75	2,50	21/7/2025	
	≥ Rp 100 M.	3,25	3,00	2,75	2,50	21/7/2025	
	< USD 150 ribu.	2,00	2,00	1,50	1,50	1/12/2023	
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	≥ USD 150 ribu s/d < USD 1 jt.	2,25	2,25	2,00	2,00	1/12/2023	
	≥ USD 1 jt s/d < USD 10 jt.	2,25	2,25	2,25	2,25	1/12/2023	
	≥ USD 10 jt.	2,25	2,25	2,25	2,25	1/12/2023	
	< Rp 100 jt.	2,25	2,25	2,50	2,50	15/7/2025	
	≥ Rp 100 jt s/d < Rp 1 M.	2,25	2,25	2,50	2,50	15/7/2025	
	≥ Rp 1 M s/d < Rp 2 M.	2,25	2,25	2,50	2,50	15/7/2025	
	≥ Rp 2 M s/d < Rp 5 M.	2,25	2,25	2,50	2,50	15/7/2025	
	≥ Rp 5 M.	2,25	2,25	2,50	2,50	15/7/2025	
	≤ USD 100 ribu.	0,75	0,75	0,75	0,75	15/7/2025	
	≥ USD 100 ribu s/d < USD 1 jt.	1,00	1,25	1,25	1,25	15/7/2025	
Bank Sahabat Sampoerna.	≥ USD 1 jt s/d < USD 10 jt.	1,00	1,50	1,50	1,50	15/7/2025	
	≥ USD 10 jt.	1,00	1,75	1,75	1,75	15/7/2025	
	< Rp100 jt.	1,50	2,00	2,50	2,50	31/7/2025	
	≥ Rp 100 jt s/d < Rp 500 jt.	3,00	3,00	3,00	3,00	31/7/2025	
	≤ Rp 500 jt s/d < Rp 1 M.	3,50	3,75	4,00	4,25	31/7/2025	
	≥ Rp 1 M s/d < Rp 5 M.	4,25	4,50	4,75	5,00	31/7/2025	
	≥ Rp 5 M s/d < Rp 25 M.	4,50	4,75	5,00	5,25	31/7/2025	
	≥ Rp 25 M.	4,50	4,75	5,00	5,25	31/7/2025	
Nama bank	Valuta	Saldo	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Tgl Berlaku
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	SGD	1.000	0,25	0,25	0,25	0,50	15/7/2025
	SGD	> 10.000	0,50	0,50	0,50	0,75	15/7/2025
	SGD	≥ 50.000	0,75	0,75	0,75	1,00	15/7/2025
	SGD	≥ 100.000	0,75	0,75	0,75	1,00	15/7/2025
	AUD	2.000	0,50	0,50	0,50	0,50	15/7/2025
	GBP	1.000	0,10	0,10	0,10	0,10	15/7/2025
	CNY	7.000	0,50	0,50	0,75	1,00	15/7/2025
	EUR	1.000	1,40	1,40	1,40	1,40	28/07/2025
	SGD	2.000	1,10	1,10	1,10	1,10	28/07/2025
	AUD	2.000	2,25	2,25	2,25	2,25	21/04/2025
Bank Central Asia Tbk.	HKD	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	28/07/2025
	GBP	1.000	2,25	2,25	2,25	2,25	21/04/2025
	CNY	7.000	0,50	0,50	0,50	0,50	16/08/2024
	AUD	5.000	0,10	0,10	0,10	0,10	01/02/2025
	SGD	2.000	1,00	1,00	1,00	1,00	01/02/2025
	GBP	5.000	0,10	0,10	0,10	0,10	01/02/2025
	JPY	100.000	0,00	0,10	0,10	0,10	01/02/2025
	CNH	5.000	0,10	0,50	0,75	0,75	01/02/2025
	SGD	≥ 1.000	0,25	0,25	0,25	0,25	30/11/2023
	CNH	≥ 5.000	0,10	0,25	0,25	0,25	30/11/2023
Bank Maybank Indonesia Tbk.	CNH	≥ 50.000	0,10	0,25	0,25	0,25	30/11/2023
Penjaminan LPS 1 Juni 2025 s/d 30 September 2025 (Dalam %)							
Rupiah							4,00
Dolar AS							2,25
BPR (Rp)							6,50

SUKU BUNGA ANTARBANK					
Sukubunga antarbank di Jakarta (<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>) pada 13 Agustus 2025.					
JIBOR Rp (Ringkasan)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
Suku Bunga Rata-Rata (%)	5,42077	5,86410	6,16539	6,25385	6,43846
Suku Bunga Tertinggi (%)	5,50000	5,95000	6,20000	6,30000	6,50000
Suku Bunga Terendah (%)	5,35000	5,78333	6,10000	6,20000	6,35000
JIBOR Rp (Kuotasi Individu Offer Rate)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	5,45000	5,85000	6,15000	6,20000	6,40000
Bank Central Asia, Tbk.	5,35000	5,75000	6,10000	6,20000	6,35000
Bank CIMB Niaga, Tbk.	5,40000	5,85000	6,15000	6,25000	6,40000
Bank Danamon Indonesia, Tbk.	5,35000	5,85000	6,10000	6,20000	6,35000
Bank HSBC Indonesia	5,40000	5,85000	6,20000	6,25000	6,45000
Bank Mandiri (Persero), Tbk	5,50000	5,85000	6,20000	6,30000	6,45000
Bank Mega, Tbk	5,55000	5,95000	6,20000	6,25000	6,45000
Bank Mizuho Indonesia	5,50000	5,90000	6,20000	6,30000	6,50000
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	5,75000	6,15000	6,50000	6,60000	6,80000
Bank OCBC NISP, Tbk	5,40000	5,85000	6,15000	6,25000	6,45000
PAN Indonesia Bank, Tbk	5,37000	5,70000	6,00000	6,20000	6,30000
Bank Permata, Tbk.	5,40000	5,85000	6,15000	6,25000	6,45000
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	5,50000	5,90000	6,20000	6,30000	6,50000
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	5,50000	5,90000	6,20000	6,30000	6,50000
Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	5,35000	5,85000	6,15000	6,25000	6,45000
Bank SMCB Indonesia Tbk.	5,30000	5,95000	6,20000	6,30000	6,50000
Standard Chartered Bank	5,33750	5,78333	6,08333	6,13333	6,26667
JIBID Rp (Kuotasi Individu Bid Rate)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	5,35000	5,65000	5,95000	6,00000	6,20000
Bank Central Asia, Tbk.	5,25000	5,55000	5,90000	6,00000	6,15000
Bank CIMB Niaga, Tbk	5,30000	5,65000	5,95000	6,05000	6,20000

DATA REKSADANA

20 REKSADANA PENDAPATAN TETAP TERTINGGI				
NAMA REKSADANA	NAB/UNIT (12/8/25)	HASIL INVESTASI		
		30 HR	1 THN	RIIL 1 THN
Reksa Dana Dana Obligasi Stabil.....	6.869,30.....	0,96.....	7,52.....	5,39.....
Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II.....	3.716,56.....	1,25.....	7,97.....	5,83.....
Reksa Dana MNC Dana Syariah.....	3.706,89.....	0,60.....	7,07.....	7,07.....
Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II.....	3.542,69.....	1,10.....	6,41.....	4,30.....
Reksa Dana MNC Dana Likuid.....	3.406,72.....	0,68.....	7,40.....	7,40.....
Reksa Dana INAMI Indah Pendapatan Tetap Nusantara.....	3.256,36.....	0,95.....	6,25.....	4,67.....
Reksa Dana Net Dana Gemilang.....	3.208,16.....	0,90.....	5,15.....	5,15.....
Reksa Dana BRI Gebyar Indonesia II.....	3.062,15.....	1,18.....	6,81.....	4,69.....
Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II.....	3.020,33.....	1,15.....	6,37.....	4,26.....
Reksa Dana INAMI Tracker Obligasi Nusantara.....	2.962,97.....	0,91.....	6,07.....	4,48.....
Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas A.....	2.959,04.....	0,89.....	4,91.....	2,83.....
Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara.....	2.932,47.....	1,32.....	7,45.....	7,45.....
Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund.....	2.647,14.....	1,02.....	5,75.....	1,64.....
Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund.....	2.420,33.....	1,30.....	9,08.....	9,08.....
Batavia Dana Obligasi Optimal.....	2.180,66.....	0,80.....	6,92.....	0,69.....
Reksa Dana INAMI Bond Fund.....	2.146,92.....	-3,16.....	9,65.....	5,35.....
Reksa Dana Mandiri Obligasi Optima.....	2.044,45.....	0,78.....	6,80.....	0,58.....
Reksa Dana Reliance Dana Terencana.....	2.032,58.....	1,84.....	7,74.....	4,06.....
Reksa Dana Capital Fixed Income Fund.....	1.958,89.....	1,11.....	8,72.....	8,72.....
Reksa Dana SAM Dana Obligasi.....	1.915,88.....	0,00.....	0,00.....	0,00.....

20 REKSADANA CAMPURAN TERTINGGI				
NAMA REKSADANA	NAB/UNIT (12/8/25)	HASIL INVESTASI		
		30 HR	1 THN	RIIL 1 THN
Reksa Dana Semesta Dana Maxima.....	9.394,61.....	2,93.....	2,85.....	2,85.....
Reksa Dana Panin Dana Unggulan.....	9.135,70.....	4,09.....	4,04.....	-0,96.....
Reksa Dana Garuda Satu.....	5.601,80.....	1,83.....	4,23.....	4,23.....
Reksa Dana PNM Syariah.....	3.032,09.....	2,91.....	8,40.....	5,24.....
Reksa Dana INAMI BUMN Campuran.....	2.517,10.....	1,05.....	1,78.....	0,77.....
Reksa Dana Minna Padi Keratan Balance.....	2.407,80.....	3,28.....	24,76.....	22,91.....
Phillip Rupiah Balanced Fund.....	2.347,11.....	2,10.....	-3,91.....	-7,66.....
Reksa Dana Shinhan Balance Fund.....	2.338,46.....	0,82.....	4,79.....	0,68.....
Reksa Dana HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A.....	2.241,53.....	6,25.....	16,83.....	8,81.....
Reksa Dana HPAM Premium 1.....	2.073,10.....	3,06.....	12,65.....	9,30.....
Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A.....	1.959,34.....	4,44.....	14,27.....	9,79.....
Reksa Dana Prima.....	1.852,76.....	2,65.....	6,40.....	5,33.....
Reksa Dana Cipta Syariah Balance.....	1.796,50.....	1,36.....	2,98.....	2,98.....
Reksa Dana INAMI Balanced Fund.....	1.767,74.....	0,16.....	-5,56.....	-9,26.....
Reksa Dana Net Dana Berimbang.....	1.754,99.....	0,31.....	13,53.....	13,53.....
Reksa Dana Insight Bright.....	1.740,94.....	6,29.....	10,02.....	10,02.....
Reksa Dana Setiabudi Dana Campuran.....	1.563,78.....	4,78.....	7,91.....	7,91.....
Reksa Dana BNI AM UGM Progressive Balanced.....	1.562,05.....	1,56.....	4,99.....	0,87.....
Reksa Dana Net Dana Flexi.....	1.558,34.....	2,12.....	16,16.....	13,86.....
Reksa Dana Panin Dana Bersama Plus.....	1.499,31.....	1,00.....	-1,42.....	-6,16.....

DATA SAHAM

Data Saham pada Rabu, 13 Agustus 2025.

25 SAHAM KENAIKAN HARGA TERTINGGI						
Kode	Emiten	Sebelum	Penutupan	Persen	Volume	Nilai
BELL.....	Trisula Textile Industries Tbk.....	52.....	70.....	34,62.....	360.279.800.....	23.329.339.200.....
GRPH.....	Griptha Putra Persada Tbk.....	67.....	90.....	34,33.....	129.785.200.....	11.199.891.700.....
KAQI.....	Jantra Grupo Indonesia Tbk.....	50.....	67.....	34,00.....	458.875.300.....	29.191.309.700.....
NTBK.....	Nusatama Berkah Tbk.....	50.....	67.....	34,00.....	492.418.800.....	30.560.886.500.....
SLIS.....	Gaya Abadi Sempurna Tbk.....	56.....	75.....	33,93.....	461.389.100.....	31.964.374.100.....
PNSE.....	Pudjiadi & Sons Tbk.....	700.....	875.....	25,00.....	545.600.....	455.338.500.....
UANG.....	Pakuan Tbk.....	272.....	340.....	25,00.....	2.838.200.....	929.828.000.....
DKHH.....	Cipta Sarana Medika Tbk.....	105.....	131.....	24,76.....	1.198.048.700.....	148.131.255.400.....
GEMA.....	Gema Grahasarana Tbk.....	100.....	124.....	24,00.....	192.828.700.....	23.593.075.200.....
CRSN.....	Carsurin Tbk.....	114.....	136.....	19,30.....	100.926.300.....	13.362.426.000.....
BTEK.....	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.....	6.....	7.....	16,67.....	318.458.300.....	1.980.104.900.....
MTFN.....	Capitalinc Investment Tbk.....	6.....	7.....	16,67.....	39.010.000.....	273.070.000.....
LIFE.....	MSGIG Life Insurance Indonesia Tbk.....	7.075.....	8.250.....	16,61.....	40.000.....	319.142.500.....
IKAN.....	Era Mandiri Cemerlang Tbk.....	128.....	147.....	14,84.....	590.307.900.....	86.503.592.900.....
NPGF.....	Nusa Palapa Gemilang Tbk.....	50.....	57.....	14,00.....	244.245.600.....	14.377.004.600.....
LAJU.....	Jasa Berdikari Logistics Tbk.....	51.....	58.....	13,73.....	318.543.100.....	18.760.039.500.....
TAYS.....	Jaya Swarasa Agung Tbk.....	52.....	59.....	13,46.....	189.317.900.....	11.379.989.100.....
FUTR.....	Futura Energi Global Tbk.....	140.....	158.....	12,86.....	886.087.700.....	145.127.606.600.....
JGLE.....	Graha Andrasentra Propertindo Tbk.....	8.....	9.....	12,50.....	51.609.200.....	464.482.800.....
MAXI.....	Maxindo Karya Anugerah Tbk.....	50.....	56.....	12,00.....	179.036.600.....	10.677.122.100.....
AREA.....	Dunia Virtual Online Tbk.....	470.....	525.....	11,70.....	8.821.700.....	4.585.885.600.....
INRU.....	Toba Pulp Lestari Tbk.....	830.....	925.....	11,45.....	1.809.200.....	1.733.938.500.....
PPRE.....	PP Presisi Tbk.....	106.....	118.....	11,32.....	312.759.500.....	39.547.491.100.....
ATLA.....	Atlantis Subsea Indonesia Tbk.....	50.....	55.....	10,00.....	1.323.725.100.....	74.062.834.500.....
DCII.....	DCI Indonesia Tbk.....	278.250.....	306.075.....	10,00.....	16.500.....	5.050.237.500.....

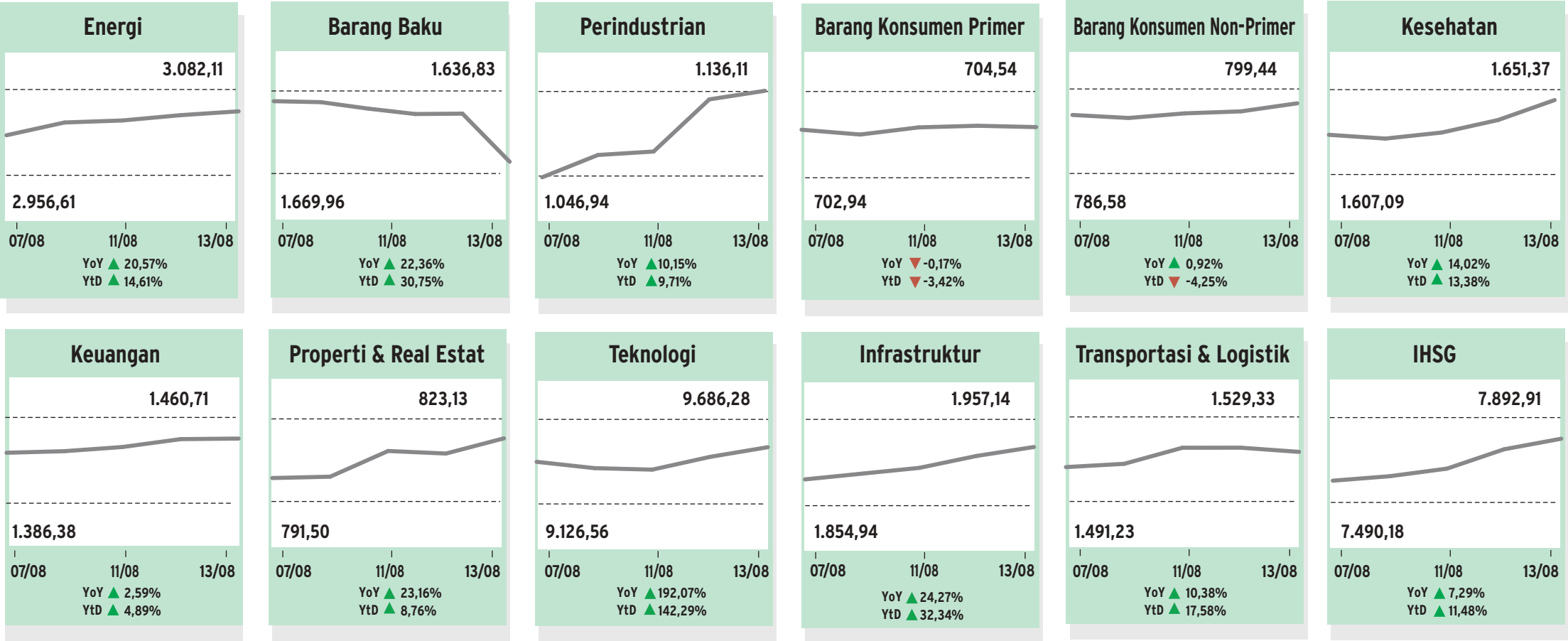
25 SAHAM TERAKTIF						
Kode	Emiten	Sebelum	Penutupan	Frekuensi	Volume	Nilai
CDIA.....	Chandra Daya Investasi Tbk.....	1.550.....	1.675.....	64.356.....	341.197.500.....	546.835.153.000.....
CUAN.....	Petrindo Jaya Kreasi Tbk.....	1.575.....	1.625.....	58.439.....	399.438.600.....	645.864.471.500.....
DKHH.....	Cipta Sarana Medika Tbk.....	105.....	131.....	54.367.....	1.198.048.700.....	148.131.255.400.....
TLKM.....	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.....	3.180.....	3.360.....	52.556.....	465.722.400.....	1.562.080.839.000.....
BBRI.....	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	4.050.....	4.080.....	49.471.....	292.104.000.....	1.183.586.832.000.....
RAJA.....	Rukun Raharja Tbk.....	3.080.....	2.970.....	47.134.....	169.555.200.....	529.543.369.000.....
FUTR.....	Futura Energi Global Tbk.....	140.....	158.....	45.499.....	886.087.700.....	145.127.606.600.....
IKAN.....	Era Mandiri Cemerlang Tbk.....	128.....	147.....	41.702.....	590.307.900.....	86.503.592.900.....
ATLA.....	Atlantis Subsea Indonesia Tbk.....	50.....	55.....	35.146.....	1.323.725.100.....	74.062.834.500.....
PTRO.....	Petrosea Tbk.....	3.860.....	3.910.....	33.825.....	136.944.100.....	541.753.767.000.....
BBCA.....	Bank Central Asia Tbk.....	8.850.....	8.925.....	31.988.....	129.083.900.....	1.144.715.435.000.....
BMRI.....	Bank Mandiri (Persero) Tbk.....	4.910.....	4.870.....	28.261.....	180.844.900.....	884.571.323.000.....
BREN.....	Barito Renewables Energy Tbk.....	9.100.....	9.100.....	27.984.....	55.874.800.....	511.458.342.500.....
PGEO.....	Pertamina Geothermal Energy Tbk.....	1.580.....	1.525.....	27.795.....	141.200.300.....	217.716.416.500.....
WIRG.....	WIR ASIA Tbk.....	129.....	126.....	27.616.....	1.038.563.100.....	134.088.721.200.....
BRPT.....	Barito Pacific Tbk.....	2.340.....	2.320.....	26.334.....	110.670.200.....	259.680.598.000.....
ANTM.....	Aneka Tambang Tbk.....	2.900.....	2.910.....	26.330.....	112.931.000.....	329.249.028.000.....
CHEM.....	Chemstar Indonesia Tbk.....	105.....	106.....	25.009.....	465.411.100.....	50.936.241.100.....
BBYB.....	Bank Neo Commerce Tbk.....	352.....	344.....	23.554.....	414.053.200.....	147.616.963.200.....
COIN.....	Indokripto Koin Semesta Tbk.....	1.655.....	1.625.....	23.394.....	68.099.800.....	110.955.791.000.....
ASII.....	Astra International Tbk.....	4.990.....	5.175.....	22.719.....	103.458.500.....	533.910.972.500.....
AMMN.....	Amman Mineral Internasional Tbk.....	8.475.....	8.575.....	21.127.....	57.598.900.....	491.693.547.500.....
PPRE.....	PP Presisi Tbk.....	106.....	118.....	20.906.....	312.759.500.....	39.547.491.100.....
ADRO.....	Alamtri Resources Indonesia Tbk.....	1.860.....	1.830.....	20.754.....	72.682.400.....	135.012.891.000.....
TOBA.....	TBS Energi Utama Tbk.....	1.120.....	1.070.....	19.610.....	129.526.500.....	142.186.257.500.....

20 REKSADANA SAHAM TERTINGGI				
NAMA REKSADANA	NAB/UNIT (12/8/25)	HASIL INVESTASI		
		30 HR	1 THN	RIIL 1 THN
Reksa Dana Rencana Cerdas.....	16.841,34.....	3,07.....	-1,90.....	-1,90.....
Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1.....	3.423,91.....	15,30.....	19,04.....	19,04.....
Reksa Dana Panin Dana Prima.....	3.328,58.....	3,46.....	-5,04.....	-9,60.....
Reksa Dana Cipta Andalan Ekuitas.....	2.517,70.....	-1,60.....	-6,41.....	-6,41.....
Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah li.....	2.466,15.....	9,73.....	24,65.....	24,65.....
Reksa Dana Shinhan Equity Growth.....	2.434,09.....	2,04.....	1,09.....	-0,91.....
Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah.....	2.431,33.....	10,49.....	23,86.....	16,50.....
Reksa Dana MNC Dana Ekuitas.....	2.323,17.....	14,39.....	6,72.....	1,00.....
Reksa Dana Panin Dana Teladan.....	1.818,46.....	3,94.....	-5,55.....	-10,09.....
Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas.....	1.794,02.....	14,18.....	11,71.....	1,07.....
Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.....	1.659,87.....	10,64.....	9,81.....	4,43.....
Reksa Dana Cipta Syariah Equity.....	1.659,10.....	2,58.....	0,60.....	0,60.....
Reksa Dana INAMI Equity Fund.....	1.658,73.....	2,76.....	-0,72.....	-4,61.....
Reksa Dana Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh.....	1.410,17.....	8,53.....	6,42.....	0,28.....
Reksa Dana Panin Dana Ultima.....	1.224,55.....	3,72.....	-5,14.....	-9,70.....
Reksa Dana Danakita Saham Prioritas.....	1.149,43.....	2,97.....	-2,92.....	-2,92.....
Reksa Dana Pratama Dana Gemilang Saham.....	1.139,60.....	13,68.....	21,09.....	21,09.....
Reksa Dana Alpha Dana Ekuitas.....	1.127,77.....	4,28.....	9,79.....	9,79.....
Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah.....	1.110,43.....	8,58.....	18,66.....	14,05.....
Reksa Dana Syailendra Dana Ekuitas Sejahtera.....	1.104,28.....	3,32.....	-2,25.....	-2,25.....

20 REKSADANA PASAR UANG TERTINGGI				
NAMA REKSADANA	NAB/UNIT (12/8/25)	HASIL INVESTASI		
		30 HR	1 THN	RIIL 1 THN
Reksa Dana PNM Puas.....	4.708,36.....	0,43.....	5,47.....	5,47.....
Reksa Dana Pacific Money Market.....	4.219,65.....	0,56.....	5,63.....	5,63.....
Batavia Dana Kas Gebyar.....	3.985,05.....	0,44.....	5,33.....	5,33.....
Reksa Dana BNI AM Dana Pasar Uang Kemilau Kelas A.....	2.331,63.....	0,56.....	5,14.....	5,14.....
Reksa Dana BRI Gebyar Dana Likuid II.....	2.228,65.....	0,21.....	4,52.....	4,52.....
Reksa Dana Bahana Revolving Fund.....	2.022,39.....	0,44.....	5,33.....	5,33.....
Reksa Dana BNI AM Dana Likuid Kelas A.....	1.960,76.....	0,48.....	5,11.....	5,11.....
Reksa Dana Trim Kas 2 Kelas A.....	1.960,17.....	0,41.....	5,51.....	5,51.....
Reksa Dana MNC Dana Lancar.....	1.957,53.....	0,50.....	5,67.....	5,67.....
Reksa Dana INAMI Money Market Fund.....	1.896,24.....	0,41.....	5,23.....	5,23.....
Reksa Dana Panin Dana Likuid.....	1.833,97.....	0,55.....	5,30.....	5,30.....
Reksa Dana BNI AM Dana Lancar Syariah.....	1.825,28.....	0,43.....	4,59.....	4,59.....
Phillip Money Market Fund.....	1.783,05.....	0,32.....	3,95.....	3,95.....
Reksa Dana Capital Money Market Fund.....	1.753,58.....	0,50.....	6,05.....	6,05.....
Reksa Dana BRI Gebyar Dana Likuid.....	1.752,13.....	0,40.....	4,48.....	4,48.....
Reksa Dana Danakita Stabil Pasar Uang.....	1.660,35.....	0,50.....	5,14.....	5,14.....
Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund.....	1.602,15.....	0,51.....	5,94.....	5,94.....
Reksa Dana Premier Pasar Uang li.....	1.567,40.....	0,40.....	5,43.....	5,43.....
Reksa Dana TRAM Pundi Kas 2.....	1.560,28.....	0,45.....	5,38.....	5,38.....
Reksa Dana Setiabudi Dana Pasar Uang.....	1.555,67.....	0,47.....	5,61.....	5,61.....

25 SAHAM KOREKSI HARGA TERTINGGI						
Kode	Emiten	Sebelum	Penutupan	Persen	Volume	Nilai
IKAI	Intikeraamik Alamasri Industri Tbk	9	8	-11,11	2.387.200	21.321.900
POLU	Golden Flower Tbk	7.950	7.175	-9,75	1.900	13.632.500
BMBL	Lavender Bina Cendikia Tbk	31	28	-9,68	17.849.100	504.897.400
INPS	Indah Prakasa Sentosa Tbk	125	113	-9,60	966.000	110.405.200
PIPA	Multi Makmur Lemindo Tbk	96	87	-9,38	66.755.200	6.182.142.700
TAMA	Lancartama Sejati Tbk	33	30	-9,09	565.100	17.111.100
CTBN	Citra Tubindo Tbk	5.450	5.025	-7,80	6.200	31.130.000
INCF	Indo Komoditi Korpora Tbk	26	24	-7,69	2.145.700	51.803.600
STAR	Buana Artha Anugerah Tbk	39	36	-7,69	616.500	22.194.000
ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	13	12	-7,69	2.805.600	33.898.300
DOOH	Era Media Sejahtera Tbk	157	146	-7,01	119.451.400	18.307.233.000
ISAP	Isra Presisi Indonesia Tbk	15	14	-6,67	64.910.100	924.067.800
KING	Hoffmen Cleanindo Tbk	216	202	-6,48	2.200.300	455.592.800
KRYA	Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	260	244	-6,15	61.718.800	15.411.270.600
BEEF	Estika Tata Tiara Tbk	304	286	-5,92	20.633.500	5.999.435.800
PSKT	Red Planet Indonesia Tbk	68	64	-5,88	18.130.600	1.144.422.900
HBAT	Minahasa Membangun Hebat Tbk	104	98	-5,77	1.521.800	151.080.700
ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	960	905	-5,73	20.768.200	19.221.283.500
WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	71	67	-5,63	111.852.300	7.604.839.800
SMGA	Sumber Mineral Global Abadi Tbk	112	106	-5,36	84.774.900	9.241.323.900
LFLO	Imago Mulia Persada Tbk	266	252	-5,26	12.800	3.307.000
JAST	Jasnita Telekomindo Tbk	96	91	-5,21	15.259.200	1.427.811.200
INET	Sinergi Inti Andalan Prima Tbk	282	268	-4,96	201.545.800	55.836.578.200
SOSS	Shield On Service Tbk	605	575	-4,96	179.800	103.554.000
ADMR	Alamtri Minerals Indonesia Tbk	1.110	1.055	-4,95	70.380.700	75.755.766.000

INDEKS SEKTORAL



HARGA PANGAN

Data Harga Pangan pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 16.45 WIB.

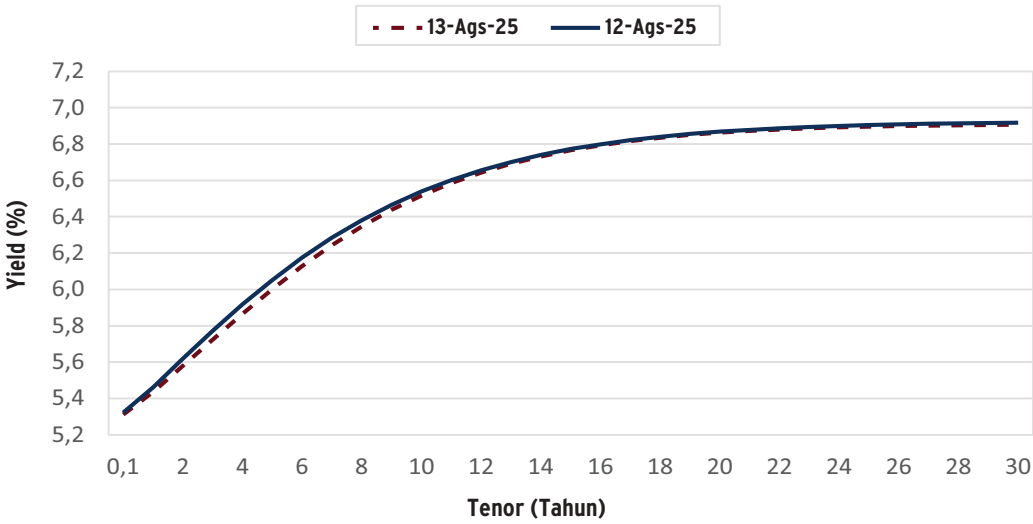
Komoditas (Rp)	11/8/2025	12/8/2025	13/8/2025
Beras	15.950	15.950	15.950
Beras Kualitas Bawah I	14.750	14.700	14.650
Beras Kualitas Bawah II	14.550	14.400	14.450
Beras Kualitas Medium I	16.050	16.050	16.050
Beras Kualitas Medium II	15.900	15.950	15.850
Beras Kualitas Super I	17.300	17.350	17.300
Beras Kualitas Super II	16.750	16.750	16.750
Daging Ayam.....	35.700	35.650	35.500
Daging Ayam Ras Segar	35.700	35.650	35.500
Daging Sapi	137.000	137.400	136.750
Daging Sapi Kualitas 1	140.200	140.650	139.650
Daging Sapi Kualitas 2	132.300	132.800	132.500
Telur Ayam	30.400	30.350	30.450
Telur Ayam Ras Segar	30.400	30.350	30.450
Bawang Merah	57.800	57.950	58.100
Bawang Merah Ukuran Sedang	57.800	57.950	58.100
Bawang Putih.....	40.800	40.900	40.800
Bawang Putih Ukuran Sedang.....	40.800	40.900	40.800
Cabai Merah	47.600	47.300	47.000
Cabai Merah Besar	48.000	47.450	46.700
Cabai Merah Keriting.....	47.300	47.100	46.800
Cabai Rawit.....	53.250	52.650	51.400
Cabai Rawit Hijau	46.800	46.800	45.050
Cabai Rawit Merah	56.750	55.600	54.150
Minyak Goreng.....	21.000	21.000	21.000
Minyak Goreng Curah	18.600	18.550	18.550
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1	22.400	22.450	22.450
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2	21.450	21.450	21.500
Gula Pasir	18.950	18.950	18.950
Gula Pasir Kualitas Premium	19.850	19.800	19.850
Gula Pasir Lokal	18.300	18.300	18.250

DATA INDEKS SAHAM

Data Indeks Saham pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Kode Indeks	Sebelumnya	Penutupan	Selisih (%)
COMPOSITE.....	7.791,70	7.892,91	1,30
LQ45	823,26	829,85	0,80
IDXLQ45LCL	116,80	117,47	0,58
IDX30	425,82	429,13	0,78
IDX80	123,29	124,22	0,75
IDXESGL	151,15	152,25	0,73
IDXQ30	136,60	138,33	1,27
IDXV30.....	126,99	127,91	0,73
IDXG30	139,28	140,64	0,98
IDXHIDIV20.....	487,64	492,32	0,96
IDXBUMN20.....	371,73	375,48	1,01
JII70	190,96	193,09	1,11
ISSI	257,87	263,11	2,03
JII	531,19	538,90	1,45
IDXMESBUMN.....	84,43	85,42	1,17
IDXSHAGROW	90,28	90,28	0,01
IDXSMC-LIQ.....	328,79	330,51	0,52
IDXSMC-COM.....	360,11	361,19	0,30
MBX	2.003,92	2.021,81	0,89
DBX	3.354,04	3.379,80	0,77
ABX	1.563,06	1.593,20	1,93
KOMPAS100	1.105,00	1.116,95	1,08
INFOBANK15	1.077,48	1.080,06	0,24
BISNIS-27.....	529,98	535,46	1,03
Investor33	414,76	419,24	1,08
SRI-KEHATI.....	371,76	374,53	0,74
ESGSKEHATI.....	124,03	124,88	0,69
ESGQKEHATI.....	124,13	124,94	0,65
SMinfra18.....	277,71	280,08	0,86
MNC36	327,85	331,05	0,97
I-GRADE.....	222,96	226,15	1,43
PRIMBANK10	199,00	199,74	0,37
ECONOMIC30.....	116,89	117,45	0,48
IDXVESTA28.....	148,69	149,22	0,36

DATA INDEKS OBLIGASI INDONESIA



Tenor (Tahun)	Yield (%)	
	13 Agst. 25	12 Agst. 25
0,1.....	5,3118.....	5,3217
1	5,4356.....	5,4621
2	5,5780.....	5,6186
3	5,7232.....	5,7721
4	5,8659.....	5,9177
5	6,0022.....	6,0525
6	6,1290.....	6,1750
7	6,2444.....	6,2846
8	6,3475.....	6,3814
9	6,4384.....	6,4661
10.....	6,5173.....	6,5393
11.....	6,5850.....	6,6023
12	6,6427.....	6,6561
13.....	6,6913.....	6,7016
14.....	6,7319.....	6,7400
15.....	6,7657.....	6,7723

Tenor (Tahun)	Yield (%)	
	13 Agst. 25	12 Agst. 25
16.....	6,7935.....	6,7993
17.....	6,8164.....	6,8217
18.....	6,8351.....	6,8403
19.....	6,8503.....	6,8557
20.....	6,8626.....	6,8683
21.....	6,8725.....	6,8787
22.....	6,8805.....	6,8873
23.....	6,8869.....	6,8942
24.....	6,8920.....	6,8999
25.....	6,8961.....	6,9045
26.....	6,8993.....	6,9083
27.....	6,9019.....	6,9113
28.....	6,9039.....	6,9138
29.....	6,9055.....	6,9158
30.....	6,9067.....	6,9174

Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel											
Nama Obligasi	Seri	Kupon (%)	Jatuh Tempo	TTM (Tahun)	Fair Price (%)			YTM (%)			
					13 Agst. 25	12 Agst. 25	Change (bps)	13 Agst. 25	12 Agst. 25	Change (bps)	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI022.....	ORI022.....	5,9500	15-Oct-25	0,17	100,1070	100,1065	0,05	5,3236	5,3356.....	-0,01	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI023T3	ORI023T3	5,9000	15-Jul-26	0,92	100,3524	100,3396	1,28	5,5071	5,5223.....	-0,02	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI023T6	ORI023T6	6,1000	15-Jul-29	3,92	100,4264	100,2466	17,98	5,9777	6,0292.....	-0,05	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI024T3	ORI024T3	6,1000	15-Oct-26	1,17	100,1693	100,1506	1,87	5,9500	5,9668.....	-0,02	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI024T6	ORI024T6	6,3500	15-Oct-29	4,18	100,7392	100,5549	18,42	6,1487	6,1988.....	-0,05	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI025T3	ORI025T3	6,2500	15-Feb-27	1,51	100,6576	100,6073	5,04	5,7927	5,8283.....	-0,04	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI025T6	ORI025T6	6,4000	15-Feb-30	4,51	100,8198	100,6617	15,81	6,1910	6,2312.....	-0,04	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI026T3	ORI026T3	6,3000	15-Oct-27	2,17	101,0783	101,0011	7,72	5,7706	5,8088.....	-0,04	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI026T6	ORI026T6	6,4000	15-Oct-30	5,18	100,8125	100,6546	15,79	6,2159	6,2516.....	-0,04	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI027T3	ORI027T3	6,6500	15-Feb-28	2,51	101,7230	101,6356	8,74	5,9084	5,9464.....	-0,04	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI027T6	ORI027T6	6,7500	15-Feb-31	5,51	102,2595	102,0397	21,98	6,2637	6,3106.....	-0,05	
Sukuk Negara Ritel Seri SR-017	SR017	5,9000	10-Sep-25	0,08	100,0440	100,0449	-0,08	5,3111	5,3213.....	-0,01	
Sukuk Negara Ritel Seri SR018T3	SR018T3	6,2500	10-Mar-26	0,57	100,4934	100,4846	0,88	5,3769	5,3964.....	-0,02	
Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	SR018T5	6,4000	10-Mar-28	2,58	99,9297	99,8475	8,22	6,4296	6,4643.....	-0,03	
Sukuk Negara Ritel Seri SR019T3	SR019T3	5,9500	10-Sep-26	1,08	100,3008	100,3069	-0,61	5,6609	5,6558.....	0,01	
Sukuk Negara Ritel Seri SR019T5	SR019T5	6,1000	10-Sep-28	3,08	100,2380	100,1059	13,21	6,0150	6,0622.....	-0,05	
Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3	SR020T3	6,3000	10-Mar-27	1,57	101,0855	101,0532	3,23	5,5785	5,6010.....	-0,02	
Sukuk Negara Ritel Seri SR020T5	SR020T5	6,4000	10-Mar-29	3,58	101,2519	101,1329	11,90	6,0100	6,0471.....	-0,04	
Sukuk Negara Ritel Seri SR021T3	SR021T3	6,3500	10-Sep-27	2,08	101,1103	101,0505	5,98	5,7809	5,8120.....	-0,03	
Sukuk Negara Ritel Seri SR021T5	SR021T5	6,4500	10-Sep-29	4,08	101,6569	101,4756	18,13	5,9907	6,0408.....	-0,05	
Sukuk Negara Ritel Seri SR022T3	SR022T3	6,4500	10-Jun-28	2,83	100,7012	100,5896	11,16	6,1788	6,2221.....	-0,04	
Sukuk Negara Ritel Seri SR022T5	SR022T5	6,5500	10-Jun-30	4,83	101,0830	100,8741	20,89	6,2892	6,3393.....	-0,05	